

**ANALISIS DISPARITAS EKONOMI WILAYAH PEKANSIKAWAN
(PEKANBARU, SIAK, KAMPAR, PELALAWAN)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



DISUSUN OLEH :

IBNU THOMIYAH R

143410119

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji syukur penulis kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Pekansikawan” Tugas Akhir ini disusun untuk menyelesaikan Strata-1 di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang setulus tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H.Syafrialdi S.H M.C.I** selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak **Ir. H. Abdul Kudus Zaini, MT** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
3. Ibu **Puji Astuti, ST, MT** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
4. Ibu **Rona Muliana ST, MT** selaku Pembimbing I yang telah mendorong, membimbing, serta memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu **Cihe Aprilia Bintang ST, MT** selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan dan dorongan yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

6. Kepada Staff Dosen Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
7. Ayahanda **Bahar** dan Ibunda **Ermanita** yang sangat penulis cintai, sayangi dan hormati yang tak henti hentinya memberikan dukungan moril dan materil doa, nasihat dan motivasi hingga sampai pada detik ini penulis tetap kuat dan akan terus melangkah hingga menyelesaikan studi.
8. Teman seperjuangan, M. Annur Rahim, M. Islami Salim, Ryan Rianda, Galih Chandra yang telah memberikan motivasi dan membantu memberikan saran kepada penulis dalam membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepan dan dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Pekanbaru, Juli 2018

Penulis

ANALISIS DISPARITAS EKONOMI WILAYAH PEKANSIKAWAN

(Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan)

Ibnu Thomiyah R

NPM : 143410119

ABSTRAK

Salah satu isu permasalahan di Wilayah Pekansikawan adalah tidak meratanya pertumbuhan ekonomi Wilayah Pekansikawan yang hanya terpusat pada satu inti yaitu Kota Pekanbaru sehingga akan mempengaruhi Kota Pekanbaru untuk terus berkembang, dikarenakan adanya tarikan dan dorongan masyarakat luar Kota Pekanbaru untuk terus datang mencari pekerjaan, melanjutkan studi, melakukan investasi dan akan mempengaruhi kabupaten/kota disekitarnya lambat untuk berkembang.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan, untuk mengetahui seberapa besar tingkat disparitas yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalisme yang bersumber pada teori dan kebenaran empirik dan etik. Teknik Analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson dan Tipologi Klassen dibantu dengan aplikasi pemetaan Arc GIS dan SPSS.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor di wilayah Pekansikawan dan tingkat disparitas yang terjadi tidak terlalu tinggi selama lima tahun terakhir serta terdapat pola disparitas antar wilayah pada masing-masing sektor dengan tingkat disparitas yang berbeda

Kata Kunci : Disparitas, Ekonomi Wilayah, Pekansikawan

**THE ANALYSIS OF REGIONAL ECONOMIC DISPARITY IN
PEKANSIKAWAN**

(Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan)

Ibnu Thomiyah R

NPM : 143410119

ABSTRACT

One of the issues in the Pekansikawan Region is the uneven economic growth of the Pekansikawan Region which is only centered in Pekanbaru City, so that it will influence Pekanbaru City to continue to develop, due to the attraction and encouragement of people outside Pekanbaru to continue looking for jobs, continue their studies, investing and will affect the surrounding districts/cities slowly to develop.

The purpose of this study was to determine the economic disparity of the Pekansikawan Region, to find out how much the level of disparity occurred. This research uses a rationalism approach that is based on empirical and ethical theories and truths. The analysis technique used is the Williamson Index and the Klassen Typology assisted with Arc GIS and SPSS mapping applications.

The results of this study indicate that there are differences in economic growth in each sector in the Employees region and the level of disparity that has not been too high over the past five years and there are patterns of disparity between regions in each sector with different levels of disparity

Keywords: Disparity, Regional Economic, Pekansikawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan dan Sasaran.....	5
1.4.1 Tujuan	6
1.4.2 Sasaran	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah	7
1.6.2 Ruang Lingkup Materi.....	9
1.7 Kerangka Berpikir	11
1.8 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1. Konsep Wilayah	15
2.1.1 Klasifikasi Wilayah.....	17
2.1.2 Kebaikan dan Keburukan Jenis Perwilayahan	25
2.2. Pengertian Pembangunan dan Pengembangan	30

2.3. Pembangunan Ekonomi	33
2.4. Perkembangan yang tidak seimbang.....	38
2.5. Perkembangan Ketidakseimbangan sebagai kutub pertumbuhan	39
2.6. Disparitas Pembangunan Wilayah.....	40
2.7. Upaya Upaya Mengatasi Masalah Disparitas Antar Wilayah.....	52
2.8. Pengaruh Kebijakan Pembangunan terhadap Kesenjangan	54
2.9. Urgensi Pembangunan Antar Wilayah.....	56
2.10 Disparitas Sebagai Kasus Negara Berkembang.....	60
2.11 Pembangunan Berimbang sebagai Isu Global.....	62
2.12 Pendapatan Regional.....	68
2.13 Analisis Kesenjangan Wilayah.....	69
2.14 Penelitian Terdahulu	71
2.15 Sintesa Teori.....	79
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	82
3.1 Pendekatan Penelitian	82
3.2 Jenis Penelitian	82
3.3 Lokasi Penelitian	83
3.4 Bahan dan Alat Penelitian.....	83
3.5 Variabel Penelitian.....	84
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	85
3.7 Teknik Analisis.....	85
3.7.1 Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi	89
3.7.2 Menganalisis Tingkat Disparitas Ekonomi Wilayah	89

3.7.3 Menganalisis Pola Disparitas Ekonomi Wilayah	91
3.8 Matrix Tahapan Analisis	92
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	93
4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau.....	93
4.2 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	114
4.3 Gambaran Umum Kabupaten Siak	124
4.4 Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	133
4.5 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	142
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	153
5.1 Identifikasi Laju Pertumbuhan Sektor	153
5.1.1 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	153
5.1.2 Sektor Pertambangan dan Penggalan.....	155
5.1.3 Sektor Industri Pengolahan	157
5.1.4 Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	159
5.1.5 Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.....	161
5.1.6 Sektor Konstruksi	163
5.1.7 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	165
5.1.8 Sektor Transportasi dan Pergudangan	167
5.1.9 Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	169
5.1.10 Sektor Informasi dan Komunikasi	171
5.1.11 Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	173
5.1.12 Sektor Real Estate.....	175

5.1.13 Sektor Jasa Perusahaan	177
5.1.14 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	179
5.1.15 Sektor Jasa Pendidikan.....	181
5.1.16 Sektor Jasa Kesehatan	183
5.1.17 Sektor Lainnya.....	185
5.2 Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Pekansikawan	187
5.3 Analisis Pola Disparitas Wilayah Pekansikawan	195
5.3.1 Analisis Pola Disparitas Ekonomi Antar Sektor Kota Pekanbaru	200
5.3.2 Analisis Pola Disparitas Ekonomi Antar Sektor Kab. Siak	203
5.3.3 Analisis Pola Disparitas Ekonomi Antar Sektor Kab. Kampar	206
5.3.4 Analisis Pola Disparitas Ekonomi Antar Sektor Kab. Pelalawan	209
5.3.5 Analisis Pola Disparitas Ekonomi Wilayah Pekansikawan	211
BAB VI PENUTUP	268
6.1 Kesimpulan.....	268
6.2 Saran	271
DAFTAR PUSTAKA.....	273
LAMPIRAN	v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel <i>Review</i> Penelitian Terdahulu	75
Tabel 2.2	Tabel Sintesa Teori.....	79
Tabel 3.1	Tabel Matrix Tahapan Analisa.....	93
Tabel 4.1	Tabel Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Riau	95
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Provinsi Riau	100
Tabel 4.3	PDRB Atas Harga Konstan dengan Migas Provinsi Riau	102
Tabel 4.4	PDRB Atas Harga Berlaku Non Migas Provinsi Riau	105
Tabel 4.5	Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Riau	108
Tabel 4.6	Produksi Tanaman Pangan Provinsi Riau.....	109
Tabel 4.7	Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis dan Tanaman	111
Tabel 4.8	Jumlah Ternak menurut Jenisnya.....	112
Tabel 4.9	Produksi Perikanan Menurut Jenis Provinsi Riau	113
Tabel 4.10	Industri Pengolahan Provinsi Riau	115
Tabel 4.11	Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru.....	117
Tabel 4.12	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.....	119
Tabel 4.13	PDRB Atas Harga Berlaku Kota Pekanbaru.....	121
Tabel 4.14	PDRB Atas Harga Konstan Kota Pekanbaru	123
Tabel 4.15	Kecamatan di Kabupaten Siak	126
Tabel 4.16	Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Siak.....	128
Tabel 4.17	PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Siak.....	130
Tabel 4.18	PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Siak	132
Tabel 4.19	Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Kampar	137

Tabel 4.20	PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Kampar	139
Tabel 4.21	PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Kampar	141
Tabel 4.22	Luas Wilayah Masing Kecamatan di Kabupaten Pelalawan	144
Tabel 4.23	Sebaran Penduduk Kabupaten Pelalawan	146
Tabel 4.24	PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Pelalawan	148
Tabel 4.25	PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Pelalawan	150
Tabel 5.1	Input Data Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pekansikawan	154
Tabel 5.2	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pekansikawan	154
Tabel 5.3	Input Data Sektor Pertambangan dan Penggalian Pekansikawan	156
Tabel 5.4	Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian	156
Tabel 5.5	Input Data Sektor Industri Pengolahan	158
Tabel 5.6	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	158
Tabel 5.7	Input Data Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	160
Tabel 5.8	Laju Pertumbuhan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	160
Tabel 5.9	Input Data Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Pekansikawan	162
Tabel 5.10	Laju Pertumbuhan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Pekansikawan	162
Tabel 5.11	Input Data Sektor Konstruksi Pekansikawan	164
Tabel 5.12	Laju Pertumbuhan Sektor Konstruksi Pekansikawan	164
Tabel 5.13	Input Data Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Pekansikawan	166

Tabel 5.14 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.....	166
Tabel 5.15 Input Data Sektor Transportasi dan Pergudangan.....	168
Tabel 5.16 Laju Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan.....	168
Tabel 5.17 Input Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.....	170
Tabel 5.18 Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.....	170
Tabel 5.19 Input Data Sektor Informasi dan Komunikasi	172
Tabel 5.20 Laju Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi	172
Tabel 5.21 Input Data Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Pekansikawan.....	174
Tabel 5.22 Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	174
Tabel 5.23 Input Data Sektor Real Estate Pekansikawan	176
Tabel 5.24 Laju Pertumbuhan Sektor Real Estate	176
Tabel 5.25 Input Data Sektor Jasa Perusahaan.....	178
Tabel 5.26 Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Perusahaan.....	178
Tabel 5.27 Input Data Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	180
Tabel 5.28 Laju Pertumbuhan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan.....	180
Tabel 5.29 Input Data Sektor Jasa Pendidikan Pekansikawan	182
Tabel 5.30 Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Pendidikan	182
Tabel 5.31 Input Data Sektor Jasa Kesehatan	184
Tabel 5.32 Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Kesehatan	184
Tabel 5.33 Input Data Sektor Jasa Lainnya Pekansikawan.....	186

Tabel 5.34 Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Lainnya	186
Tabel 5.35 PDRB Atas Harga Berlaku 2015-2016 Wilayah Pekansikawan.....	188
Tabel 5.36 Indeks Williamson Wilayah Pekansikawan Tahun 2012	191
Tabel 5.37 Indeks Williamson Wilayah Pekansikawan Tahun 2013	191
Tabel 5.38 Indeks Williamson Williamson Pekansikawan Tahun 2014	192
Tabel 5.39 Indeks Williamson Pekansikawan Tahun 2015	192
Tabel 5.40 Input Data Analisis Pola Kesenjangan Wilayah Kota Pekanbaru.....	196
Tabel 5.41 Input Data Analisis Pola Kesenjangan Wilayah Kabupaten Siak	197
Tabel 5.42 Input Data Analisis Pola Kesenjangan Wilayah Kabupaten Kampar	198
Tabel 5.43 Input Data Analisis Pola Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	199
Tabel 5.44 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Pekanbaru	200
Tabel 5.45 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Siak	203
Tabel 5.46 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Kampar	206
Tabel 5.47 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Pelalawan	209

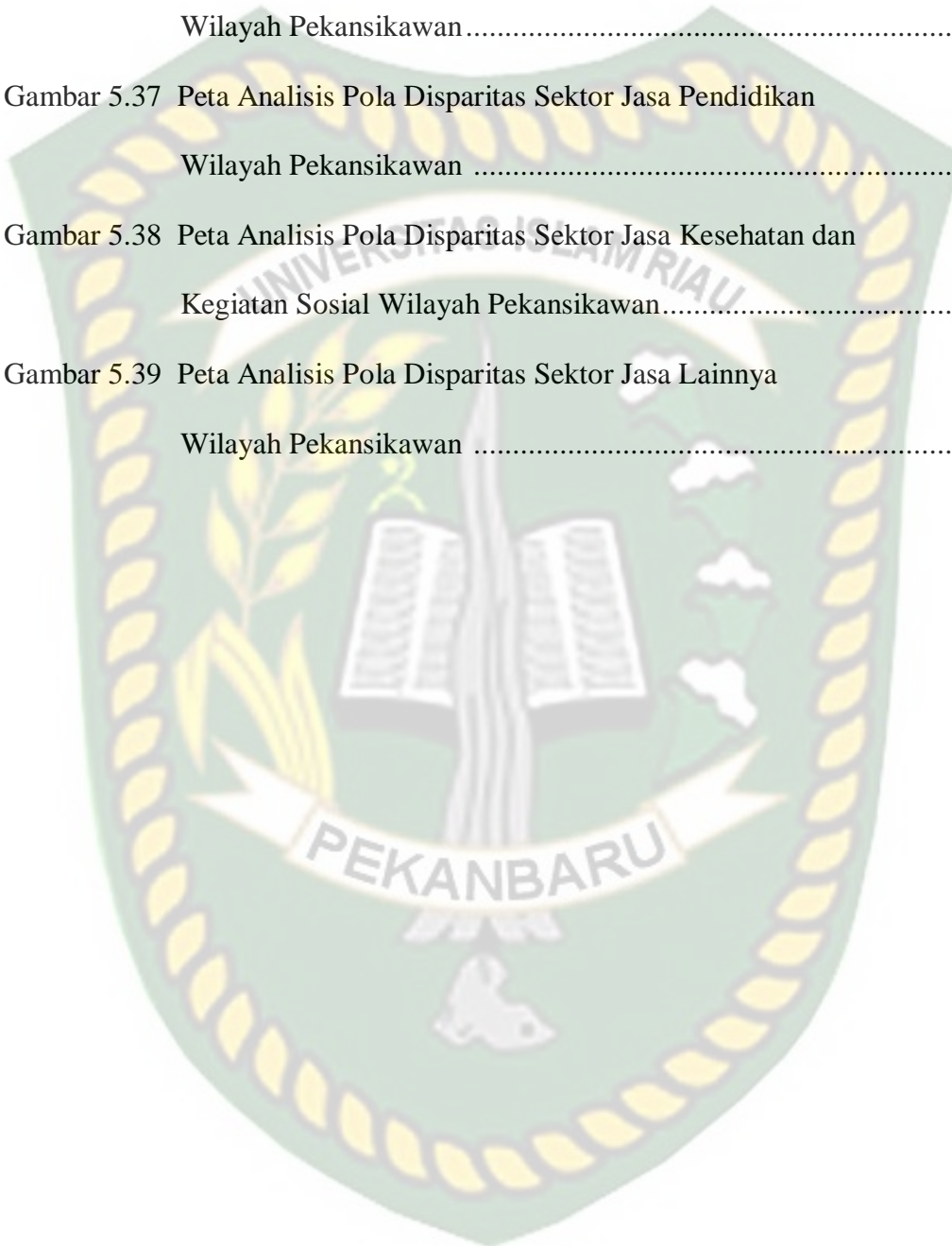
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Lokasi Penelitian.....	9
Gambar 2.1	Wilayah Fungsional	19
Gambar 2.2	Hubungan Fungsional Antara Inti dan Hinterland dalam Wilayah Nodal	21
Gambar 2.3	Sub Sub Wilayah Inti dengan Tingkat Hirarki pada Wilayah Nodal	22
Gambar 4.1	Peta Administrasi Provinsi Riau.....	96
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kota Pekanbaru	118
Gambar 4.3	Peta Administrasi Kabupaten Siak	127
Gambar 4.4	Peta Administrasi Kabupaten Kampar.....	136
Gambar 4.5	Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan	145
Gambar 5.1	Tingkat Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	155
Gambar 5.2	Tingkat Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian	157
Gambar 5.3	Tingkat Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	159
Gambar 5.4	Tingkat Pertumbuhan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	161
Gambar 5.5	Tingkat Pertumbuhan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	163
Gambar 5.6	Tingkat Pertumbuhan Sektor Kontruksi	165
Gambar 5.7	Tingkat Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	167
Gambar 5.8	Tingkat Pertumbuhan Sektor Tranportasi dan Pergudangan	169

Gambar 5.9	Tingkat Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	171
Gambar 5.10	Tingkat Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi	173
Gambar 5.11	Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.....	175
Gambar 5.12	Tingkat Pertumbuhan Sektor Real Estate	177
Gambar 5.13	Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Perusahaan	179
Gambar 5.14	Tingkat Pertumbuhan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan.....	181
Gambar 5.15	Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Pendidikan	183
Gambar 5.16	Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	185
Gambar 5.17	Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Lainnya	187
Gambar 5.18	Disparitas Ekonomi Wilayah 2012-2016.....	194
Gambar 5.19	Diagram Pola Disparitas Ekonomi antar Sektor Kota Pekanbaru	201
Gambar 5.20	Diagram Pola Disparitas Ekonomi antar Sektor Kabupaten Siak	204
Gambar 5.21	Diagram Pola Disparitas Ekonomi antar Sektor Kabupaten Kampar.....	207
Gambar 5.22	Diagram Pola Disparitas Ekonomi antar Sektor Kabupaten Pelalawan.....	210
Gambar 5.23	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Wilayah Pekansikawan.....	214

Gambar 5.24	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Pertambangan dan Penggalian Wilayah Pekansikawan	217
Gambar 5.25	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Industri Pengolahan Wilayah Pekansikawan	220
Gambar 5.26	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Wilayah Pekansikawan	223
Gambar 5.27	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampar, Limbah dan Daur Ulang Pekansikawan	226
Gambar 5.28	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Konstruksi Wilayah Pekansikawan	229
Gambar 5.29	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Wilayah Pekansikawan	232
Gambar 5.30	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Transportasi dan Pergudangan Wilayah Pekansikawan	235
Gambar 5.31	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Wilayah Pekansikawan	238
Gambar 5.32	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Informasi dan Komunikasi Wilayah Pekansikawan	241
Gambar 5.33	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Wilayah Pekansikawan	244
Gambar 5.34	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Real Estate Wilayah Pekansikawan	247

Gambar 5.35	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Jasa Perusahaan	
	Wilayah Pekansikawan	250
Gambar 5.36	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Administrasi	
	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib Sosial	
	Wilayah Pekansikawan	253
Gambar 5.37	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Jasa Pendidikan	
	Wilayah Pekansikawan	256
Gambar 5.38	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Jasa Kesehatan dan	
	Kegiatan Sosial Wilayah Pekansikawan	259
Gambar 5.39	Peta Analisis Pola Disparitas Sektor Jasa Lainnya	
	Wilayah Pekansikawan	262



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu wilayah secara umum dapat diartikan sebagai melakukan suatu perubahan. Menurut Rustiadi dkk (2009) pembangunan merupakan perubahan terencana (*planned changes*) yang artinya bahwa suatu perubahan dapat dikatakan pembangunan manakala proses perencanaan memberikan kontribusi penting terhadap perubahan tersebut, sehingga perubahan tanpa perencanaan tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan.

Rustiadi dkk (2009) berpendapat bahwa suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan. Selanjutnya, Todaro, 2006 dalam Rustiadi dkk, 2009 menyatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pembangunan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan

Pembangunan wilayah secara spasial tidak selalu merata, disparitas antar wilayah sering kali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mengalami perumbuhan yang sangat cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Disparitas pembangunan merupakan perbedaan pembangunan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan.

Disparitas pembangunan yang terjadi pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya sumberdaya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (*investor*) yang memilih daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi serta prasarana yang mendukung aktifitas masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Semakin meningkatnya jumlah penanam modal (*investor*) suatu daerah akan mempengaruhi tingkat pembangunan daerah tersebut, akan tetapi hal ini akan berdampak buruk terhadap pembangunan di daerah sekitarnya (*hinterland*).

Permasalahan yang pada umumnya terjadi akibat adanya disparitas pembangunan adalah kemiskinan, dengan tidak meratanya pembangunan yang ada di suatu wilayah. Sehingga dengan hal ini akan berdampak buruk terhadap ekonomi wilayah yang akan mengakibatkan wilayah atau daerah tersebut lambat untuk berkembang, wilayah yang berada disekitarnya menjadi lemah karena eksploitasi sumberdaya yang berlebihan demi memenuhi kebutuhan baku dari wilayah dengan tingkat pembangunan yang tinggi, oleh sebab itu diperlukan pemahaman mengenai faktor faktor penyebab terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah. Faktor tersebut antara lain faktor biofisik atau sumberdaya alam, Sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, karakteristik struktur ekonomi wilayah, dan kebijakan daerah (Anwar, 2005 dalam Rahman, 2009)

Kenyataan umum hampir di semua negara berkembang, (Dumairy, 1996 dalam Mayasari, 2015) menjelaskan bahwa disparitas pembangunan di Indonesia

selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek atau dimensi. Hal ini dipicu oleh beberapa hal antara lain : perbedaan potensi daerah sangat besar, perbedaan kondisi geografis, dan ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah serta kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar daerah juga turut mendorong terjadinya disparitas pembangunan wilayah tersebut (Sjafrizal, 2014).

Bila disparitas ekonomi antar wilayah tersebut cukup besar, maka hal ini dapat membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial dan politik. Sebagaimana diungkapkan oleh Sjafrizal, 2008 dalam Sjafrizal, 2014 bahwa ketimpangan ekonomi antar wilayah yang cukup besar akan menyebabkan kurang efisiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan (kemakmuran)

Menurut Agusta Ersada, 2015 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kementrian Agraria dan Tata Ruang mengatakan bahwa terdapat 4 isu strategis suatu Kawasan Strategis Nasional Perkotaan, yaitu tidak meratanya perkembangan ekonomi, disparitas antar wilayah di kawasan regional, in-efisiensi pelayanan infrastruktur dan permasalahan lingkungan. Pada studi kasus Pekansikawan, terdapat beberapa dampak yang akan di timbulkan yaitu diantaranya *urban sprawl*, kemacetan lalu lintas, in-efisiensi infrastruktur, in-efisiensi pelayanan jaringan per populasi, serta in-efisiensi penggunaan lahan. Oleh karena itu, diperlukan penataan di Wilayah Pekansikawan.

Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota dengan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang dikelilingi oleh Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak,

Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menyebutkan bahwa Provinsi Riau memiliki kawasan andalan yang mencakup Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kawasan ini perlu diprioritaskan penataan ruangnya karena memiliki fungsi strategis dalam pengembangan ekonomi wilayah. sebagai ibukota Provinsi Riau dan melalui Keputusan Gubernur dibentuklah Panitia Pelaksana Kegiatan Pekansikawan dengan Nomor KPTS/213/11/2017.

Salah satu isu permasalahan di Wilayah Pekansikawan adalah tidak meratanya pertumbuhan ekonomi Wilayah Pekansikawan yang mana hanya terpusat pada satu inti yaitu Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan kawasan perkotaan yang berada disekitarnya lambat untuk berkembang.

Potensi perekonomian di Wilayah Pekansikawan yang beragam dan saling mempengaruhi, seiring dengan pesatnya pertumbuhan Kota Pekanbaru sebagai kota inti dari Wilayah Pekansikawan dengan PDRB dari Tahun 2016 mencapai 92.381.597.7 (Pekanbaru dalam Angka, 2017). Hal ini akan mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan, dan hal ini akan terus mempengaruhi Kota Pekanbaru untuk terus berkembang, dikarenakan adanya tarikan dan dorongan masyarakat luar Kota Pekanbaru untuk terus datang mencari pekerjaan, melanjutkan studi dan melakukan investasi.

Kota Pekanbaru sebagai Kota inti akan menarik masyarakat luar untuk datang hingga menetap di Kota Pekanbaru dan akan terus membuat Kota Pekanbaru untuk berkembang sehingga akan menimbulkan disparitas ekonomi antar wilayah, oleh karena itu perlu diketahui tingkat disparitas ekonomi Wilayah

Pekansikawan dan sangat menarik jika dilakukan penelitian terkait disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan.

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah Pekansikawan merupakan salah satu wilayah yang terdapat pada jalur timur Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Riau yang memiliki potensi perekonomian dan tingkat pertumbuhan perekonomian yang beragam hal ini dapat di ketahui dari data PDRB masing masing kabupaten/kota di Wilayah Pekansikawan yaitu pada Tahun 2016 PDRB perkapita Kota Pekanbaru berjumlah 5.757.420 juta Rupiah sedangkan Kabupaten Kampar sebesar 8.573.211 Juta Rupiah, Kabupaten Pelalawan sebesar 9.860.069 Juta Rupiah dan untuk Kabupaten Siak berjumlah 17.424.794 Juta Rupiah. Berdasarkan data diatas dapat di lihat bahwa Kota Pekanbaru memiliki angka PDRB tertinggi dibandingkan dengan 3 Kabupaten/Kota lainnya akan tetapi untuk PDRB per kapita bisa diperhatikan bahwa Kabupaten Siak memiliki PDRB per kapita tertinggi dikarenakan jumlah penduduk yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang memiliki pertumbuhan maupun pembangunan yang sangat pesat akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan di tiga kabupaten/kota lainnya dan akan menimbulkan disparitas ekonomi wilayah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka adapun rumusan permasalahan tersebut adalah :

- a. Perbedaan pertumbuhan ekonomi wilayah pada masing-masing kabupaten /kota di Wilayah Pekansikawan
- b. Adanya disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan)

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan pada sub bab sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah di masing-masing Wilayah Pekansikawan ?
- b. Berapa besar tingkat disparitas ekonomi wilayah Pekansikawan ?
- c. Bagaimana pola disparitas ekonomi wilayah Pekansikawan ?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan)

1.4.2 Sasaran

Adapun sasaran penelitian ini berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan maka peneliti menyusun beberapa sasaran dalam mendukung penelitian ini. Sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi Wilayah Pekansikawan.

- b. Menganalisis tingkat disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan
- c. Menganalisis pola disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebelumnya maka manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritik yaitu dapat menjadi referensi terhadap peneliti lainnya jika tertarik dalam menganalisis disparitas ekonomi wilayah pada wilayah lainnya
- b. Manfaat bagi masyarakat yaitu menambah ilmu pengetahuan terhadap perekonomian wilayah dan disparitas ekonomi wilayah yang pada umumnya terjadi di Indonesia dan negara berkembang lainnya.
- c. Manfaat bagi pemerintah yaitu dapat menjadi rujukan dan masukan terhadap pemerintah dan juga menjadi referensi dalam melakukan kajian dalam mengembangkan wilayah Pekansikawan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Wilayah Pekansikawan memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu dilintasi oleh jalur lintas timur Sumatera dan memiliki aksesibilitas yang baik untuk menuju ke provinsi yang berada di sekitar Provinsi Riau yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Jambi.

Wilayah Pekansikawan memiliki luas 34.402,57 km² yang terletak antara 100° 28' 30" – 103° 28' 00" BT dan 1° 16' 30" LU – 0° 27' 00" LS. Peta lokasi ruang lingkup penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1 sedangkan batas-batas administrasi dari Wilayah Pekansikawan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.



PETA LOKASI PENELITIAN



1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini mencakup seberapa besar tingkat disparitas Ekonomi wilayah di masing masing Kabupaten/Kota Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan berdasarkan *Indeks Williamson* yakni menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai input data. Selain PDRB, penelitian ini juga membutuhkan data jumlah penduduk dari tahun ke tahun untuk melihat pertumbuhan penduduk, Berikut diuraikan ruang lingkup materi penelitian yang akan dilaksanakan dan dibahas dalam laporan penelitian ini :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah pada masing masing kabupaten/kota di Wilayah Pekansikawan menggunakan analisis pertumbuhan ekonomi dengan input data berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing masing Wilayah Pekansikawan.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan menggunakan analisis *Indeks Williamson* dengan input data PDRB per kapita dan jumlah penduduk Wilayah Pekansikawan.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis pola disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan menggunakan analisis tipologi Klassen untuk menentukan klasifikasi masing masing sektor serta diperkuat menggunakan *software* SPSS untuk menggambarkan pola kesenjangan antar sektor pada masing masing kabupaten/kota dan untuk pola kesenjangan antar sektor antar wilayah di sajikan dalam bentuk peta menggunakan *software* Arc GIS serta

menggunakan analisis deskriptif dalam mendeskripsikan pola kesenjangan ekonomi yang terjadi.



1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian

1. Permasalahan yang pada umumnya terjadi akibat adanya kesenjangan pembangunan adalah kemiskinan, dengan tidak meratanya pembangunan yang ada di suatu wilayah.
2. Kenyataan umum hampir di semua Negara berkembang, Dumairy (1996:62) dalam Lara (2015) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek atau dimensi.
3. Sjafrizal (2008) dalam Sjafrizal (2014) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi antar wilayah yang cukup besar akan menyebabkan kurang efisiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan (kemakmuran)
4. Potensi perekonomian di wilayah Pekansikawan yang beragam dan saling mempengaruhi. seiring dengan pesatnya pertumbuhan Kota Pekanbaru sebagai Kota inti dari Wilayah Pekansikawan, hal ini akan mempengaruhi perekonomian di kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan, dan Hal ini akan terus mempengaruhi Kota Pekanbaru untuk terus berkembang, sehingga akan menimbulkan kesenjangan/ketimpangan ekonomi antar wilayah,

R. Masalah

1. Perbedaan Pertumbuhan ekonomi wilayah pada masing masing kabupaten/kota di Wilayah Pekansikawan
2. Adanya disparitas ekonomi wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan)

Tujuan

Mengetahui disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan)

Sasaran

Menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah masing masing kabupaten/kota yakni Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan

Menganalisis Tingkat disparitas ekonomi wilayah masing masing kabupaten/kota Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan

Mengidentifikasi pola disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan

Input Data

PDRB (atas harga konstan)

Laju Pertumbuhan PDRB (atas harga berlaku)

Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor

Metodologi Penelitian

Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Williamson

Tipologi Klassen Deskriptif

Output

Diketahui pertumbuhan ekonomi Wilayah Pekansikawan

Diketahui tingkat disparitas ekonomi wilayah pekansikawan

Teridentifikasinya pola disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan

Diketahui disparitas ekonomi di Wilayah Pekansikawan

1.8 Sistematika Penulisan

Penyajian laporan penelitian mengenai “*Analisis disparitas ekonomi wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan)*” disusun menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar yang secara sistematis disusun dan dibagi kedalam 3 bagian yaitu pendahuluan, kajian pustaka dan metodologi penelitian dengan uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian teoritis atau teori-teori yang terkait dengan penelitian yaitu teori mengenai konsep wilayah, pembangunan wilayah, disparitas ekonomi wilayah serta teori teori yang mendukung dalam laporan penelitian ini.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi bahan dan alat penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengolahan

dan penyajian data, pendekatan metode penelitian, pelaksanaan penelitian, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Gambaran Umum Wilayah

Bab ini berisi gambaran umum wilayah penelitian yang berisikan mengenai data-data yang menggambarkan wilayah penelitian.

Bab V : Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil-hasil pembahasan yang telah dilakukan, berisikan analisis-analisis atau perhitungan perhitungan dalam menarik kesimpulan

BAB VI : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan peneliti berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan keluaran yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Wilayah

Suatu wilayah terkait dengan beragam aspek, sehingga definisi baku mengenai wilayah belum ada kesepakatan diantara para ahli (Rahman, 2009). Sebagian ahli mendefinisikan wilayah dengan merujuk pada tipe-tipe wilayah, adapula yang mengacu pada fungsinya, dan ada pula yang berdasarkan korelasi yang kuat antara unsur unsur (fisik dan non fisik) pembentuk suatu wilayah. Sehingga, pengertian wilayah tidak hanya sebatas aspek fisik tanah, namun juga aspek lain seperti biologi, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Menurut Rustiadi dkk, (2009) wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas batas spesifik (tertentu) dimana komponen komponen wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sedangkan menurut Undang Undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau fungsional.

Keragaman dalam mendefinisikan konsep wilayah terjadi karena perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi, para ahli cenderung melepaskan perbedaan perbedaan konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan tujuan pengembangan wilayah. Menurut Budiharsono (2005), wilayah dapat dibagi menjadi (1) Wilayah Homogen, (2) Wilayah Nodal, (3) Wilayah Perencanaan dan (4) Wilayah Administratif.

Sedangkan Rustiadi dkk (2009) berpendapat bahwa kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah (1) Wilayah Homogen (*uniform*) (2) Wilayah Sistem/Fungsional dan (3) Wilayah Perencanaan/Pengelolaan (*planning region* atau *programming region*). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah ini, Wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep wilayah sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah administratif-politis dan wilayah perencanaan fungsional.

Pandangan subjektif menyatakan wilayah adalah cara untuk membagi ruang untuk mencapai tujuan tertentu. Penentuan wilayah adalah metode klasifikasi untuk menyusun pengelompokan ruang. Wilayah dipandang sebagai suatu alat untuk menerangkan ruang yang di definisikan menurut kriteria tertentu untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, apabila kriterianya berubah, maka batas wilayahnya juga berubah. Pandangan Objektif terkait dengan definisi ruang berpendapat sebaliknya. Jika menurut pandangan subjektif penentuan wilayah adalah cara untuk mencapai tujuan, maka menurut pandangan objektif definisi dari wilayah adalah satu kesatuan yang pasti beserta unsur didalamnya yang dapat diidentifikasi dan dipetakan (Glasson, 1978 dalam Putra, 2017)

2.1.1 Klasifikasi Wilayah

Berdasarkan kriteria dan perkembangannya, wilayah dapat dibagi menjadi lima konsep wilayah (Rustiadi dkk, 2009). Adapun lima konsep wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Wilayah Homogen

Suatu wilayah formal adalah wilayah yang berbentuk berdasarkan pada kriteria homogenitas. Pada awalnya homogenitas ini berdasarkan pada kriteria fisik dan berkaitan dengan konsep geografi, misalnya topografi, iklim dan vegetasi. Kemudian homogenitas ini bergeser pada kriteria ekonomi, misalnya wilayah yang homogen dilihat dari aktifitas pertaniannya ataupun aktifitas industrinya. Menentukan batas wilayah ini dapat dilakukan misalnya dengan melihat kesamaan dalam karakteristik ekonomi, seperti persentase penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani

Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek *homogenitas* (kesamaan) dalam kelompok dan memaksimalkan perbedaan (*kompleksitas, varians, ragam*) antar kelompok tanpa memperhatikan bentuk hubungan fungsional (interaksi) antar wilayah nya atau antar komponen didalamnya. Sumber kesamaan yang dimaksud berupa kesamaan struktur produksi, konsumsi, pekerjaan, topografi, iklim, perilaku sosial, pandangan politik, tingkat pendapatan dan lain lain.

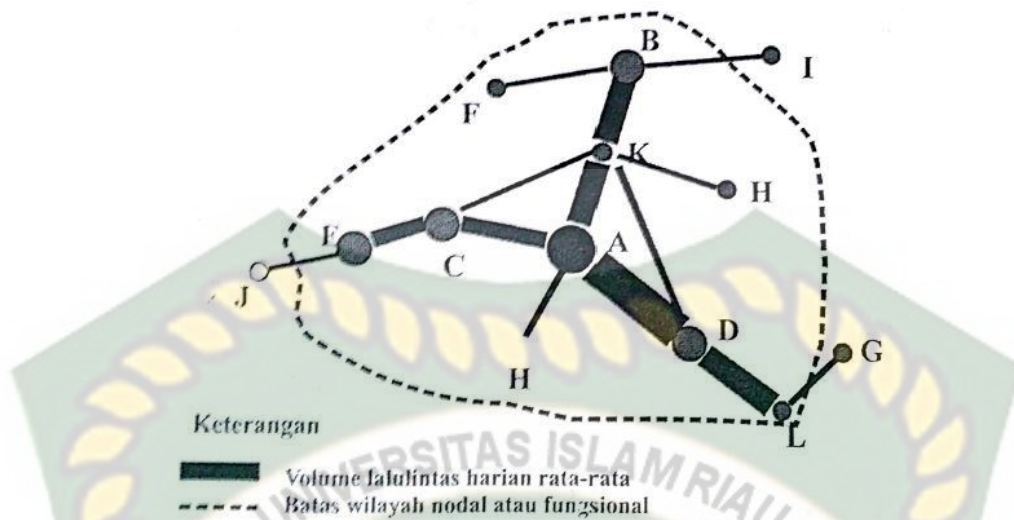
Pada dasarnya terdapat beberapa faktor homogenitas wilayah. Secara umum terdiri atas penyebab alamiah dan penyebab *artificial*. Faktor alamiah yang dapat menyebabkan *homogenitas* wilayah adalah kemampuan lahan, iklim, dan berbagai faktor sosial. Contoh wilayah homogen *artificial* adalah wilayah homogen atas dasar kemiskinan (peta kemiskinan), suku bangsa, budaya dan lain lain.

Ada beberapa keterbatasan teknis yang akan dihadapi dilapangan ketika konsep Wilayah Homogen digunakan sebagai pijakan pendeskripsian analisis atau pengelolaan. Secara ekologis, Wilayah Homogen tidak stabil dan sering berhimpitan dengan Wilayah Administratif.

b. Wilayah Nodal

Suatu wilayah nodal adalah wilayah yang diidentifikasi berdasarkan kepada kriteria tertentu serta memperlihatkan suatu hubungan fungsional atau interpedensi antara bagian-bagiannya. Karena interpedensi ini biasanya terikat oleh suatu pusat (*node*), seringkali wilayah ini disebut sebagai wilayah nodal atau wilayah terpolarisasi yang terdiri dari unit unit yang heterogen seperti kota besar, kota kecil dan permukiman.

Semua unit ini terikat oleh suatu *node*. Ikatan ini tergambar dalam aliran berdasarkan kriteria sosial ekonomi. Salah satu contoh wilayah nodal adalah wilayah metropolitan atau wilayah yang cenderung membentuk *mega urban*. Menentukan batas wilayah nodal ini dapat dilakukan, misalnya melihat besarnya mobilitas penduduk. Apabila mobilitasnya tinggi maka wilayah tersebut masih berada dalam ruang lingkup suatu wilayah nodal. Struktur fungsional dapat dilihat pada Gambar 2.1 adalah sebagai berikut :



Sumber : Nurzaman, 2012

Gambar 2.1 Wilayah Fungsional/Nodal

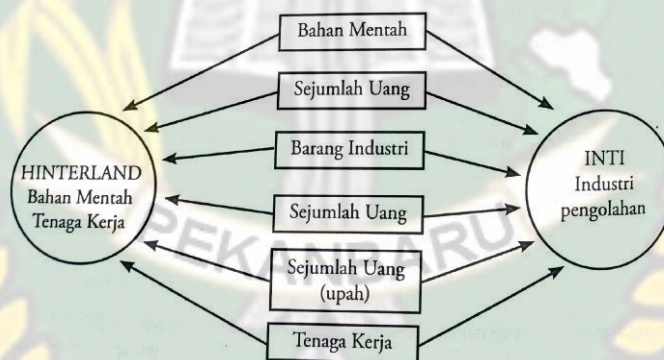
Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa kota B,C,D dan K jelas termasuk kedalam wilayah fungsional yang berpusat di A. demikian juga Kota E dan I walaupun ikatannya sudah lebih lemah. Kota G, I, dan J sudah tidak dapat dimasukkan lagi kedalam Wilayah Fungsional karena interaksinya sudah sangat lemah. Kota F dan H walaupun interaksinya lemah, masih dapat masuk kedalam wilayah ini karena letak geografisnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya konsep Wilayah Nodal adalah salah satu konsep Wilayah fungsional/nodal yang sederhana karena memandang suatu wilayah secara dikotomis (terbagi atas dua bagian). Konsep wilayah nodal didasarkan pada asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu “Sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti. inti (pusat simpul) adalah pusat pelayanan dan atau pemukiman,

sedangkan plasma adalah daerah belakang (*pheriphery/hinterland*), yang mempunyai sifat sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional.

Konsep wilayah nodal lebih berfokus pada peran pengendalian/pengaruh sentral atau pusat (*node*) serta hubungan ketergantungan pusat dan elemen elemen sekelilingnya dibandingkan soal batas wilayah (Richardson, 1969 dalam Rustiadi dkk, 2009)

Secara filosofis batas wilayah nodal dapat memotong garis yang memisahkan dua daerah administrasi karena adanya perbedaan orientasi terhadap pusat pelayanan yang berbeda. Dengan demikian batas fisik dari setiap daerah pelayanan bersifat sangat baur dan dinamis. dalam praktiknya tidaklah mudah dalam mengidentifikasi batas wilayah nodal dari pada mengidentifikasi pusat pusatnya



Sumber : Ernan Rustiadi dkk, 2009

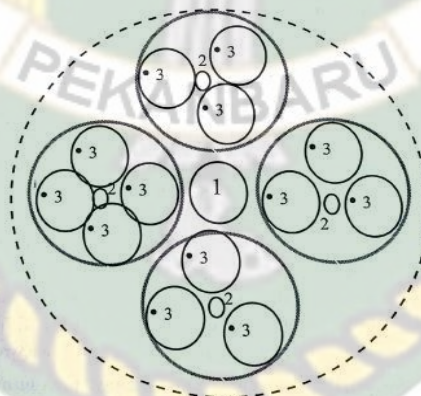
Gambar 2.2 Hubungan Fungsional antara inti dan hinterland dalam suatu Wilayah Nodal

Pusat wilayah berfungsi sebagai : (1) tempat terkonsentrasinya penduduk (pemukiman) (2) pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland* (3) pasar bagi

komoditas-komoditas pertanian maupun industri dan (4) lokasi pemusatan industri manufaktur yakni kegiatan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu.

Hinterland berfungsi sebagai (1) pemasok (produsen) bahan bahan mentah dan atau bahan baku (2) Pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan *commuting* (menglaju) (3) daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur dan (4) penjaga keseimbangan ekologis.

Gambar 2.3 menunjukkan hubungan fungsional antara subwilayah *hinterland* dengan inti. Suatu wilayah yang luas dapat mempunyai beberapa inti dengan hierarki (orde) tertentu. Sub Wilayah inti dengan hierarki yang lebih tinggi merupakan pusat bagi beberapa sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih rendah. Unit terkecil suatu wilayah nodal berpusat pada satu sub wilayah inti dengan sub wilayah plasma di sekelilingnya. Secara skematik dapat dijelaskan dengan Gambar 2.3



Sumber : Rustiadi dkk, 2009.

Gambar 2.3 Sub-Sub Wilayah inti dengan tingkat hirarki pada suatu Wilayah Nodal

c. Wilayah Perencanaan

Wilayah formal dan wilayah fungsional dapat menjadi kerangka menentukan klasifikasi ketiga dari wilayah yaitu wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan dapat diartikan sebagai wilayah yang memperlihatkan keterkaitan atau kesatuan atas keputusan keputusan ekonomi yang diterapkan. Wilayah perencanaan harus luas sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dalam distribusi penduduk dan lapangan kerja, tetapi cukup kecil sehingga perencanaan dapat dilihat sebagai satu kesatuan.

Pembagian negara kedalam wilayah-wilayah tidak selalu berarti bahwa negara terbagi habis oleh penentuan batas wilayah. Mungkin saja terdapat ruang dalam negara yang tidak termasuk ke dalam wilayah tertentu. Ruang ini adalah ruang yang belum terintegrasi kedalam sistem ekonomi negara. Sebaliknya, dalam batas wilayah dapat terjadi tumpang tindih.

Misalnya, dipakai kriteria nodalitas sebagai kriteria penentuan batas wilayah, maka mungkin saja terdapat suatu ruang tertentu yang masuk kedalam lebih dari satu sistem nodalitas. Bisa juga terjadi sebagian suatu wilayah masuk kedalam sistem nodalitas. Dan sebagian lagi masuk kedalam sistem homogenitas. Sebagai contoh adalah Kabupaten Bogor yang masuk kedalam sistem nodalitas mega urban Jabodetabek, namun disisi lain Kabupaten Bogor juga termasuk kedalam sistem homogenitas sebagai daerah resapan air bersama dengan Puncak dan Cianjur. Jadi, disini terdapat tumpang tindih batas wilayah (Nurzaman, 2012 dalam Putra, 2017)

d. Wilayah Administratif-Politis

Wilayah administratif adalah wilayah perencanaan/pengelolaan yang memiliki landasan yuridis-politis yang paling kuat, konsep ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. Wilayah yang dipilih tergantung dari jenis analisis dan tujuan perencanaannya. Sering pula wilayah administratif ini disebut juga sebagai wilayah otonomi. Artinya, suatu wilayah yang mempunyai suatu otoritas melakukan keputusan dan pelaksanaan sendiri dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya didalamnya.

Wilayah administratif merupakan wilayah yang dibatasi atas dasar kenyataan bahwa wilayah tersebut berada dalam batas-batas pengelolaan administrasi atau tatanan politis tertentu. Sebagai contoh negara, provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan (desa). Secara historis, pembentukan wilayah-wilayah administratif pada mulanya sangat memperhatikan kesatuan sistem sosial, ekonomi dan ekologi. Wilayah administratif yang efektif seyogyanya sekaligus juga merupakan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi yang efektif pula.

e. Wilayah Pesisir

Wilayah Pesisir dapat dimasukkan kedalam konsep wilayah sistem kompleks, memiliki beberapa sub-sistem penyusun yang meliputi sistem ekologi (ekosistem), sistem sosial, dan sistem ekonomi. Secara sederhana, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah interaksi antara daratan dan lautan. Namun, definisi sederhana tersebut sering menjadi perdebatan dalam

hal penentuan batas wilayah pesisir kearah darat dan kearah laut. Oleh karena itu, terdapat banyak definisi mengenai wilayah pesisir yang berbeda beda, dan perbedaan tersebut terletak pada penentuan wilayah baik kearah darat maupun kearah laut.

Secara formal didalam Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipeengaruhi oleh perubahan didarat dan laut. Sebelum adanya undang-undang tersebut, definisi formal wilayah pesisir telah dikemukakan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Dalam keputusan tersebut wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut kearah darat wilayah peisirs meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipeengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia didarat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

2.1.2 Kebaikan dan Keburukan masing masing jenis perwilayahan

Menurut Tarigan (2006) masing masing perwilayahan mempunyai kebaikan ataupun keburukan. Cara perwilayahan mana yang paling cocok digunakan, tergantung pada tujuan studi/perencanaan itu sendiri .

a. Wilayah Administrasi

Perwilayahan berdasarkan administrasi pemerintahan, biasanya terikat kepada sejarah masa lalu dan telah ditetapkan berdasarkan undang-undang sehingga tidak mudah untuk diubah. Pembentukannya biasanya berdasarkan sejarah, tuntutan masyarakat, atau keputusan pemerintah. Perubahannya harus melalui undang-undang serta memerlukan persetujuan DPRD dan pemerintah pusat walaupun cara perwilayahan administrasi pemerintahan yang ada sekarang kurang efisien, tetapi tidak mudah diganti karena menyangkut sejarah dan fanatisme masyarakat.

Berdasarkan sejarah pembentukannya, wilayah administrasi yang setingkat di Indonesia adalah beragam. Ada yang luas dan ada yang sempit, ada yang memiliki potensi ekonomi yang kuat dan ada yang potensi ekonominya rendah. Jadi, sumber pendapatan daerah yang berpredikat provinsi misalnya, ada yang cukup kuat dan ada yang sangat lemah. Sering ibukota provinsi, kabupaten dan kecamatan tidak terletak di tengah tengah wilayahnya ataupun dilokasi yang sedemikian rupa menjamin efisiensi bagi segala pihak yang perlu berurusan dengan kantor pemerintahan di ibukota tersebut, namun demikian, tidak banyak yang dapat diubah karena menyangkut faktor sejarah dan fanatisme masyarakat. Salah satu keunggulan dari perwilayahan atas dasar administrasi pemerintahan adalah kemungkinan dapat ditetapkannya batas wilayah secara jelas. Batas itu sering kali menggunakan kondisi riil dilapangan yang memiliki ciri ciri yang jelas, misalnya sungai, laut, gunung, jurang, jalan, batas hutan, dan batas perkebunan. Lagipula batas administrasi

terbagi atas dua wilayah yang cukup kecil seperti desa/kelurahan dan bahkan masih dibagi lagi atas dusun/lingkungan. Dengan demikian, para kepala dusun/lingkungan bisa tahu persis batas wilayah kekuasaannya. Batas wilayah atas dasar administrasi pemerintahan ini tidak mungkin diabaikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki batas administrasi. Demikian pula kebijakan yang disarankan harus memperhatikan aspek wilayah pemerintahan karena kewenangan dalam pelaksanaan dibagi berdasarkan wilayah pemerintahan.

b. Wilayah Homogen

Perwilayahan berdasarkan *homogenitas* terutama berguna bagi perencanaan sektoral. Daerah daerah yang memiliki kesamaan dalam sektor yang dibahas, misalnya pertanian rakyat, perikanan, perkebunan, agama, atau beberapa sektor sekaligus dapat dijadikan satu wilayah. Dengan demikian, dapat dibuat satu pusat pelayanan yang menangani masalah yang sama dan program penanganannya pun sama atau hampir sama. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian dari pusat pelayanan sehingga dapat memberikan jalan keluar yang lebih tepat dan lebih efisien.

Permasalahan di satu unit daerah hampir sama dengan di unit daerah lain dan jalan keluar yang telah diuji coba di satu unit daerah kemungkinan pula cocok untuk diterapkan pada unit di daerah lain. Misalnya, cara meningkatkan produksi jagung di Tanah Karo mungkin cocok atau tak banyak variasinya apabila diterapkan di Simalungun (sama sama daerah

pegunungan). Cara untuk meningkatkan pendapatan nelayan di tingkat kemungkinan besar tidak banyak bedanya dengan di Asahan (sama sama pantai timur). Jadi, untuk program sektoral maka perwilayahan secara homogenitas sering dapat mempermudah pekerjaan. Namun, perlu diingat bahwa masing masing sektor memiliki pembagian wilayah yang cocok untuk sektor itu sendiri. Jadi, bisa terjadi sektor industri mempunyai perwilayahan sendiri demikian pula sektor kehutanan, perikanan laut, perikanan darat, perkebunan rakyat, peternakan dan lain lain. Apabila perwilayahan yang cocok untuk masing masing sektor dituruti maka akan terjadi banyak perwilayahan yang satu dan yang lainnya berbeda dan tumpang tindih. Apabila ini terjadi, maka sulit melakukan koordinasi antar sektoral, padahal keserasian antar sektoral adalah sangat penting untuk pembangunan dan kemajuan sektor sektor itu sendiri. Oleh sebab itu, sering terpaksa dibuat kompromi, yaitu dibuatlah perwilayahan yang cocok untuk beberapa sektor utama walaupun untuk beberapa sektor lainnya tidak begitu cocok. Dalam rangka kompromi ini, misalnya pernah dikenal di perwilayahan sumatera utara menjadi pantai timur, pegunungan dan pantai barat.

Perlu diingat bahwa batas luar perwilayahan dari perwilayahan atas dasar *homogenitas* ini sulit ditentukan sehingga umumnya juga memanfaatkan batas wilayah administrasi yang ada. Jadi, kalau ada tiga wilayah atas dasar *homogenitas* maka masing masing wilayah itu mencakup wilayah administrasi tertentu sehingga dapat dihindari

kemungkinan tumpang tindih. Hal ini juga mempermudah pengumpulan data dan pengaturan kebijakan untuk masing masing wilayah.

c. Wilayah Berdasarkan Pengaruh Ekonomi

Perwilayahan berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi mengenal adanya pusat pertumbuhan yang masing masing memiliki daerah belakangnya. Dalam hal ini keseluruhan wilayah ditetapkan dulu beberapa pusat pertumbuhan yang biasanya adalah kota-kota terbesar di dalam suatu unit wilayah dan kemudian ditetapkan batas pengaruh dari masing masing kota tersebut. Wilayah belakang (*hinterland*) dikatakan sebagai wilayah pengaruh sebuah kota apabila dalam memenuhi kebutuhannya atau menjual hasil produksinya cenderung bergantung kepada kota tersebut, termasuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Dalam menjual produk termasuk didalamnya menjual komoditas atau jasa/tenaga. Dengan cara ini, bisa jadi ada daerah belakang yang tidak bertuan, artinya tidak jelas pusat mana yang erat hubungannya dengan daerah belakang tersebut. Untuk menghindari adanya daerah yang tidak bertuan, dalam praktiknya ditetapkan saja berdasarkan pengamatan (*arbiter*) daerah itu termasuk ke salah satu pusat pertumbuhan. Cara perwilayahan seperti ini bersifat *makro regional*, artinya tidak ada dasar melihat sektor yang ada di wilayah ini satu per satu. Artinya, seluruh sektor yang beroperasi di wilayah tersebut memiliki ketergantungan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya. Perubahan di pusat pertumbuhan mempengaruhi daerah belakangnya, demikian pula

perubahan di daerah belakangnya akan mempengaruhi pusat pertumbuhannya. Perwilayahan seperti ini lebih cepat untuk perencanaan ekonomi daerah karena menyangkut seluruh aspek pengembangan wilayah, mengandung aspek ketergantungan/keterikatan, yaitu memperhatikan hubungan satu unit terhadap unit daerah lainnya dalam wilayah tersebut. Keterkaitan antar sektoral dan antar wilayah sangat menonjol sebagai pusat pembahasan dalam model perwilayahan seperti ini. Perwilayahan seperti ini sangat berguna dalam perencanaan transportasi dan perencanaan fasilitas sosial yang perlu dibangun di masing-masing pusat pertumbuhan.

Kegiatan sektor-sektor di satu unit daerah terkumpul menjadi satu yang terlihat dalam frekuensi hubungannya dengan daerah luar. Akan tetapi model ini memiliki kelemahan berupa sulitnya menetapkan batas pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan dan batas pengaruh itu sendiri bisa berubah karena adanya perubahan di daerah itu atau perubahan wilayah tetangga yang berdekatan.

d. Wilayah Perencanaan

Perwilayahan berdasarkan program atau suatu perencanaan khusus sering bersifat insidental dan sementara. Perwilayahan ini dibuat karena adanya program khusus, misalnya untuk menanggulangi banjir di salah satu atau beberapa alur sungai. Wilayah yang diikutsertakan dalam perencanaan itu adalah mulai dari muara, daerah di kanan kiri alur sungai sampai daerah pegunungan yang merupakan sumber mata air dari sungai

tersebut. Dalam program itu, mungkin termasuk proyek berupa pengerukan muara dan alur sungai, pembentengan sungai, penghijauan di hulu sungai, serta penyuluhan kepada masyarakat yang berdiam disitu, agar menjaga kelestarian ekosistem sungai. Jadi, wilayahnya merupakan sepanjang sungai tetapi bisa melewati beberapa kecamatan bahkan kabupaten dan provinsi. Sifat perwilayahan ini berorientasi kepada program. Oleh sebab itu, akan sirna kalau program itu sendiri sudah selesai dan tidak ada tindak lanjutnya.

2.2 Pengertian Pembangunan dan Pengembangan

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga. Dengan kata lain, proses pembangunan merupakan proses yang memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai negara berkembang, istilah pembangunan sering kali lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan seringkali secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik. Pengertian dari “Pemilihan alternatif yang sah” dalam definisi pembangunan diatas diartikan bahwasannya upaya pencapaian aspirasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang dapat diterima. (Rustiadi dkk, 2009).

UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan pada tujuan akhir, bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagai mana yang dilihat oleh model formasi modal manusia sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan itu. Pembangunan dapat di konseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi dan pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Paling tidak menurut (Todaro, 2000 dalam Rustiadi dkk, 2009). Pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta kebebasan untuk memilih.

Todaro berpendapat bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakikatnya, pembangunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keberagaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya

untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material dan spiritual. (Rustiadi dkk, 2009)

Terjadinya perubahan baik secara *incremental* maupun paradigma menurut Anwar (2001), mengarahkan pembangunan wilayah kepada terjadinya pemerataan (*equity*) yang mendukung pertumbuhan ekonomi (*efficiency*) dan berkelanjutan (*Sustainability*). Konsep pembangunan yang memperhatikan ketiga aspek tersebut, dalam proses perkembangannya secara evolusi dengan berjalan melintas waktu yang ditentukan oleh perubahan tata nilai dalam masyarakat, seperti perubahan keadaan sosial, ekonomi, serta realitas politik. Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara/wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses dimana terdapat saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisa dengan seksama, sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan juga pada dasarnya dapat dianggap sebagai proses perubahan yang disusun secara sengaja dan terencana untuk mencapai situasi yang salah satu sendinya terdapat proses perencanaan. (Anwar, 2001 dalam Rustiadi dkk, 2009)

Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan

kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan bahwa kegiatan ekonomi tidak di distribusikan pada suatu ruang yang homogen sehingga kegiatan yang bertujuan ekonomi dan sosial merupakan kegiatan yang tersebar sesuai dengan potensi dan nilai relatif lokasi yang mendukungnya. (Cihe Aprilia Bintang dan Putu Gde Ariastitta, 2012)

2.3 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. (Todaro, 2000 dalam Handayani, 2006)

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditujukan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah atau regional. Tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ini juga ditentukan oleh lajunya pertumbuhan penduduk lebih dari PDRB, maka ini mengalami perubahan terhadap pendapatan perkapita, oleh sebab itu pertumbuhan PDRB tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena terdapat kemungkinan timbulnya keadaan tersebut maka pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi harus dibedakan (Sirojuzilam, 2008 dalam Handayani, 2006).

2.3.1 Pembangunan Ekonomi Menurut Islam

Fungsi manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Manusia adalah wakil Allah dimuka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumberdaya yang diamanahkan kepadanya. Hal ini terdapat dalam Q.S al-Baqarah : 30, Q.S al-An'am : 165, Q.S Faathir : 39, Q.S Shad :28, dan Q.S al-Hadid : 7

Adapun Q.S al-Baqarah : 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman :”Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Adapun Q.S al-An'am : 165 yang berbunyi

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Adapun Q.S Faathir : 39 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا
خَسَارًا

Artinya :

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah dimuka bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.

Adapaun Q.S shad : 28 yang berbunyi :

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

Artinya :

“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat ?”.

Adapun Q.S al-Hadid : 7 yang berbunyi :

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ
صَلِّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya :

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Adapun Q.S al hadid ayat 25 yang berbunyi :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa“

Adapun Q.S Al maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ءَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan“

2.4 Perkembangan yang tidak seimbang (*Unbalanced Debelopment*)

Teori mengenai perkembangan yang berimbang (*Balanced Development*) dipelopori oleh PN Rosenstein-Rodan (1943), Ragnar Nurkse (1953), Tibor Seitovsky (1954) dan WA Lewis. Teori mengenai perkembangan berimbang ini menyatakan bahwa aspek aspek dari perkembangan ekonomi tidak boleh terlalu jauh tertinggal satu sama lain. Dilihat dari sektor ekonomi, misalnya sektor pertanian tidak boleh tertinggal terlalu jauh oleh sektor industri. Fasilitas jasa seperti transportasi, tenaga penyediaan air dan sebagainya yang sering disebut sebagai (*Social overhead capital productivity activity*)

Teori ini sering juga disebut teori *Big Push* atau Dorongan Besar yang menyatakan bahwa agar perkembangan berhasil, dalam waktu yang hampir bersamaan harus ditumbuhkan sejumlah besar industri sehingga mereka dapat saling menunjang (Hirschman, 1968 dalam Nurzaman, 2012)

Menurut Hirschman (1968 dalam Nurzaman, 2012) perkembangan adalah proses perubahan dari satu tipe ekonomi menuju tipe ekonomi lain yang lebih baik. Apabila hal ini dilaksanakan dengan cara pengembangan berimbang, maka diperlukan banyak kemampuan, keahlian yang sangat besar.

Hirschman berpendapat bahwa wilayah tidak mungkin berkembang seimbang. Selalu terdapat wilayah-wilayah atau juga negara yang berkembang terlebih dahulu. Wilayah yang berkembang lebih dahulu. Misalnya wilayah yang maju diberi simbol U dan wilayah yang kurang berkembang diberi simbol S. antara U dan S selalu terjadi hubungan. Hubungan yang menguntungkan U diberi nama *polarization effect*. Hubungan yang menguntungkan S diberi nama *trickling down effect*, maka hasil akhir dari kedua efek tersebut akan menguntungkan S sehingga S dapat berkembang lebih pesat, sebaliknya apabila *polarization effect* yang lebih besar maka perkembangan S akan terhambat dan akan makin tertinggal oleh U.

2.5 Teori Ketidakseimbangan sebagai dasar konsep kutub pertumbuhan

Hampir bersamaan dengan munculnya pendapat Hirschman pada tahun 1958 dan Myrdal pada tahun 1957, pada tahun 1995 Perroux mengemukakan konsep *growth pole* (Kutub Pertumbuhan). Berbeda dengan Hirschman dan Myrdal yang memberi perhatian pada mekanisme perkembangan wilayah, Perroux menekankan teorinya pada interaksi antar industri. Dasar dari konsep kutub pertumbuhan ini adalah juga ketidakseimbangan (*unbalanced development*). Menurut Perroux, perkembangan tidak terjadi serentak dimana mana, biasanya diawali oleh sektor industri manufaktur yang dinamis, penggunaan teknologi modern, dan secara relatif berskala besar. Sektor ini biasa disebut sebagai *leading sector*, kemudian menumbuhkan atau menjalar ke sektor lainnya. Implikasi teori Perroux terhadap ruang dikembangkan oleh Boudeville, Boudeville menyatakan bahwa perkembangan *leading sector* ini mengakibatkan juga penjaran

perkembangan ke wilayah lain dalam bentuk kutub pertumbuhan dengan hirarki yang lebih rendah atau wilayah yang tertinggal.

Satu hal yang ditekankan oleh Boudeville adalah perlunya kompleks industri yang sangat besar, yang dicontohkan oleh peran kompleks industri Bari Toranto dalam perkembangan wilayah Itali Selatan yang kurang berkembang (Hansen, dalam Nurzaman, 2002)

Menurut Konsep Kutub Pertumbuhan, pertumbuhan dapat menjalar dari satu industri ke industri lainnya, disebabkan oleh adanya keterkaitan antar industri. Dalam hubungan keterkaitan antar industri ini, karena industri *propulsive* bekerja dengan skala yang lebih besar dan lebih efisiensi dari industri lainnya, maka industri *propulsive* yang *leading* ini dapat memberikan kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan industri lainnya. Dengan demikian, mungkin terjadi, industri *propulsive* menyedot sumber daya dari sektor lainnya di wilayah yang belum berkembang.

Dalam hal ini, efeknya sama dengan apa yang dikatakan Hirschman sebagai *polarization effect* atau yang dikatakan Myrdal sebagai *backwash effect*. jika ini terjadi, maka kesenjangan wilayah akan semakin besar (Hillhorst, 1990 dalam Nurzaman, 2002).

2.6 Disparitas Pembangunan Wilayah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesenjangan diartikan sebagai perbedaan, ketidaksinambungan, ketidaksimetrisan dan adanya jurang

pemisah. Kesenjangan di sini merupakan sinonim dari atau memiliki pengertian yang sama dengan kata ketimpangan, ketidakmerataan, dan disparitas.

Kemudian, yang dimaksud dengan kesenjangan pembangunan adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi berkaitan dengan proses pembangunan. (Dumairy, 1996 dalam Handayani, 2006) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah, yakni antara daerah pedesaan dan perkotaan, akan tetapi juga berupa ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional. Ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional dalam pembangunan dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek-aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan.

Sementara itu (Basri, 2002 dalam Handayani, 2006) menyatakan bahwa kesenjangan antar daerah (wilayah) adalah realita yang menggambarkan jarak ekonomis dan sumberdaya manusia (SDM) antar daerah di Indonesia akibat pembangunan yang terjadi puluhan tahun terakhir ini. Jarak ekonomis yang dimaksud di sini adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi, sementara jarak SDM berarti kesenjangan penduduk dalam hal kuantitas maupun kualitas.

Dalam berbagai literatur, dinyatakan bahwa kesenjangan merupakan gejala yang wajar dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Hal ini juga disampaikan oleh (Nurzaman, 1997 dalam Handayani, 2006), yaitu bahwa

kesenjangan yang dapat berupa kesenjangan antar golongan atau pelaku ekonomi, atau berupa kesenjangan wilayah ternyata merupakan hal yang sangat universal. Pada tingkat apapun, kesenjangan ini selalu ada. Pada skala dunia, semua mengetahui dan sadar bahwa terdapat kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, yang umumnya disebut sebagai kesenjangan utara-selatan.

Selain itu, Hirschman juga menyatakan bahwa dalam lingkup wilayah, sebenarnya kesenjangan atau ketimpangan adalah sesuatu yang wajar. Dimanapun di dunia ini, tidak ada semuanya yang serba sama. Sumber daya alam antara wilayah yang satu dengan yang lainnya tidak tersebar secara merata. Faktor lokasi juga tidak pernah sama antara satu wilayah dengan yang lainnya. Dengan demikian, adalah wajar apabila satu wilayah mempunyai kesempatan berkembang yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga terjadi kesenjangan.

2.6.1 Disparitas Sebagai bagian dari pengembangan wilayah

Teori perkembangan yang seimbang menganut paham bahwa perekonomian dapat berkembang apabila semua sektor berkembang secara serempak dan selaras. Pemuka-pemuka teori ini, seperti Rosenstein rodan, Lewis, Scitovsky serta Nurkse mengatakan bahwa agar suatu wilayah atau negara terbelakang dapat berkembang, maka seluruh sektor harus melangkah bersama, agar sektor tersebut dapat dengan mudah mendapatkan masukan (*input*) yang diperlukannya. Sebagai contoh, apabila suatu wilayah yang belum berkembang akan membangun industri manufaktur, maka sektor pertanian tidak boleh terlalu tertinggal jauh, agar dapat menyumbangkan bahan baku bagi industri tersebut.

Paham ini adalah paham perkembangan yang seimbang dilihat dari sudut persediaan (*Supply Side*) (Hirschman, 1968 dalam Nurzaman, 2002).

2.6.2 Disparitas Sebagai suatu Masalah

Paradigma pembangunan ekonomi yang terlalu berat menekankan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan pada masa-masa awal pembangunan ekonomi di Indonesia, diakui berbagai kalangan, ikut menyumbang pada ketimpangan mencolok dalam hal indikator sosial ekonomi, baik antara pusat dan daerah, antar daerah, maupun antar kelompok masyarakat (Samhadi, 2005 dalam Fitri, 2006). Sistem yang sentralistis pada masa tersebut menyebabkan pembangunan juga terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu dan tidak terdistribusi secara merata.

Kemudian, wilayah yang tertinggal merasa bahwa sumber-sumber yang dimilikinya tersedot oleh wilayah-wilayah yang lebih dulu berkembang. Kondisi tersebut akan menyebabkan kesenjangan menjadi friksi dalam suatu negara dan mengarah pada munculnya keresahan, ketidakpuasan, bahkan sampai upaya pemisahan diri akibat merasa diperlakukan tidak adil (Nurzaman, 1997 dalam Mayasari, 2015).

Berikut ini adalah berbagai masalah kesenjangan yang dapat terjadi dalam proses pembangunan wilayah :

a. Disparitas Ekonomi

Tambunan (2001) menjelaskan bahwa terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis *development gap* (ketimpangan pembangunan)

antar provinsi, antara lain distribusi PDRB menurut propinsi, konsumsi rumah tangga per kapita, *human development index*, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan, dan struktur fiskal. (Tambunan, 2001 dalam Handayani, 2006)

b. Disparitas Pengeluaran Konsumsi

Ketimpangan kemakmuran dapat diukur baik dengan pendekatan pendapatan maupun dengan pendekatan pengeluaran, yang dilihat dari pengeluaran untuk konsumsi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan sebagainya.

Perilaku dan pola pengeluaran konsumsi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan ketimpangan kemakmuran. Semakin sedikit persentase untuk konsumsi, berarti semakin banyak *saving* (Dumairy, 1996 dalam Handayani, 2006).

c. Disparitas Investasi

Ketimpangan investasi di Indonesia dapat terjadi secara sektoral, yaitu penumpukan sebagian besar modal di sektor industri pengolahan, dan secara regional, yaitu investasi menumpuk di kawasan tengah Indonesia. Ketimpangan penanaman modal ini harus segera diatasi dengan upaya penyebaran secara signifikan agar dapat mengimbangi pertumbuhan wilayah dengan membangkitkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dalam hal ini, penyediaan atau pengadaan sarana dan prasana yang memadai merupakan faktor kunci strategis (Dumairy, 1996 dalam Handayani, 2006).

d. Disparitas dan Kemiskinan

Ketidakmerataan sesungguhnya tak lepas dari masalah kemiskinan. Keduanya ibarat dua sisi pada sekeping mata uang. Oleh karenanya diskusi-diskusi mengenai pemerataan senantiasa terkait dengan pembahasan mengenai kemiskinan (Dumairy, 1996 dalam Handayani, 2006).

Upaya atau kebijakan memerangi kemiskinan merupakan suatu komitmen *universal* sebagai pencetus hak asasi manusia yang di dalamnya setiap warga negara memiliki hak untuk hidup yang layak. Kemiskinan dalam pembangunan wilayah merupakan tidak hanya ditinjau sebagai sasaran atau keluaran yang harus dihapus keberadaannya, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses analisis yang memandu pembangunan mencapai tujuannya. Perkembangan kerangka analisis kemiskinan saat ini lebih berfokus pada hal-hal yang spesifik, yang mengedepankan aspek sosiologis dan lingkungan. Dalam hal ini (World Bank dalam Handayani, 2006) mengidentifikasi lebih dari dua belas perubahan yang terangkum dalam prioritas dan indikator kemiskinan yang diharapkan menjadi panduan bagi upaya pemberantasan kemiskinan di negara berkembang. Yang populer adalah yang digambarkan dalam "Permata pembangunan" (*development diamond*), yang terdiri atas empat sudut, yaitu (1) Produk Nasional kotor (*Gross National Product*) per kapita, (2) Akses terhadap air bersih, (3) Umur harapan hidup (*Life expectancy*), dan yang terakhir adalah (4) Pendidikan dasar (*Gross primary enrollment ratio*).

Sedangkan dalam skala regional, kesenjangan dapat menimbulkan konflik antar wilayah, semakin meningkatnya arus urbanisasi serta pertumbuhan wilayah

yang pincang dengan munculnya *mega urban*. Wilayah Mega Urban (*Mega Urban Regional*) adalah fenomena “menyatunya” beberapa metropolitan yang membentuk wilayah perkotaan yang sangat besar melampaui batas administrasinya, yaitu penyatuan secara fisik (spasial) antara kota induk dengan kota kecil di sekitarnya, tanpa disertai penggabungan secara politik dan administrasi. Dominannya peran kota atau kota induk dalam suatu *mega urban* menyebabkan kota-kota kecil disekitarnya tidak mampu berkembang secara mandiri (*self sustain/self sufficient*). Seperti fenomena *mega urban* yang menjadi lingkup penelitian ini yaitu Wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan).

Kesenjangan wilayah juga dapat berimplikasi pada peningkatan penduduk miskin (Sumodiningrat, 1999 Dalam Mayasari, 2015). Secara hakiki, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan seseorang menyebabkan dirinya tidak dapat mengikuti tata nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Rustiadi dkk, 2009) Menanggapi hal tersebut, maka permasalahan kesenjangan wilayah ini merupakan isu pembangunan yang layak untuk mendapat perhatian.

2.6.3 Faktor Faktor Penyebab Ketimpangan

Dari berbagai penelitian mengenai ketimpangan ekonomi regional di Indonesia, (Tambunan 2001 dalam Handayani, 2006) menjelaskan bahwa secara umum, faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 
- a. Konsentrasi kegiatan ekonomi khususnya di pulau Jawa karena faktor ketersediaan infrastruktur dan aspek geografis. Dampaknya adalah terjadinya polarisasi tenaga kerja, modal dan kegiatan perdagangan yang berasal dari daerah lain, sehingga merugikan daerah-daerah tersebut karena kehilangan faktor produksi yang penting. Fenomena tersebut, oleh Arsyad (dalam Handayani, 2006) dijelaskan sebagai salah satu contoh konkret dari *backwash effects*.
- b. Alokasi Investasi yang tidak merata antara pulau Jawa dengan daerah lainnya akibat kebijakan dan birokrasi yang terpusat selama pemerintahan orde baru, dan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa. Padahal, menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar (dalam Handayani, 2006), terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi.
- c. Rendahnya mobilitas faktor produksi antar daerah, seperti tenaga kerja dan kapital.
- d. Perbedaan sumberdaya alam antar provinsi atau yang disebut juga dengan *factor endowments*. Namun, berdasarkan perkembangan teknologi mutakhir, lambat laun *factor endowments* tersebut akan menjadi tidak relevan sehubungan dengan penguasaan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia. Banyak pengalaman sukses dari negara-negara miskin sumberdaya alam seperti Singapura dan Jepang yang menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar sumberdaya alam jauh lebih penting dalam menentukan maju tidaknya pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

- e. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah yang mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sisi permintaan dan penawaran.
- f. Kurang lancarnya perdagangan antar propinsi (*intra-regional trade*).

Sedangkan menurut Rustiadi dkk, (2009) terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas antar wilayah. Faktor-faktor ini terkait dengan variabel variabel fisik dan sosial ekonomi wilayah. Faktor faktor utama ini antara lain adalah

- a. Geografi
- b. Sejarah
- c. Politik
- d. Kebijakan pemerintah
- e. Administrasi
- f. Sosial budaya
- g. Ekonomi

Pada suatu wilayah yang cukup luas akan terjadi variasi spasial kuantitas dan kualitas sumberdaya mineral, sumberdaya pertanian, topografi, iklim, curah hujan dan sebagainya. Apabila faktor-faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan berkembang lebih baik.

Tingkat perkembangan dari suatu masyarakat dalam suatu wilayah sangat tergantung pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Bentuk organisasi dan kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup

penting, terutama yang terkait dengan sistem insentif terhadap kapasitas kerja dan *entrepreneurship*. Sebagai contoh, sistem feodalistik atau sistem kolonial cenderung tidak memberikan iklim yang dapat memacu prestasi dan kerja keras, sedangkan pada sistem industri kapitalistik, dimana para pekerja merasa dieksploitasi dan di batasi dengan peraturan dan sistem yang ketat dapat menyebabkan kurangnya inisiatif dan kreatifitas terutama untuk menumbuhkan usaha-usaha kecil dan menengah, sebuah sistem yang memberikan kebebasan untuk bekerja dan berusaha akan mampu berkembang dengan lebih cepat (Rustiadi dkk, 2009).

Disparitas antar wilayah juga bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, salah satu contoh nyata adalah kebijakan pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia dan beberapa negara lainnya yang lebih menekankan pertumbuhan dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan telah menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang luar biasa. *Trickle down effect* yang diharapkan secara efektif tidak terjadi, namun dalam kenyataannya malah digantikan oleh *backwash effect* yaitu pengurasan sumberdaya secara berlebihan dari wilayah *hinterland*

Ketidakefisienan di bidang administrasi juga dapat menyebabkan terjadinya disparitas antar wilayah. Wilayah-wilayah yang ingin maju harus mempunyai administrator yang jujur, terpelajar, terlatih, dan sistem administrasi yang efisien. Wilayah-wilayah yang administasinya efisien akan mampu mengundang investasi, karena perijinannya tidak terlalu rumit. Sebaliknya daerah dengan kinerja administrasi buruk tidak diminati investor. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa para investor kurang terdorong untuk

menanamkan investasinya di daerah-daerah di Indonesia, yaitu karena perijinannya yang terlalu rumit dan berbelit-belit.

Masyarakat yang tertinggal pada umumnya memang tidak memiliki institusi dan perilaku yang kondusif bagi berkembangnya perekonomian. Mereka masih menganut kepercayaan primitif, kepercayaan tradisional dan nilai-nilai sosial yang cenderung konservatif dan menghambat (kontraproduktif) perkembangan ekonomi. Sebaliknya masyarakat yang relatif maju umumnya memiliki institusi dan perilaku yang kondusif untuk berkembang. Mereka percaya pada agama, tradisi, nilai-nilai sosial yang lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya intelektualisme, profesionalisme, moralitas (Rustiadi dkk, 2009).

Menurut Rustiadi dkk, (2009) faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya disparitas antar wilayah diantaranya dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi yang terkait dengan perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan
2. Faktor ekonomi yang terkait dengan akumulasi dari berbagai faktor, salah satu contohnya adalah lingkaran setan. Ada dua tipe lingkaran setan kemiskinan di wilayah-wilayah yang tertinggal. Pertama, sumberdaya yang terbatas dan ketertinggalan masyarakat menjadi sebab dan akibat dari kemiskinan. Kedua, kondisi masyarakat yang tertinggal, standar hidupnya rendah, efisiensi rendah, produktifitas

rendah, investasi rendah, pengangguran meningkat dan pada akhirnya masyarakat menjadi semakin tertinggal. Keseluruhan faktor itu saling berkaitan dan menyebabkan suatu wilayah/kawasan tetap dalam kondisi miskin dan tertinggal. Sebaliknya, di negara atau wilayah yang maju, masyarakatnya maju, standar hidup tinggi, efisiensi lebih baik, produktifitas semakin tinggi, pendapatan semakin tinggi, konsumsi semakin tinggi, tabungan semakin banyak, investasi pada akhirnya masyarakat akan menjadi lebih maju

3. Faktor ekonomi yang terkait dengan pasar bebas dan pengaruhnya pada *spread effect* dan *backwash effect*. Kekuatan pasar bebas telah mengakibatkan faktor-faktor ekonomi seperti tenaga kerja, modal, perusahaan dan aktifitas ekonomi seperti industri, perdagangan, perbankan dan asuransi yang dalam ekonomi maju memberikan hasil yang lebih besar, cenderung terkonsentrasi di wilayah berkembang. Perkembangan wilayah-wilayah ini ternyata terjadi karena penyerapan sumberdaya dari wilayah-wilayah sekitarnya. *Spread effect* yang diharapkan terjadi ternyata lebih lemah dibandingkan dengan *backwash effect*. Hal ini mengakibatkan wilayah atau kawasan yang beruntung akan semakin berkembang sedangkan wilayah yang kurang beruntung akan semakin tertinggal.
4. Faktor ekonomi terkait dengan distorsi pasar seperti immobilitas kebijakan harga, keterbatasan spesialisasi, keterbatasan keterampilan, tenaga kerja dan sebagainya.

2.7 Upaya Upaya mengatasi Masalah Disparitas Antar Wilayah

Menurut Rustiadi dkk, (2009) Untuk membangun keterkaitan antar wilayah dan mengurangi terjadinya disparitas antar wilayah, maka secara umum ada beberapa upaya yang dapat dilakukan secara simultan antara lain :

a. Mendorong pemerataan investasi

Investasi harus terjadi pada semua sektor dan semua wilayah secara simultan sehingga infrastruktur wilayah bisa berkembang.

b. Mendorong pemerataan permintaan (*demand*)

Setiap industri dan wilayah harus dikembangkan secara simultan sehingga bias menciptakan *demand* untuk tiap tiap produk.

c. Mendorong pemerataan tabungan

Tabungan sangat diperlukan untuk bisa memacu investasi. Apabila jumlah tabungan disuatu wilayah meningkat, maka potensi investasi juga akan meningkat.

Disparitas antar wilayah dapat ditanggulangi dengan beberapa tahapan reformasi ekonomi yang memperhatikan dimensi spasial, yaitu (Anwar dan Rustiadi, 1999 dalam Rustiadi dkk, 2009) :

Tahap pertama :

- a. Redistribusi aset (tanah, kapital, finansial, dan lain lain)
- b. Pengembangan lembaga dan pasar finansial di wilayah pedesaan
- c. Kebijakan insentif lapangan kerja yang membatasi migrasi penduduk dari desa ke kota
- d. Kebijaksanaan mempertahankan nilai tukar (*exchange rate policy*) yang mendorong ekspor pertanian menjadi selalu kompetitif
- e. Pengendalian sebagian (*partial controlled*) melalui kebijaksanaan perpajakan dan monitoring kepada lalu lintas devisa dan modal

Tahap Kedua :

- a. Pembangunan regional berbasis pada pemanfaatan sumberdaya wilayah/kawasan berdasarkan keunggulan komparatif masing masing wilayah.
- b. Kebijaksanaan (insentif fiskal) mendorong produksi dan distribusi lokasi kegiatan ekonomi kearah wilayah pedesaan
- c. Investasi dalam *human capital* dan *social capital* serta teknologi berbasis pedesaan yang lebih kuat dengan membangun *trust fund* di daerah daerah untuk dapat membiayai pembangunan dua kapital di atas
- d. Industrialisasi berbasis di wilayah pedesaan/pertanian (melalui pembangunan sistem mikropolitan atau agropolitan) seperti :
 - a. Industri pengolahan makanan dan pakan
 - b. Industri pengolahan pertanian lain
 - c. Industri peralatan dan input input pertanian serta barang konsumsi lain

Secara berangsur-angsur, hal ini akan mengurangi disparitas antar wilayah/kawasan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih menyeluruh.

2.8 Pengaruh Kebijakan pembangunan terhadap kesenjangan wilayah

Sejak tahun 1980, yaitu diterapkannya kebijakan pembangunan dengan penekanan pada sektor industri, kesenjangan wilayah di Indonesia makin membesar. Apabila hal ini dikaitkan dengan teori ketidakseimbangan, atau konsep pusat pertumbuhan, maka kesenjangan ini diperkirakan akan tetap membesar apabila tidak ada kebijakan lain yang bersifat koreksi terhadap akibat dari penerapan konsep pusat pertumbuhan. Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini bagi Indonesia menambah lagi kesenjangan karena keadaan struktur industri yang berkembang di pusat pertumbuhan industri *mega urban*, yang berupa subkontrak. Kaitan antara industri ini dengan ekonomi setempat hanyalah dalam pemakaian buruh, yang memang lebih murah dari pada di negara maju, industri-industri ini tidaklah dapat diharapkan akan meneteskan perkembangan kewilayah atau sektor lainnya. Bahkan yang terjadi adalah industri ini menyedot tenaga kerja dari wilayah lain yang justru menyebabkan perkembangan wilayah *mega urban* semakin tinggi.

Kesenjangan yang semakin besar ini, baik antar sektor, antar pelaku ekonomi, maupun antar wilayah, ternyata telah membawa dampak, berbagai

keresahan akibat dari kesenjangan muncul, memaksa pemerintah meninjau kembali kebijaksanaannya.

Beberapa kebijaksanaan untuk mengurangi kesenjangan ini antara lain :

- a. Aspek Pemerataan, mulai dicantumkan dalam Repelita III dalam bentuk trilogi pembangunan (Soegijoko, 1998 dalam Nurzaman, 2002)
- b. Untuk memacu pertumbuhan wilayah, sejak pertengahan tahun 1976 an, diperkenalkan berbagai Inpres seperti Inpres Dati I, Inpres Dati II serta Inpres Desa tertinggal IDT yang mulai diinstruksikan pada tahun 1993 (Hill, 1998 dalam Nurzaman, 2002)
- c. Adanya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1995 mengenai desa percontohan yang dilaksanakan di satu kabupaten untuk tiap propinsi (Hill, 1995 dalam Nurzaman, 2002)
- d. Terakhir adalah penetapan Kawasan Indonesia Timur (KTI) sebagai wilayah yang dinyatakan tertinggal dan mendapat perhatian khusus dalam pengembangan. Hal ini dinyatakan dalam pembentukan Kapet (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) pada tahun 1996 di 13 wilayah di propinsi-propinsi di Indonesia timur (Hill, 1998 dalam Nurzaman, 2002).

Semua usaha tersebut tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, banyak diantaranya yang konsepnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah sebaik yang diharapkan. (Nurzaman, 2002).

2.9 Urgensi Pembangunan Antar Wilayah

Menurut Rustiadi dkk, (2009) Disparitas regional merupakan fenomena universal. Di semua Negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya, disparitas pembangunan merupakan masalah pembangunan antar-wilayah yang tidak merata. Pada banyak Negara, pembagian ekonomi yang tidak merata telah melahirkan masalah masalah sosial politik. Hamper di semua Negara, baik pada sistem perekonomian pasar maupun perekonomian terencana secara terpusat, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah.

Dalam skala nasional, proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan masalah pembangunan yang cukup besar dan kompleks. Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung mengabaikan terjadinya kesenjangan kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar, investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah wilayah hinterland mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan. Secara makro dapat kita lihat terjadinya disparitas pembangunan yang signifikan, misalnya antara desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara Wilayah Jawa dan luar Jawa.

Disparitas ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin di capai sebagai bangsa. Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah/kawasan disatu sisi terjadi dalam bentuk buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi. Disisi lain,

potensi konflik menjadi sedemikian besar karena wilayah-wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak haknya. Ketidakseimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antar wilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah/kawasan *hinterland* menjadi lemah karena pengurasan sumberdaya yang berlebihan (*backwash*), yang mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi nilai tambah tertuju ke pusat-pusat pembangunan secara massif dan berlebihan sehingga terjadi akumulasi nilai tambah di kawasan-kawasan pusat pertumbuhan. Selanjutnya, kemiskinan di wilayah belakang/pedesaan akhirnya mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga kota dan pusat pusat pertumbuhan pada akhirnya akan melemah dan tidak efisien karena timbulnya berbagai penyakit “urbanisasi” yang luar biasa.

Fenomena “urbanisasi” yang memperlemah perkembangan kota, dapat dilihat pada perkembangan kota-kota besar di Indonesia mengalami *over-urbanization* yang dicirikan dengan berbagai bentuk ketidakefisienan dan permasalahan seperti munculnya kawasan kumuh (*slum area*), tingginya tingkat polusi, terjadinya kemacetan, kriminalitas. Perkembangan perkotaan pada akhirnya menjadi sarat dengan permasalahan permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi semakin kompleks dan sulit untuk diatasi.

Ketidakseimbangan *inter-regional*, disamping menyebabkan kapasitas pembangunan regional yang sub optimal, pada gilirannya juga menihilkan potensi potensi pertumbuhan pembangunan agregat (makro) dari adanya interaksi

pembangunan inter-regional yang sinergis (saling memperkuat). Menyadari terjadinya ketidakseimbangan pembangunan *inter-regional*, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan wilayah/kawasan. Pada awalnya, strategi program pengembangan lebih didasarkan atas strategi dari sisi pasokan (*supply-side strategy*) yakni berupa program pengembangan kawasan yang didasarkan atas keunggulan komparatif (*comparative advantage*) berupa upaya peningkatan produktifitas kawasan.

Strategi pembangunan yang hanya dilakukan dari sisi pendekatan pasokan (*supply*) seringkali terhambat oleh adanya keterbatasan sisi permintaan (*demand trap*) baik secara domestik maupun dari luar wilayah/kawasan. Untuk itu dalam perkembangan berikutnya, strategi pembangunan kawasan juga harus dikembangkan atas dasar strategi pengembangan sisi permintaan (*demand side strategy*). Strategi ini dikembangkan melalui upaya mendorong tumbuhnya permintaan akan barang dan jasa secara domestik melalui peningkatan kesejahteraan (peningkatan tingkat pendapatan, pendidikan, sosial budaya) masyarakat. Walaupun demikian, kecenderungan pengembangan program kawasan yang dilaksanakan di Indonesia, sejauh ini didominasi oleh strategi pengembangan dari sisi pasokan (*supply*) tanpa pengembangan strategi sisi permintaan yang cukup memadai.

Selain sisi pasokan dan permintaan, strategi pengembangan kawasan harus didasarkan atas prinsip strategi sinergi keterkaitan (*linkage*) antar kawasan. Strategi berbasis keterkaitan antar kawasan pada awalnya dapat diwujudkan

dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar kawasan melalui pembangunan berbagai infrastruktur fisik (jaringan transportasi jalan, pelabuhan, jaringan komunikasi dan lain lain) yang dapat menciptakan keterkaitan fisik antar kawasan, keterkaitan fisik harus disertai dengan kebijakan kebijakan yang menciptakan struktur insentif yang mendorong keterkaitan yang sinergis antar kawasan. Pengembangan keterkaitan yang salah (tidak tepat sasaran) dapat mendorong aliran *backwash* yang lebih masif, yang pada akhirnya justru memperburuk kesenjangan dan ketidakseimbangan pembangunan *inter-regional*. Oleh karena itu, keterkaitan *inter-regional* yang di harapkan adalah bentuk bentuk keterkaitan yang sinergis atau saling memperkuat bukan saling memperlemah atau eksploitatif.

Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah sejak tahun 2000 (Penerapan UU 22/1999) yang direvisi dengan UU 32/2004 dipandang sebagai bahan dari upaya mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan antar wilayah (*inter-regional*), termasuk ketidakseimbangan kewenangan antar pusat dan daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat memotong proses *backwash* yang telah menyebabkan terjadinya keterkaitan keterkaitan *inter-regional* yang bersifat eksploitatif, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Namun dalam jangka pendek, pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintahan daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya, dapat menumbuhkan akses-akses pembangunan dalam berbagai bentuk ego regional berupa keengganan melakukan berbagai bentuk kerjasama *inter-regional*, terutama yang di

koordinasikan oleh pemerintah pusat dan propinsi. Dengan demikian, program program pengembangan kawasan yang ditujukan untuk mendorong keseimbangan pembangunan antar wilayah/ kawasan menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa sebelumnya.

2.10 Disparitas sebagai salah satu kasus di Negara berkembang

Disparitas pembangunan regional cukup semarak di negara-negara berkembang. Tendensi konsentrasi perkampungan dan aktifitas di sekitar lokasi dan daerah tertentu, dapat diambil contoh dari negara seperti Korea, Taiwan dan Brazil. Disparitas yang diobservasi di negara-negara ini dipaparkan sebagai berikut :

2.10.1 Disparitas pendapatan dan Infrastruktur Sosial Regional

Secara umum disparitas regional di negara-negara yang kurang maju jauh lebih lebar dari pada yang terjadi di negara negara maju (Williamson, 1965 dalam Rustiadi dkk, 2009). Studi yang lebih baru di 18 negara berkembang telah membenarkan hipotesis diatas (Gilbert and Goodman, 1976 dalam Rustiadi dkk, 2009). Di negara berkembang, lokasi dan daerah tertentu yang diinginkan telah menarik investasi, angkatan kerja dan para pengusaha secara terus menerus, proses polarisasi tidak dapat menunjukkan suatu tanda pembalikan (UNCRD, 1976; Unikel, 1976; Gugler and Flanagan, 1976 dalam Rustiadi dkk, 2009)

Polarisasi aktifitas dan perkampungan berkesinambungan ini dinyatakan pada dua fakta, pertama, faktor distribusi infrastruktur sosial ekonomi warisan lama, dan kedua, kebijakan sektoral temporer.

Infrastruktur sosial ekonomi yang diwarisi sebagian besar negara negara berkembang, secara spasial menceng dan dirancang untuk tunduk kepada kepentingan eko-politik colonial. Akhirnya, selama awal periode pasca perang, hal yang sama mempunyai peran penting di dalam membentuk perkembangan aktifitas industri dan pola pola perkampungan (Morse, 1975; Cross, 1979 dalam Rustiadi dkk, 2009)

Kebijakan kebijakan yang memandang kedalam (*in ward looking*) yang diikuti oleh negara negara berkembang ini menonjolkan polarisasi di lokasi lokasi yang menjadi tempang yang disenangi. Gabungan produk dan teknologi di negara negara ini mengalami transformasi yang cepat dan memberikan kenaikan kenaikan terhadap aktifitas industri yang lebih menguntungkan untuk dijalankan di atau sekitar pusat pusat pertumbuhan metropolitan.

Kecenderungan pertumbuhan semacam itu menghasikan pembentukan kompleks kompleks perkotaan yang terkonsentrasi dengan fasilitas infrastruktur sosial ekonomi yang lebih baik dalam hubungannya dengan wilayah wilayah lain. Jaringan angkutan di lokasi lokasi ini, lebih lanjut mendukung proses konsentrasi. Dengan demikian, tidak ada perusahaan lokal atau asing yang menginginkan untuk mendapatkan keuntungan lokasi (*location rent*) sebagaimana disediakan oleh kompleks kompleks perkotaan akan memilih lokasi yang sangat jauh dari

komplek-komplek semacam itu. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan sektoral yang memprioritaskan pengembangan sektor ekonomi yang secara pragmatis dapat tumbuh lebih cepat dan dapat menghasilkan pertumbuhan ekspor yang lebih cepat (Gilbert and Gugler, 1987 dalam Rustiadi dkk, 2009).

2.11 Pembangunan Berimbang sebagai Isu Global

Ide pembangunan berimbang berawal dari ide Stalin yang menginginkan berkembangnya setiap negara yang ada di bawah kesatuan Soviet Rusia, agar memiliki ketahanan yang cukup dalam menghadapi serangan dari negara-negara musuh. Di Inggris, ide pentingnya penyebaran industri dan pembangunan ke daerah-daerah yang tertinggal menjadi kuat sejak negara tersebut mengalami pemboman oleh Jerman dimasa Perang Dunia ke II. Demikian halnya berbagai negara industri maju di dunia meningkatkan perhatian akan pentingnya pembangunan berimbang setelah masa tersebut. Namun sebenarnya masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah/daerah lebih relevan dan lebih akut terjadi di negara-negara yang sedang berkembang.

Salah satu dari *trend* kebijakan yang kuat pada negara-negara ekonomi pasar yang maju dan negara-negara dengan sistem ekonomi yang terencana secara terpusat adalah dengan melakukan program-program redistribusi spasial pemukiman dan aktifitas-aktifitas. *Trend* ini dapat didirikan secara umum oleh dua penekanan utama yaitu menahan pertumbuhan berlebihan kota-kota besar (diantaranya menekan urbanisasi berlebihan) dan pembangunan wilayah-wilayah yang tertinggal atau miskin. Kebijakan yang beragam di implementasikan, mulai

dari kebijakan penyebaran industri hingga menentukan pusat pusat pertumbuhan dan kota kota baru.

Pada negara negara yang menganut sistem ekonomi pasar yang maju, kebijakan kebijakan tersebut ditujukan untuk membatasi pertumbuhan kota kota yang sangat besar dan pengendalian letak kota, telah diintensifkan terutama untuk pertumbuhan lokasi lokasi yang diinginkan secara langsung untuk aktifitas ekonomi desentralisasi di dalam ruang ekonomi. Negara negara ini telah menggunakan berbagai ukuran termasuk pelanggaran hukum dan disinsentif finansial untuk investasi modal di kota kota besar seperti kasus di Denmark, Jerman dan Inggris serta dukungan finansial dan insentif yang lain yang ditujukan pada promosi pembangunan daerah daerah yang kurang maju dan pusat pusat yang diinginkan. Beberapa negara yaitu Prancis dan Belanda telah mengadopsi strategi strategi untuk mendapatkan distribusi spasial yang optimal dari permukiman dan aktifitas.

Negara negara maju sengaja membentuk strategi strategi untuk memulai pembangunan wilayah wilayah tertinggal, Inggris telah menerapkan instrument seperti subsidi, keringanan pajak dan sistem pengendalian kesempatan kerja untuk diarahkan menuju wilayah wilayah yang tertahan potensinya. Italia telah menggunakan menggunakan pendekatan komprehensif untuk pembangunan Mezzogiorno, dimana dengan insentif memicu pertumbuhan ekonomi yang didahului dan didorong oleh perindustrian dan penyediaan infrastruktur sosial maupun fisik dan di versifikasi ekonomi. Finlandia telah menekankan kebijakan

untuk mendorong pembangunan wilayah utaranya yang mengalami penderitaan eksodus pedesaan ke daerah perkotaan di bagian selatan selama tahun 1960-an. Dengan memberikan subsidi pada berbagai wilayah di utara, Finlandia telah berusaha untuk membangun wilayah tersebut secara ekonomis dan membuat kondisi untuk pembangunan demografis nasional yang berimbang.

Keberimbangan antar kawasan menjadi penting karena keterkaitan yang bersifat simetris akan mampu mengurangi disparitas antar wilayah, dan pada akhirnya mampu memperkuat pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh, seperti halnya bagian tubuh manusia, ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah akan mengakibatkan suatu kondisi yang tidak stabil. Disparitas antar wilayah telah menimbulkan banyak permasalahan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu dibutuhkan kebijakan/program yang mampu mengatasi permasalahan disparitas antar wilayah/kawasan, dan perencanaan yang mampu mewujudkan pembangunan wilayah yang berimbang. Dalam perspektif paradigma keterkaitan antar wilayah, kemiskinan disuatu tempat akan sangat berbahaya bagi wilayah lainnya, oleh karenanya kesejahteraan disuatu tempat harus didistribusikan secara berkeadilan keseluruh wilayah. Setiap pemerintah, baik di negara yang sedang berkembang (*developing countries*) maupun belum berkembang (*less developed countries*) selalu berusaha untuk meningkatkan keterkaitan yang simetris antar wilayah dan mengurangi disparitas karena beberapa alasan (Murry, 2000 dalam Rustiadi dkk, 2009) antara lain :

- a. Untuk mengembangkan perekonomian secara simultan dan bertahap

Jika setiap wilayah atau kawasan bias tumbuh dan berkembang, maka mereka akan membentuk hubungan mutualisme yang saling menguntungkan. Pendapatan yang rendah di daerah *hinterland* (*backward area*), akan menghambat pertumbuhan permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah yang lebih maju. Lebih jauh lagi, pembangunan wilayah yang berimbang akan mampu menghindari *bottleneck* dalam *transport/inter regional trade* dan *supply* serta diharapkan bahwa harga harga (*term of trade*) antar komoditas barang/jasa menjadi lebih berimbang baik secara agregat makro nasional maupun antar kawasan.

b. Untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat

Jika kecepatan setiap pekerja dalam satu grup setara, maka grup tersebut akan memberikan output lebih cepat. demikian pula apabila kemajuan ekonomi negara ditopang oleh pertumbuhan semua wilayah atau kawasan secara simultan sesuai dengan potensinya masing masing maka pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan lebih cepat.

c. Untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas dan mengkonservasi sumberdaya

Struktur distribusi nilai tambah yang berkeadilan antar institusi pemilik/lokasi sumberdaya dapat memberikan insentif bagi setiap institusi/lokasi untuk mengkonservasi dan mengembangkan kapasitas sumberdaya secara optimal. Ketika suatu wilayah memanfaatkan sumberdayanya secara lebih optimal, maka sumberdaya tersebut akan

mengakibatkan wilayah atau kawasan tersebut menjadi berkembang. Keterkaitan ini akan mengurangi terjadinya pengurasan sumberdaya oleh wilayah lain (umumnya wilayah yang lebih maju), karena risiko dan manfaat penggunaannya sangat dirasakan oleh wilayah yang memiliki sumberdaya itu sendiri.

d. Untuk meningkatkan lapangan kerja

Berkembangnya infrastruktur dan penyebaran industri di daerah *hinterland* (*backward region*) akan meningkatkan lapangan kerja yang lebih luas di semua wilayah atau kawasan

e. Untuk mengurangi beban sektor pertanian

Produktifitas per kapita sektor pertanian di Indonesia sangat rendah karena terlalu banyak penduduk yang bekerja di sektor ini. Dengan pembangunan wilayah atau kawasan yang berimbang, sektor sektor non pertanian yang relevan juga akan berkembang di daerah *hinterland*, dan mampu menyerap limpahan tenaga kerja di sektor pertanian.

f. Untuk mendorong desentralisasi

Disparitas antar wilayah akan mendorong terjadinya sentralisasi wilayah berkembang mempunyai kapasitas untuk menarik investasi industri dan institusi institusi perekonomian baru sedangkan wilayah wilayah yang tertinggal tidak mempunyai kapasitas tersebut. Akhirnya, permasalahan sentralisasi akan semakin berkembang. Sentralisasi di bidang ekonomi

sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah, tetapi kondisi ini secara nyata telah mengakibatkan berbagai masalah lebih pelik seperti lokalisasi, urbanisasi, dan kompleksitas konflik yang jauh melebihi kapasitas pengendaliannya (*diseconomic of centralization scale*) dan sebagainya.

Lokalisasi dan urbanisasi yang tak terkendali pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah seperti kepadatan, kemacetan, kebisingan, polusi masalah pemukiman dan sebagainya, sebagai akibatnya biaya hidup menjadi semakin tinggi, sehingga mengakibatkan timbulnya kemiskinan perkotaan, penelantaran sumberdaya dan berbagai bentuk ekonomi biaya tinggi lainnya.

g. Untuk menghindari konflik lepas kendali dan instabilitas politik disintegratif

Disparitas tak berkeadilan antar wilayah dari segi pendapatan dan kesejahteraan merupakan ancaman terbesar yang dapat meruntuhkan solidaritas masyarakat sebagai satu kesatuan komunitas atau bangsa. Suatu wilayah akan cenderung melepaskan diri apabila terlalu kaya dan tidak memiliki kesadaran riil yang memadai bahwa kekayaan tersebut terbangun dari satu kesatuan sistem keseluruhan. Sebaliknya suatu wilayah juga akan cenderung melepaskan diri apabila terlalu miskin dan merasa tidak mendapat manfaat ekonomi yang signifikan dari struktur keterkaitan yang ada. Demikian halnya dalam suatu wilayah administrasi yang lebih rendah, keinginan untuk membentuk wilayah otonomi yang baru (kabupaten/kota

baru), hamper selalu beranjak dari adanya rasa ketidakadilan format sistem pembangunan dan bukannya masalah optimalisasi sumberdaya.

h. Untuk meningkatkan ketahanan Nasional

Apabila semua wilayah mampu tumbuh dan berkembang yang berbasis pada struktur keterkaitan antar wilayah yang kokoh dan saling memperkuat, maka serangan dan iming iming musuh pada wilayah wilayah tertentu tidak akan mampu memecahbelah serta melumpuhkan perekonomian dan kesatuan bangsa.

2.12 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan Regional

Pendapatan Regional tercermin dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Secara keseluruhan, PDRB memiliki kesamaan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) bedanya PDB dalam bentuk lingkup nasional dan PDRB dalam lingkup yang lebih kecil (wilayah)

Terdapat dua tipe perhitungan PDRB yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam perhitungan terakhir, digunakan harga tahun 2000. Pendapatan regional

atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi dengan perkembangan inflasi dikenal dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan. (Muta'ali, 2015)

2.12.1 Manfaat PDRB

PDRB merupakan data dasar analisis perekonomian wilayah sehingga memiliki manfaat yang sangat banyak dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Beberapa manfaatnya antara lain sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan perkapita, kemakmuran, kenaikan dan penurunan daya beli masyarakat, tingkat inflasi dan deflasi, menggambarkan struktur perekonomian dan potensi ekonomi daerah serta hubungan antar sektor. Data PDRB tidak hanya menggambarkan kondisi perekonomian yang terjadi, tetapi juga menggambarkan perekonomian dimasa lalu dan kemungkinan kemungkinan prediksi perubahan dimasa yang akan datang. (Muta'ali, 2015).

2.13 Analisis Kesenjangan Wilayah

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kesenjangan wilayah ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, ketimpangan regional bisa dilihat dari berbagai aspek, untuk lebih memperjelas kesenjangan atau pemerataan dalam hal apa. Hal ini menjadi penting dalam upaya untuk melihat berbagai aspek pemerataan yang akan dijadikan dasar kebijakan pemerataan, karena pemerataan dalam satu aspek ekonomi saja, misalnya pendapatan, belum tentu menjamin pemerataan dalam aspek lain, misalnya pemerataan kesejahteraan sosial.

2.13.1 Analisis Ekonomi

Analisis kesenjangan wilayah dalam aspek ekonomi ini menggunakan konsep output regional yang menggunakan pendekatan wilayah (*area approach*). Output regional tersebut direpresentasikan oleh indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Dalam hal ini, PDRB menunjukkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) selama satu tahun. Kemudian, PDRB per kapita merupakan hasil pembagian nilai PDRB dengan jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, semakin tinggi nilai PDRB per kapita berarti semakin tinggi kekayaan daerah (*region prosperity*) di daerah tersebut, dengan kata lain nilai PDRB per kapita dianggap merefleksikan tingkat kekayaan daerah (Tadjoeddin dkk, 2001 dalam Handayani, 2006).

Selain itu, analisis kesenjangan juga dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi per tahun yang direpresentasikan dengan pertumbuhan PDRB di masing-masing kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi ini penting untuk menilai peningkatan produktivitas masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah (Tambunan, 2001 dalam Handayani, 2006).

Indikator lainnya adalah faktor konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah yang antara lain dapat dilihat dari tidak meratanya pembagian kegiatan industri manufaktur. Dibanding sektor-sektor ekonomi lainnya, industri manufaktur

merupakan sektor ekonomi yang secara potensial sangat produktif dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan PDRB. Sektor industri manufaktur yang berkembang baik di suatu wilayah secara alamiah akan memberi efek positif terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor-sektor lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sektor industri (Tambunan, 2001 dalam Handayani, 2006).

indikator ekonomi yang terakhir adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu presentase jumlah penduduk (angkatan kerja) yang sudah bekerja terhadap jumlah total angkatan kerja di suatu wilayah. Indikator ini penting untuk menilai seberapa besar tingkat penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah, karena tenaga kerja memiliki peran utama sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan penggerak roda perekonomian wilayah.

2.14 Penelitian Terdahulu

Penelitian-Penelitian terdahulu terkait analisa kesenjangan wilayah yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti disebagian wilayah di Indonesia. Beberapa peneliti tersebut adalah sebagai berikut :

Nurhayani, Siti Hodyah dan Adi Bhakti (2015). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya dengan Investasi di Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pembangunan ekonomi dan hubungannya dengan investasi di Provinsi Jambi tahun 2002 – 2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data runtut waktu (*Time Series*) dari tahun 2002 – 2014. Tahap Analisis yang pertama menggunakan

analisis *indeks Williamson* kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis uji korelasi pearson.

Dari hasil analisis *indeks Williamson*, maka diketahui Provinsi Jambi pemerataan pembangunan berada antara 0,341 – 0,566. Angka ini beffluktuasi setiap tahun, angka ini menandakan bahwa ketimpangan di Provinsi Jambi tergolong menengah terlihat dari rata rata nilai korelasi personnya 04,66.

Nur Aidar, Ramadhan Syaputra (2015). Analisis Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series*. Tahap analisis yang digunakan cuma menggunakan teknik analisis *indeks Entrophy Theil*.

Berdasarkan *indeks Entrophy Theil* rata rata tertinggi terjadi pada wilayah timur utara Aceh yaitu sebesar 1.66 diikuti wilayah tengah Aceh sebesar 1,37 dan terkecil pada wilayah barat-selatan Aceh yaitu sebesar 1.25.

Saratri Wilonoyudho (2009) Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. Penelitian ini bertujuan mengungkap makna dari suatu fenomena kesenjangan pembangunan kewilayahan dengan berbagai sebab dan akibatnya, menggunakan data berupa angka angka, data atau informasi yang berkaitan hasil survei BPS atau instansi terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *content analysis model* digunakan untuk menganalisis substansi berbagai dokumen peraturan dan

berbagai peraturan kebijakan pembangunan lainnya. Dan tahap analisis yang kedua menggunakan *interactive analysis model*, analisis ini bertujuan untuk memperpadukan data dan analisis dari teknik analisis pertama dan dipadukan dengan model analisis interaktif.

Tiur Roida Simbolon (2009) Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan ketimpangan pembangunan antar daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatera dengan adanya perbedaan masing masing potensi wilayah yang berdampak kepada pembangunan masing masing daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Indeks Williamson* digunakan untuk menganalisis kesenjangan wilayah antar provinsi yang berada di Wilayah Sumatera.

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metodologi Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian
1	Nurhayani, Siti Hodyah dan Adi Bhakti	2015	Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya dengan Investasi di Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	a. <i>Indeks Williamson</i> b. Uji Korelasi <i>Person</i>	Dari hasil analisis <i>indeks Williamson</i> , maka diketahui Provinsi Jambi pemerataan pembangunan berada antara 0,341 – 0,566. Angka angka ini beffluktuasi setiap tahun, angka ini menandakan bahwa ketimpangan di Provinsi Jambi tergolong menengah terlihat dari rata rata nilai korelasi personnya 04,66.
2	Nur Aidar, Ramadhan Syaputra	2015	Analisis Disparitas Pendapatan Regional Provinsi Aceh	Provinsi Aceh	<i>Indeks Entrophy Theil</i>	Berdasarkan <i>indeks Entrophy Theil</i> rata rata tertinggi terjadi pada wilayah timur utara Aceh yaitu sebesar 1.66 diikuti wilayah tengah Aceh sebesar 1,37 dan terkecil pada wilayah barat-selatan Aceh yaitu sebesar 1.25.
3	Saratri Wilonoyudho	2009	Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan	Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur	a. <i>Content Analysis Model</i> b. <i>Interactive Analysis Model</i>	Penelitian ini menggunakan teknik analisis <i>content analysis model</i> digunakan untuk menganalisis substansi berbagai dokumen peraturan dan berbagai peraturan kebijakan pembangunan lainnya. Dan tahap analisis yang kedua menggunakan <i>interactive analysis model</i> , analisis ini bertujuan untuk memperpadukan data dan analisis dari teknik analisis pertama dan dipadukan dengan model analisis interaktif.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metodologi Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian
4	Tiur Roida	2009	Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan antar Daerah Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera	sumatera	<i>Indeks Williamson</i>	Dengan menggunakan <i>indeks williamson</i> sebagai metode dalam penelitian ini maka diperoleh Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Riau mempunyai angka indeks yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan propinsi lainnya. Sementara untuk wilayah propinsi lainnya angka ketimpangan pembangunan relatif merata
5	Astari Khairunnisa, Paidi Hidayat,SE, M.Si	2011	Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi antar Kecamatan di Kota Medan	Kota Medan	a. <i>Indeks Williamson</i> b. <i>Typology Klassen</i>	Hasil analisis <i>indeks wiliamson</i> menunjukkan bahwa terdapat tujuh kecamatan dengan nilai IW yang menurun dan 14 kecamatan dengan nilai IW yang meningkat. Untuk nilai IW antar kecamatan, nilai IW tergolong rendah dengan rata-rata indeks sebesar 0.16994.
6	Irene Rumagit	2013	Disparitas Pembangunan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	<i>Indeks Williamson</i>	Mengetahui disparitas pembangunan ekonomi tertingi pada tahun 2012 yang di latar belakang oleh perbedaan pendapatan dan perbedaan potensi kekayaan alam masing masing kabupaten/kota. Pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi Kota Manado yang diatas rata rata jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metodologi Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian
7	Muhammad Ahadismal, Muslim Salam, I made Benyamin	2012	Disparitas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Indeks Williamson</i> b. <i>Indeks Entropy Theil</i> 	Aktifitas perekonomian di hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih dominan bergerak di sektor pertanian, Sedangkan ada beberapa kabupaten yang tidak bergerak pada sektor pertanian sehingga dengan beragam nya sumberdaya alam menyebabkan adanya disparitas antar wilayah
8	Bakri, Syafrizal, Hasdi Aimon	2014	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya.	Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Uji Multikolinearitas</i> b. <i>Uji Heterokedastitas</i> c. <i>Uji Autokorelasi</i> d. <i>Uji Estimasi Model Regresi Berganda</i> 	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Invetasi mempengaruhi ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara signifikan dan positif. Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat
9	Daryono Subagyo	2000	Disparitas Pembangunan dan faktor faktor yang mempengaruhinya (Studi kasus di daerah sumbagsel)	Sumatera bagian selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Indeks Williamson</i> b. <i>Regresi Linear Beganda</i> 	Ketimpangan yang terjadi relatif rendah yang dikuatkan dengan nilai indeks williamson yang selalu mendekati nilai nol. Faktor tingkat pengeluaran pemerintah, tingkat pertumbuhan dan sektor pajak ternyata relatif sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat pembangunan di Sumbagsel.

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metodologi Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian
10	Suyatno	2013	Analisis Disparitas Perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)	Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur	a. <i>Indeks Williamson</i> b. Analisis Regresi <i>Ordinary Least Square</i>	Disparitas perekonomian di wilayah jawa perioder tahun 1996-2011 cukup kecil yaitu, rata rata di jawa barat (0,096), jawa tengah (0,214) jawa timur (0.086) dan mendekati dengan angka 0.
11	Lukaz Lach and Henryk Gurgul	2012	<i>The Impact of Regional Disparities on Economic Growth</i>	Polandia	a. <i>Sigma Convergence</i> b. <i>Beta Convergence</i>	<i>The results suggest that as a consequence of rapid economic growth, some regions in Poland seized new opportunities, while less developed regions were unable to keep up with the challenging requirements of a decade of fast economic growth</i>
12	Rama Nurhuda, M.R Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo	2012	Analisis Ketimpangan Pembangunan	Provinsi Jawa Timur (2005-2011)	a. <i>Indeks Williamson</i> b. <i>hipotesis Kuznet</i> c. <i>regresi berganda</i>	Disparitas pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur menunjukkan nilai ketimpangan yang cukup rendah dikarenakan <i>indeks willuamson</i> mendekati 0, selain itu hipotesis <i>kuznet</i> juga berlaku di provinsi ini, dari 4 variabel PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan

Sumber : Hasil Identifikasi Penulis, 2018

2.15 Sintesa Teori

Tabel 2.2 Sintesa Teori

No	Sasaran Penelitian	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan	Variabel dan Indikator
1	Menganalisis laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah masing masing kabupaten/kota Pekansikawan	Pengertian Wilayah	UU No 26 Tahun 2007	Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau fungsional.	Pertumbuhan Ekonomi : PDRB (atas harga Konstan)
		Klasifikasi Wilayah	Nurzaman, 2012 dalam Putra, 2015	Berdasarkan kriteria dan perkembangannya wilayah dapat dibagi menjadi tiga yaitu wilayah formal, wilayah fungsional dan wilayah perencanaan a. Suatu wilayah formal adalah wilayah yang berbentuk berdasarkan pada kriteria homogenitas. b. Suatu Wilayah fungsional adalah wilayah yang diidentifikasi berdasarkan kepada kriteria tertentu serta memperlihatkan suatu hubungan fungsional atau interpedensi antara bagian bagiannya. c. Wilayah formal dan wilayah fungsional dapat menjadi kerangka menentukan klsifikasi ketiga dari wilayah yaitu wilayah perencanaan.	

No	Sasaran Penelitian	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan	Variabel dan Indikator
		Tumbuh Kembang Wilayah	Rustidi dkk, 2009 dan Nurzaman , 2012	1. Teori Neo-Keynes merupakan teori yang berinduk pada teori Keynes yaitu bahwa kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan pertumbuhan 2. Terdapat teori neoklasik I yang membahas mengenai teori harga dan pasar dan teori neoklasik II yang membahas harga dan pasar serta persaingan monopolistik dan pasar yang tidak sempurna. Sedangkan teori neoklasi yang membahas pertumbuhan dan perkembangan sektor pada tahun 1950-an disebut teori neoklasik modern	
2	Menganalisis tingkat disparitas ekonomi wilayah masing masing kabupaten di wilayah Pekansikawan	Pembangunan Wilayah	Todaro, dalam Handayani , 2006	Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multi dimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi : PDRB per Kapita, Jumlah Penduduk,
		Kesenjangan Pembangunan Wilayah	Basri, 2002;100 dalam Handayani , 2006	Kesenjangan antar daerah (wilayah) adalah realita yang menggambarkan jarak ekonomis dan sumberdaya manusia (SDM) antar daerah di Indonesia akibat pembangunan yang terjadi puluhan tahun terakhir ini.	

No	Sasaran Penelitian	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan	Variabel dan Indikator
		Kesenjangan Sebagai Suatu Masalah	Nurzaman, 1997 dalam Mayasari, 2015	wilayah yang tertinggal merasa bahwa sumber-sumber yang dimilikinya tersedot oleh wilayah-wilayah yang lebih dulu berkembang. Kondisi tersebut akan menyebabkan kesenjangan menjadi friksi dalam suatu egera dan mengarah pada munculnya keresahan, ketidakpuasan, bahkan sampai upaya pemisahan diri akibat merasa diperlakukan tidak adil.	
3	Menganalisis Pola Kesenjangan Ekonomi Wilayah Pekansikawan	FaktorFaktor Penyebab Ketimpangan	Tambunan, 2001 dalam Handayani, 2006	secara umum, faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Konsentrasi kegiatan ekonomi khususnya di pulau Jawa karena faktor ketersediaan infrastruktur dan aspek geografis. b. Alokasi investasi yang tidak merata antara pulau Jawa dengan daerah lainnya akibat kebijakan dan birokrasi yang terpusat selama pemerintahan orde baru, dan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa. c. Rendahnya mobilitas faktor produksi antar daerah, seperti tenaga kerja dan kapital. d. Perbedaan sumberdaya alam antar provinsi atau yang disebut juga dengan <i>factor endowments</i> .	Kemajuan Ekonomi : PDRB per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja

No	Sasaran Penelitian	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan	Variabel dan Indikator
				<p>e. Perbedaan kondisi demografis antarwilayah yang mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sisi permintaan dan penawaran.</p> <p>f. Kurang lancarnya perdagangan antar propinsi (<i>intra-regional trade</i>).</p>	

Sumber : Hasil Identifikasi Penulis, 2018



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Rasionalisme yang bersumber pada teori dan kebenaran empirik dan etik (Muhadjir, 1990). Tahapan pertama dalam persiapan penelitian ini adalah merumuskan konsep teoritik sebagai *grand theory* yang berkaitan dengan konsep kesenjangan ekonomi wilayah beserta variabel variabelnya, serta teori tentang konsep pengembangan wilayah dalam angka mewujudkan pemerataan pembangunan

Kemudian objek penelitian tetap dilihat dalam konteks yang mencakup dalam konstruksi teoritik, karena pada dasarnya topik berkaitan dengan pembangunan wilayah memang tidak berdiri sendiri karena adanya keterkaitan antara faktor faktor di dalamnya.

Terakhir adalah tahap generalisasi hasil yaitu menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan didukung dengan landasan teori yang digunakan dengan kenyataan empirik yang muncul dari hasil analisa.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan model penelitian studi kasus (*case study*). Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya (Cresswel, 2004 dalam Mayasari, 2015). Tujuan Penelitian deskriptif adalah untuk membuat

deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala (Travers, 1978 dalam Mayasari, 2015).

Sevilla (dalam Mayasari, 2015) membagi penelitian deskriptif secara lebih khusus menjadi beberapa model penelitian, yaitu studi kasus, survei, penelitian pengembangan, penelitian lanjutan, analisis dokumen, analisis kecenderungan dan penelitian korelasi. Model penelitian yang digunakan disini adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap kesenjangan wilayah dengan studi kasus wilayah Pekansikawan.

3.3 Lokasi Penelitian

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Wilayah *mega urban* Pekansikawan yang terdiri dari 4 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Keempat kabupaten/kota tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.

3.4 Bahan dan Alat Penelitian

Dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini digunakan beberapa bahan dan alat penelitian yang merupakan langkah awal dari kegiatan penelitian ini, diantaranya :

- a. Buku-buku, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian sebagai literatur penelitian

- b. Alat tulis (pena) digunakan untuk mencatat dan menulis data
- c. Penunjuk Waktu, digunakan untuk mengetahui waktu pengambilan data
- d. Laptop dan Printer untuk mengolah dan mencetak data.
- e. *Software* SPSS, untuk mengolah data
- f. *Software* Arc GIS digunakan untuk menyajikan data kedalam bentuk peta

3.5 Variabel Penelitian

Variabel variabel yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan variabel-variabel kesenjangan wilayah berdasarkan aspek ekonomi saja

a. Variabel 1 : Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kajian pustaka yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya untuk sasaran 1 ditarik suatu variabel yaitu pertumbuhan ekonomi. Pada Variabel pertumbuhan ekonomi ini, peneliti menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan di wilayah Pekansikawan dan data PDRB bias di didapatkan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

b. Variabel 2 : Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan sasaran 2 variabel yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kajian pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya dan pada sasaran 2 ini peneliti menggunakan variabel yang sama seperti variabel yang digunakan pada sasaran satu akan tetapi dengan indikator yang berbeda yaitu pada analisis *indek williamson*, indikator yang digunakan yaitu PDRB perkapita dan jumlah penduduk

pada masing masing Wilayah Pekansikawan serta PDRB perkapita dan jumlah penduduk provinsi.

c. Variabel 3 : Kemajuan Ekonomi

Pada variabel 3 ini peneliti menarik suatu variabel berdasarkan kajian pustaka pada bab sebelumnya yaitu kemajuan ekonomi untuk analisis Tipologi Klassen, menggunakan dua indikator yaitu menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas harga berlaku dan kontribusi sektor ekonomi pada masing masing kabupaten/kota di Wilayah Pekansikawan. Pada analisis tipologi Klassen akan dibantu menggunakan *software* SPSS dan *Software* pemetaan Arc Gis dalam membantu menyajikan data yang telah dianalisis dan kemudian dilanjutkan dengan analisis deskriptif.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survei data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini bersumber dari dokumen perencanaan wilayah, BPS Provinsi Riau, BAPPEDA Provinsi Riau dan sumber-sumber lainnya. Hal ini perlu di perhatikan dalam pengumpulan data sekunder ini adalah keakuratan data dan validitas data.

3.7 Teknik Analisis

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. analisis Kuantitatif digunakan dalam menghitung besarnya laju pertumbuhan ekonomi, disparitas ekonomi wilayah serta pola

disparitas ekonomi wilayah. Sementara teknik kualitatif digunakan dalam menginterpretasikan hasil pengukuran dan mengenali pola disparitas ekonomi yang terjadi.

3.7.1 Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi untuk penduduknya (Todaro dan smith, 2004 dalam Muta'ali, 2015)

Menentukan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu digunakan rumus :

$$\underline{LPEt = [(PDRBt-PDRBt-1) / (PDRBt-1)] \times 100 \%}$$

Keterangan :

LPEt : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun t

PDRBt : PDRB riil pada tahun t (Harga Konstan)

PDRBt-1 : PDRB riil pada tahun t-1 (Harga Konstan)

3.7.2 Menganalisis Kesenjangan Ekonomi Wilayah

3.7.2.1 Indeks Williamson

Indeks ketimpangan Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar daerah, misalnya antar wilayah dalam suatu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi maupun antar provinsi dalam negara. *Indeks Williamson* pada dasarnya melihat perbandingan antara PDRB perkapita suatu wilayah dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tersebut. Indeks ini dikemukakan oleh Williamson (1963) yang meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi antar negara maju dan negara berkembang.

Rumus Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$cv_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$$

Keterangan :

- IW = Nilai indeks Williamson
- Y_i = PDRB per Kapita Kabupaten/Kota i
- \bar{Y} = PDRB per Kapita rata rata Provinsi
- f_i = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota i
- n = Jumlah Penduduk Provinsi

Nilai indeks kesenjangan Williamson antar daerah adalah $0 < IW < 1$ artinya bila *Indeks Williamson* semakin besar maka semakin tinggi kesenjangan

antar wilayah dan apabila nilai yang diperoleh mendekati nol maka indikasi terjadinya ketimpangan regional kecil atau semakin mengecil. (Muta'ali, 2015)

3.7.3 Menganalisa Pola Kesenjangan Wilayah

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi dan pola dari masing masing daerah berdasarkan tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan suatu daerah. Model Tipology Klassen ini dikenalkan pertama kali oleh Leo Klassen.

Analisis Tipologi Klassen ini dapat digunakan untuk mengetahui suatu gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Tipologi Klassen ini juga dapat dikembangkan untuk menilai potensi ekonomi perekonomian dan produktifitas sektoral, yaitu dengan membandingkan produksi (PDRB Sektoral) terhadap jumlah penduduk di sektor tersebut dengan pertumbuhan sektoral. Analisis ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan masing masing sektor ekonomi. Hasil dari analisis ini dipergunakan untuk mengklasifikasikan laju pertumbuhan sektor ekonomi berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu sektor yang cepat maju dan tumbuh cepat, sektor yang berkembang dengan cepat, sektor yang maju tapi tertekan dan sektor yang relatif tertinggal. (Muta'ali, 2015)

Formulasi Tipologi Klassen perkembangan ekonomi wilayah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh (<i>high growth and high income</i>)	Wilayah berkembang cepat (<i>high growth but low income</i>)
$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan (<i>low growth but high income</i>)	Wilayah relatif tertinggal (<i>low growth and low income</i>)

Sumber : Syafriza, 1997 dalam muta'ali, 2015

Keterangan :

r_i = Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota i

r = Laju pertumbuhan PDRB Provinsi

Y_i = PDRB per Kapita Kabupaten/Kota i

Y = PDRB per Kapita Provinsi

Sedangkan formulasi Tipologi Klassen untuk potensi sektor ekonomi wilayah dapat atau pun klasifikasi sektor kabupaten-kabupaten dalam provinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tipologi Klassen Untuk Klasifikasi Produktifitas Sektor Ekonomi

Kontribusi (y) \ Pertumbuhan (r)	Kontribusi sektor I di kabupaten lebih besar dari kontribusi Propinsi (yik > yi)	Kontribusi sektor I di kabupaten lebih kecil dari kontribusi propinsi (yik < yi)
Laju pertumbuhan sektor i kabupaten lebih besar dari laju pertumbuhan propinsi (rik < ri)	Sektor maju dan tumbuh cepat	Sektor berkembang cepat
Laju pertumbuhan sektor I kabupaten lebih kecil dari laju pertumbuhan propinsi (rik < ri)	Sektor maju tertekan	Sektor relatif tertinggal

Sumber : Muta'ali, 2015

Keterangan :

r_{ik} = Laju pertumbuhan sektor (i) di kabupaten (k)

r_i = Laju pertumbuhan sektor (i) di tingkat propinsi

y_{ik} = Kontribusi sektor (i) terhadap nilai produksi total PDRB kabupaten

y_i = Kontribusi sektor (i) terhadap nilai produksi total PDRB propinsi

Laju pertumbuhan sektor maupun laju pertumbuhan sektor pada tingkat propinsi serta kontribusi sektor kabupaten dan kontribusi sektor provinsi dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$r_{ik} = \frac{P_{ikt} - P_{iko}}{P_{iko}} \times 100\%$$

$$r_i = \frac{P_{it} - P_{io}}{P_{io}} \times 100\%$$

$$y_{ik} = P_{ik} / P_{tk} \times 100\%$$

$$y_i = P_i / P_t \times 100\%$$

Keterangan :

P_{ikt} = Nilai produksi sektor i tingkat kabupaten tahun t

P_{iko} = Nilai produksi sektor I tingkat kabupaten pada awal tahun

P_{it} = Nilai produksi sektor i tingkat propinsi pada tahun t

P_{io} = Nilai produksi sektor I tingkat propinsi

P_{ik} = Total nilai produksi sektor i tingkat kabupaten

P_{tk} = Total nilai produksi PDRB tingkat kabupaten

P_i = Total nilai produksi sektor i tingkat propinsi

P_t = Total nilai produksi PDRB tingkat propinsi

Menurut Tipologi Klassen untuk klasifikasi produktifitas sektor ekonomi, sektor perekonomian wilayah dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu :

a. Sektor maju dan cepat tumbuh

Merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral dan kontribusi sektor yang lebih tinggi dibanding rata rata kabupaten

b. Sektor maju tapi tertekan

Merupakan sektor yang memiliki kontribusi sektor lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi sektoralnya lebih rendah dibanding rata rata kabupaten

c. Sektor berkembang cepat

Merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral tinggi, tetapi kontribusi sektor lebih rendah dibanding rata rata kabupaten

d. Sektor relatif tertinggal

Merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral tinggi dan kontribusi sektor yang lebih rendah dibanding rata rata kabupaten

3.8 Matrix Tahapan Analisa

Tabel 3.2 Matrix Tahapan Penelitian

Sasaran	Variabel dan Indikator	Alat Analisa	Output
Menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah masing masing kabupaten/kota Wilayah Pekansikawan	Pertumbuhan Ekonomi 1. PDRB (atas dasar harga konstan)	Analisis laju pertumbuhan Ekonomi	Diketuainya tingkat pertumbuhan ekonomi pada masing masing kabupaten/kota di Wilayah Pekansikawan
Menganalisa tingkat disparitas ekonomi Wilayah Pekansikawan	Pertumbuhn Ekonomi 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB	<i>Indeks Williamson</i>	Diketuainya tingkat Kesenjangan Ekonomi Wilayah
Menganalisa pola disparitas Wilayah Pekansikawan	Kemajuan Ekonomi 1. Laju pertumbuhan 2. Kontribusi sektor	1. Analisis Tipologi Klassen 2. Deskriptif	Diketuainya pola kesenjangan ekonomi Wilayah Pekansikawan

Sumber : Hasil Identifikasi Penulis, 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1. Gambaran Umum Provinsi Riau

4.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Provinsi Riau memiliki luas 109.826,59 km² atau setara dengan 10.982.659 hektar, dimana 88.871.62 km² merupakan wilayah daratan sedangkan sekitar 20.954,96 km² merupakan wilayah lautan/perairan. Secara geografis wilayah ini terletak pada posisi 01°05'00" LS - 02°25'00" LU atau antara 100°00'00" BT - 105°05'00" BT. Secara administratif Provinsi Riau terdiri atas 10 kabupaten dan 2 kota. Berikut adalah Tabel 4.1 Pembagian Daerah Provinsi Riau Secara lebih rinci.

Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas (Ha)
1	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	724.850,94
2	Kampar	Bangkinang	1.095.506,49
3	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	527.872,48
4	Indragiri Hulu	Rengat	763.044,93
5	Indragiri Hilir	Tembilahan	1.791.377,21
6	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.392.494,29
7	Siak	Siak Sri Indrapura	828,479,06
8	Bengkalis	Bengkalis	1.510.534,06
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-API	1.428.988,28
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	644.356,51

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Letak Provinsi Riau yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand serta berada pada jalur perekonomian Selat Malaka dan lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera sehingga menjadi peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, informasi, dan modal. Selain itu juga berpotensi sebagai keuntungan lokasi untuk pusat kegiatan dan sebagai lokasi transit pergerakan orang dan barang baik secara domestik maupun secara internasional. Adapun batas wilayah Provinsi Riau, meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara



PETA ADMINISTRASI PROVINSI RIAU



4.1.2 Topografi

Secara umum, Provinsi Riau memiliki kondisi topografi dataran rendah dan sedikit bergelombang dengan rata-rata ketinggian 10 meter dpl. Kemiringan lahan 0-2% seluas 1.157.006 Ha, kemiringan 15-40% seluas 737.966 Ha, dan kemiringan lebih besar dari 40% seluas 550.928 Ha. Adapun wilayah dataran rencana berada di posisi bagian pantai timur Sumatera, yang merupakan muara dari empat sungai yang ada di Riau. Ketinggian lahan Provinsi Riau yang diukur dari beberapa titik kota berkisar antara 2-91 mdpl.

4.1.3 Geologi

Kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuartar dengan sisipan batuan sedimen tersier di bagian barat dan selatan. Struktur geologi memiliki lipatan yang pada umumnya berada di wilayah daratan sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat di sekitar barisan hingga bagian tengah dan selatan. Sebagian tanah daratan daerah Riau terjadi dari formasi *alluvium* (endapan), dan beberapa tempat terdapat selingan *neogen* seperti sepanjang sungai Kampar. Pada Provinsi Riau terdapat empat jenis utama yaitu jenis tanah *histosol*, *inceptisol*, *oxisols* dan *ultisols*. Jenis-jenis tanah ini terbentuk dari tiga kelas jenis tanah yaitu organik, semi organik, dan non organik.

4.1.4 Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, Provinsi Riau mempunyai tipe iklim Af, sedangkan menurut Schmidt dan Ferguson tipe iklim berkisar antara

A- B – C, daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah. Provinsi Riau dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu wilayah dengan curah hujan sedang dan rendah. Kondisi hari hujan dan curah hujan menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau cukup bervariasi. Selama periode 2009 – 2013, jumlah hari hujan berkisar antara 36 – 230 hari hujan / tahun dengan jumlah curah hujan berkisar antara 635 – 4.080 milimeter pertahun. Sementara itu keadaan suhu Provinsi Riau yang diukur dari Kota Pekanbaru selama periode 2009 – 2013 dengan rata-rata sebesar 28,1°C.

4.1.5 Kondisi Kependudukan dan Perekonomian

a) Kondisi Kependudukan

Berdasarkan kependudukan hasil sensus penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Riau Tahun 2016 yaitu 6.500.671 jiwa. Distribusi penduduk menurut kabupaten/kota di Propinsi Riau masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota propinsi dengan jumlah penduduk 1.064.566 jiwa atau sekitar 16,34 % dari seluruh penduduk Propinsi Riau. Kabupaten/kota lainnya mempunyai penduduk yang cukup tinggi selain Kota Pekanbaru adalah Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir dan Rokan Hilir. Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 182.152 jiwa berikut tabel jumlah penduduk di Provinsi Riau

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kuantan Singingi	302.631	306.718	310.619	314.276	317.935
2	Indragiri Hulu	383.814	392.354	400.901	409.431	417.733
3	Indragiri Hilir	676.419	685.530	694.614	703.734	713.034
4	Pelalawan	339.869	358.210	377.221	396.990	417.498
5	Siak	404.093	416.298	428.499	440.841	453.052
6	Kampar	733.506	753.376	773.171	793.005	812.702
7	Rokan Hulu	523.024	545.483	568.576	592.278	616.466
8	Bengkalis	519.389	527.918	536.138	543.987	551.683
9	Rokan Hilir	592.403	609.779	627.233	644.680	662.242
10	Kepulauan Meranti	177.587	178.839	179.894	181.095	182.152
11	Pekanbaru	958.352	984.674	1.011.467	1.038.118	1.064.566
12	Dumai	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908
	Total	5.879.109	6.033.268	6.188.442	6.344.402	6.500.971

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau jika dihitung dari Tahun 2011 hingga Tahun 2016 yaitu sebesar 2.44 % pertahunnya. Sementara kepadatan penduduk di wilayah Propinsi Riau ini relatif berkepadatan rendah, kecuali di Kota Pekanbaru yang memiliki densitas kepadatan yang cukup tinggi.

b) Kondisi Perekonomian

Dalam mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat pada suatu daerah khususnya di Propinsi Riau maka salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kemakmuran tersebut yaitu regional (Produk Domestik Regional Bruto). Terdapat 17 sektor utama yang menjadi tolak ukur perhitungan PDRB. PDRB Propinsi Riau adalah :

Tabel 4.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas Tahun 2011 – 2016 Provinsi Riau

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	97.910.954,92	102.216.742,85	108.498.089,31	108.969.037,31	113.301.969,54
2	Pertambangan dan Penggalian	28.095.875,74	29.255.443,37	30.853.807,07	28.721.253,62	27.596.475,07
3	Industri Pengolahan	98.069.858,02	105.367.966,51	111.656.636,03	116.264.214,10	122.061.751,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	193.986,65	199.837,47	218.628,00	239.829,79	272.247,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	60.171,11	60.558,43	61.197,88	62.674,66	62.395,16
6	Konstruksi	29.079.864,66	29.849.808,50	32.374.800,93	34.442.582,69	36.137.430,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34.840.617,85	36.789.162,70	38.245.888,68	38.816.690,84	40.709.270,47
8	Transportasi dan Pergudangan	3.105.941,93	3.316.025,45	3.581.029,03	3.773.618,29	3.889.186,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.752.598,73	1.856.454,65	1.985.851,15	2.023.318,32	2.087.363,84
10	Informasi dan Komunikasi	2.947.576,21	3.269.245,87	3.453.612,01	3.700.665,06	3.883.710,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.667.608,82	4.028.079,32	4.226.738,09	4.241.598,05	4.481.269,64
12	Real Estate	3.309.557,19	3.528.851,60	3.716.645,98	4.026.522,95	4.087.725,56

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	17.744,97	19.331,32	21.812,83	23.486,51	24.106,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.532.398,87	7.762.820,86	7.881.527,65	8.227.912,82	8.202.929,29
15	Jasa Pendidikan	1.849.882,50	1.926.725,14	2.040.423,48	2.170.080,88	2.184.906,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	634.372,15	688.346,91	746.157,94	820.327,73	824.914,65
17	Jasa lainnya	1.511.250,28	1.651.797,68	1.835.742,28	2.021.824,61	2.150.276,93
Jumlah		314.580.260,60	331.787.198,63	351.398.588,34	358.545.638,23	371.957.930,19

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Selama Periode 2011-2016, semua sektor dalam perekonomian mengalami peningkatan yang positif. Adapun sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Propinsi Riau adalah sektor pertambangan dan penggalian kemudian sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Pada Tahun 2015, perekonomian Riau mengalami pertumbuhan sebesar 0,22 %.



Tabel 4.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Non Migas) Tahun 2012 - 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106.538.791,44	115.444.554,97	133.550.006,55	145.605.481,63	158.443.506,08
2	Pertambangan dan Penggalian	29.575.020,32	31.756.908,77	37.956.510,06	41.961.920,28	43.370.367,04
3	Industri Pengolahan	106.769.461,50	114.066.777,77	129.805.569,42	142.788.145,41	154.643.654,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	182.186,86	180.354,15	230.368,59	310.742,57	396.111,50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	63.383,70	62.198,06	65.787,38	72.056,29	75.556,21
6	Konstruksi	34.843.609,97	38.268.199,73	45.437.971,41	51.673.301,30	56.999.522,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37.354.926,80	40.288.998,80	52.868.664,90	57.952.650,74	63.956.777,47
8	Transportasi dan Pergudangan	3.311.206,32	3.760.843,72	4.457.955,79	5.185.483,19	5.640.182,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.991.789,04	2.356.064,51	3.163.305,49	3.342.151,12	3.609.923,32
10	Informasi dan Komunikasi	2.990.134,12	3.148.729,43	3.539.376,77	4.077.407,96	4.356.845,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.253.648,67	4.925.502,08	5.430.498,10	5.674.547,50	6.154.444,37
12	Real Estate	3.694.452,47	4.057.173,27	4.658.529,35	5.404.854,33	5.790.843,46

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	205.992,00	23.423,28	28.439,42	32.290,91	34.512,85
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.282.739,30	8.777.008,16	9.246.790,59	10.076.887,08	10.392.336,57
15	Jasa Pendidikan	2.121.224,82	2.272.825,23	2.760.174,84	3.267.286,76	3.459.149,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	705.874,09	787.618,65	955.160,39	1.176.038,88	1.233.449,23
17	Jasa lainnya	1.651.727,58	1.870.646,39	2.308.276,94	2.824.029,81	3.159.784,33
Jumlah		344.350.769,00	372.046.816,87	436.463.385,97	481.425.175,76	521.716.966,90

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Perekonomian tanpa migas Propinsi Riau pada Tahun 2016 di dominasi oleh tiga sektor yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Pada dasarnya struktur perekonomian sebagian besar masyarakat Riau telah bergeser dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan ke kategori ekonomi lainnya. Sumbangan terbesar pada Tahun 2016 dihasilkan oleh sektor industri.

4.1.1.6. Potensi Ekonomi Wilayah

a) Pertanian Tanaman Pangan

Sub sektor tanaman pangan yang ada di Propinsi Riau terdiri dari tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Adapun tanaman pangan ini meliputi luas panen dan produk tanaman bahan makanan, sayur sayuran, dan buah buahan. Selama Periode 2015 luas panen tanaman padi mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,4 persen yaitu dari 106.037 hektar menjadi 107.546 hektar. Panen padi sawah terluas terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, sementara panen padi ladang terluas terdapat di Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 4.5. Luas Panen Tanaman Pangan di Provinsi Riau (Ha)

No	Kabupaten/Kota	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Kacang Kedelai	Kacang Hijau
1	Kuantan Singingi	11.175	10	195	351	78	153	8	28
2	Indragiri Hulu	2.495	1.679	1.012	280	148	1.245	178	26
3	Indragiri Hilir	28.553	449	2.190	149	16	501	28	44
4	Pelalawan	4.764	36	6.221	147	43	121	0	1
5	Siak	5.554	0	220	339	92	346	29	2
6	Kampar	7.038	2.775	1.162	668	226	1.497	270	87
7	Rokan Hulu	4.263	13.378	564	346	297	1.049	599	376
8	Bengkalis	6.014	1.358	178	408	49	368	5	6
9	Rokan Hilir	12.481	0	446	230	41	519	1.018	25
10	Kepulauan Meranti	3.568	0	57	202	1	237	0	0
11	Pekanbaru	6	0	173	345	24	492	5	0
12	Dumai	307	1.643	7	113	21	34	5	3
Jumlah		86.218	21.328	12.425	3.578	1.036	6.562	2.145	598

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Tabel 4.6. Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Riau(Ton)

No	Kabupaten/Kota	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Kacang Kedelai	Kacang Hijau
1	Kuantan Singingi	50.125	20	465	10.434	78	153	8	28
2	Indragiri Hulu	9.236	3.585	2.711	7.456	148	1.245	178	26
3	Indragiri Hilir	111.315	949	5.210	4.100	16	501	28	44
4	Pelalawan	17.955	81	15.874	3.993	43	121	0	1
5	Siak	30.306	0	526	9.580	92	346	29	2
6	Kampar	23.277	5.758	2.773	17.017	226	1.497	270	87
7	Rokan Hulu	18.715	31.077	1.345	9.743	297	1.049	599	376
8	Bengkalis	23.031	3.648	399	13.492	49	368	5	6
9	Rokan Hilir	50.056	0	1.013	6.231	41	519	1.018	25
10	Kepulauan Meranti	10.115	0	132	5.239	1	237	0	0
11	Pekanbaru	1.294	3.358	16	3.640	21	34	5	3
12	Dumai	16	0	406	12.674	24	492	5	0
Jumlah		345.441	48.476	30.870	103.599	1.036	6.562	2.145	598

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

b) Perkebunan

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah Propinsi Riau adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan pinang. Perkembangan areal perkebunan kelapa sawit meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2016, luas lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Propinsi Riau yaitu, 2.425.138 Ha. Pada areal tersebut Tahun 2016 produksi kelapa sawit di Riau mencapai 7,8 juta ton. Perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau tersebar di semua kabupaten/kota dengan areal terluas dan produksi tertinggi terdapat di daerah Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan dan Kampar

Tabel 4.7. Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis dan Tanaman (Ha)

No	Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Pinang	Enau	Lada	Gambir	Kakao	Sagu
1	Kuantan Singingi	144.315	2.759	130.165	13	200	11	5	0	2.471	0
2	Indragiri Hulu	61.372	1.828	118.969	348	383	0	0	0	638	0
3	Indragiri Hilir	5.364	440.696	227.806	1.213	16.737	0	0	0	1.889	17.964
4	Pelalawan	30.009	16.789	306.977	1.289	106	0	0	0	706	779
5	Siak	15.647	1.548	260.381	112	213	0	0	0	59	8.614
6	Kampar	99.322	1.718	445.008	14	109	0	0	4.816	319	0
7	Rokan Hulu	56.800	1.134	422.985	180	119	12	0	30	195	0
8	Bengkalis	33.441	6.368	181.835	112	989	0	0	0	0	2.891
9	Rokan Hilir	24.595	5.182	282.289	19	113	0	0	0	269	0
10	Kepulauan Meranti	20.481	31.453	0	1.215	3.994	0	0	0	0	50.514
11	Pekanbaru	3.085	15	10.929	0	0	0	0	0	13	0
12	Dumai	2.448	1.586	37.795	1	113	0	0	0	22	0
Jumlah		496.879	511.076	2.425.139	4.516	23.076	23	5	4.846	6.581	80.762

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

c) Peternakan dan Perikanan

Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan ternak. Populasi ternak pada tahun 2016 di Propinsi Riau terdiri atas : sapi 231.860 ekor, kerbau 33.855 ekor, sapi perah 132 ekor, kambing 180.671 ekor, domba 9.225 ekor, dan babi 47.543 ekor. Adapun untuk beberapa produksi yaitu daging sapi sebesar 47.575.101 kg dan produksi telur sebanyak 2.396.109 kg

Tabel 4.8 Jumlah Ternak Menurut Jenisnya

No	Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Sapi Perah	Kambing	Domba	Babi
1	Kuantan Singingi	23.503	10.231	0	18.051	42	0
2	Indragiri Hulu	41.388	2.924	0	29.087	2.914	796
3	Indragiri Hilir	7.378	42	0	22.046	1.163	0
4	Pelalawan	10.322	1.151	40	7.628	225	827
5	Siak	22.133	480	0	20.312	1.299	2.440
6	Kampar	35.691	15.466	69	15.924	356	1.231
7	Rokan Hulu	44.016	2.475	0	13.930	1.483	7.740
8	Bengkalis	13.203	525	0	16.504	424	3.779
9	Rokan Hilir	20.524	69	0	12.361	743	7.655
10	Kepulauan Meranti	3.491	36	0	12.524	0	1.075
11	Pekanbaru	5.173	405	0	6.309	124	18.427
12	Dumai	5.038	51	23	5.995	452	3.573
Jumlah		231.860	33.855	132	180.671	9.225	47.543

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Produksi perikanan di Propinsi Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut. Pada Tahun 2016 sejumlah 219.406,21 ton adalah total produksi ikan,

sebanyak 102.100,9 ton merupakan hasil perikanan laut, sedangkan 117.305,31 ton hasil dari perairan umum, tambak, kolam keramba, dan jaring apung. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa kabupaten/kota sebagai penghasil ikan terbanyak berada pada Rokan Hilir 68.161,19 ton, Kabupaten Kampar 59.550,93 ton, dan Kabupaten Indragiri Hilir 44.128,8 ton. Nilai produksi perikanan pada Tahun 2016 tercatat 4.396.235.839 ribu rupiah lebih atau mengalami penurunan dari Tahun 2015 sebesar 4.453.363.493 ribu rupiah

Tabel 4.9. Produksi Perikanan menurut jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016 (Ton)

No	Kabupaten/Kota	Perikanan Laut	Perairan Umum	Tambak	Kolam
1	Kuantan Singingi	0	353,1	0,0	3.678,5
2	Indragiri Hulu	0	1.362,1	0,0	3.809,5
3	Indragiri Hilir	39.022,5	3.774,0	722,2	558,0
4	Pelalawan	3.847,0	1.564,2	0,4	6.466,3
5	Siak	618,0	621,0	0,0	1.268,0
6	Kampar	0	2.536,6	0,0	31.038,8
7	Rokan Hulu	0	1.920,0	0,0	5.676,0
8	Bengkalis	2312,1	409,4	20,0	122,8
9	Rokan Hilir	53.421,9	13.724,3	0,0	880,8
10	Kepulauan Meranti	2.345,8	0,0	6,7	77,2
11	Pekanbaru	0	1.141,9	0,0	6.818,4
12	Dumai	533,6	0,0	8,9	209,5
Jumlah		102.100,9	27.406,6	758,2	60.603,8
Tahun 2015		105.296,3	17.097,8	135,0	55.709,2
Tahun 2014		107.306,2	18.384,1	311,2	54.560,5
Tahun 2013		93.279,2	17.455,9	329,3	50.607,8
Tahun 2012		95.611,0	16.068,6	645,9	38.462,5

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

d) Pertambangan dan Energi

Pada Tahun 2016, produksi minyak bumi di Propinsi Riau sebanyak 98.892.755,00 juta barel. Disamping minyak mentah, sumberdaya alam yang potensi lainnya adalah gas bumi dan batubara. Kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya di sektor industri. Untuk mencapai sasaran tersebut maka diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik serta perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan pelayann yang baik.

Sebagian besar masyarakat Riau telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Pada Tahun 2016, jumlah pelanggan PLN sebanyak 2.745.544 dan sebesar 1.201.666 dari seluruh pelanggan PLN adalah rumah tangga, kapasitas pembangkit listrik yang telah terpasang di wilayah Riau adalah 28.749 MW dan produksi pembangkit sebesar 4.426.439.044 KWH.

e) Industri

Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Propinsi Riau pada Tahun 2015 tercatat 250 perusahaan. Berdasarkan klasifikasi industri, jumlah perusahaan yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan yaitu sebanyak 196 perusahaan, dan kelompok industri karet sebanyak 12 perusahaan. Penyerapan tenaga kerja pada indsutri besar dan sedang sebanyak 69.754 orang. Seiring dengan peningkatan kinerja perusahaan industri besar

maupun sedang, maka nilai produksi barang yang dihasilkan mencapai Rp. 226.388.970.351. Output pada industri besar dan sedang Tahun 2015 senilai Rp. 229.872.381.591.

Tabel 4.10. Industri Pengolahan di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perusahaan	205,0	202,0	217,0	219,0	250,0
2	Tenaga Kerja	72,9	59,5	64,0	61,5	69,8
3	Nilai Output	154,6	172,0	223,6	215,9	297,9
4	Nilai Tambah Harga Pasar	51,5	45,8	55,8	108,7	132,0
5	Nilai Tambah faktor Produksi	51,1	45,0	54,9	108,2	97,9

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

f) Kehutanan

Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain di manfaatkan harus di perhatikan pula kelestariannya. Luas hutan yang ada di Propinsi Riau berdasarkan data BPS Tahun 2017 yaitu sekitar 8,90 juta hektar.

4.2. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.2.1 Letak Geografis dan Administrasi

Berdasarkan letak geografisnya wilayah Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'00" BT dan 0°25'00" LU. Secara fisik, luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Geografis dari Kota Pekanbaru ini adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Propinsi Riau setelah dikeluarkannya Perda Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 mengalami pemekaran wilayah kecamatan yang sebelumnya hanya terdiri dari 8 kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya aktifitas kegiatan penduduk di Kota Pekanbaru yang menuntut tersedianya fasilitas dan utilitas perkotaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun nama-nama kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Tampan	59,81
2	Payung Sekaki	43,23
3	Bukit Raya	22,05
4	Marpoyan Damai	29,74
5	Tenayan Raya	171,27
6	Lima Puluh	4,04
7	Sail	3,26
8	Pekanbaru Kota	3,26
9	Sukajadi	3,76
10	Senapelan	6,65
11	Rumbai	128,85
12	Rumbai Pesisir	157,33

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

4.2.1.2. Kependudukan

Pada akhir Tahun 2015, tercatat bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 1.038.118 jiwa kemudian mengalami peningkatan jumlah penduduk pada akhir Tahun 2016 dengan menjadi 1.064.566 jiwa yang tersebar pada 12 Kecamatan yang ada. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap maupun penduduk bertempat tinggal tidak tetap. Penduduk Kota Pekanbaru terpadat berada pada Kecamatan Sukajadi sedangkan kepadatan terendah terletak pada Kecamatan Rumbai Pesisir. Penyebaran penduduk di wilayah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 4.12

Tabel 4.12. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Tampan	269.062
2	Payung Sekaki	90.665
3	Bukit Raya	103.114
4	Marpoyan Damai	131.245
5	Tenayan Raya	158.519
6	Lima Puluh	41.437
7	Sail	21.479
8	Pekanbaru Kota	25.094
9	Sukajadi	47.364
10	Senapelan	36.548
11	Rumbai	67.523
12	Rumbai Pesisir	72.516
	Jumlah	1.064.566

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Berdasarkan jumlah penduduk yang tersebar di wilayah Kota Pekanbaru dapat diasumsikan bahwa Kota Pekanbaru saat ini mulai mengalami peningkatan penduduk yang cukup signifikan.

4.2.1.3. Perekonomian

Sebagai salah satu indikator ekonomi makro, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan produktifitas perekonomian suatu daerah pada tahun tertentu. Pada Tahun 2014 PDRB Kota Pekanbaru berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 83,66 triliun meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 74,43 triliun. Sementara PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 57,61 triliun. Adapun sektor yang paling berkontribusi dalam perekonomian Kota Pekanbaru adalah sektor konstruksi. Perekonomian Kota Pekanbaru pada Tahun 2015 mengalami percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun 2014. Laju pertumbuhan Tahun 2015 mencapai 7,28 %, sedangkan Tahun 2014 sebesar 6,79 %. Dari semua sektor yang ada sektor konstruksi yang mengalami pertumbuhan tertinggi. PDRB Kota Pekanbaru adalah :

Tabel 4.13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2012 – 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	923.555	1.024.012	1.156.508	1.341.806	1.509.890,70
2	Pertambangan dan Penggalian	11.250	12.461	13.757	16.236	18.995,70
3	Industri Pengolahan	11.473.151	12.272.527	14.013.850	16.703.456	18.415.590,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	96.070	97.804	119.232	148.091	183.141,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.913	11.496	11.978	13.351	14.293,50
6	Konstruksi	16.036.783	17.893.457	22.134.972	24.763.478	27.433.830,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.067.019	17.131.977	22.158.000	24.520.355	27.348.384,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1.325.879	1.495.873	1.793.557	2.105.083	2.345.294,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.105.174	1.266.299	1.765.161	1.819.509	1.941.720,10
10	Informasi dan Komunikasi	1.370.444	1.402.090	1.583.787	1.818.250	1.942.350,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.020.821	2.236.937	2.668.747	2.971.439	3.286.316,90
12	Real Estate	1.620.388	1.759.101	2.037.801	2.404.178	2.588.250,60

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	9.294	10.632	13.539	15.366	16.756,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.348.833	2.468.441	2.554.746	2.751.629	2.836.779,40
15	Jasa Pendidikan	586.288	631.162	819.219	956.881	1.032.542,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	236.665	266.329	329.292	408.610	447.501,30
17	Jasa lainnya	448.491	511.863	667.073	904.613	1.019.959,80
Jumlah		55.694.030	60.494.474	73.843.233	83.664.346	92.383.613,70

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Tabel 4.14. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2012 – 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	800.009	838.732	873.500	900.152	935.605,4
2	Pertambangan dan Penggalian	9.333	9.693	10.041	10.276	10.525,2
3	Industri Pengolahan	10.050.827	10.856.123,4	11.660.216	12.582.985	13.447.405,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	99.833	101.754,5	108.591	117.361	131.296,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.478	11.350	11.469	11.774	11.603,7
6	Konstruksi	13.396.720	13.833.805,1	14.974.549	15.977.718	17.122.630,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.058.301	14.932.339	15.765.041	16.114.687	17.061.111,6
8	Transportasi dan Pergudangan	1.206.735	1.282.437	1.387.598	1.481.826	1.536.901,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	926.507	950.474	1.000.057	1.005.034	1.047.019,7
10	Informasi dan Komunikasi	1.382.921	1.509.032	1.570.772	1.694.228	1.780.097,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.721.850	1.804.301	2.050.690	2.187.503	2.348.489,6
12	Real Estate	1.414.929	1.493.506	1.557.683	1.711.994	1.749.089,4

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	7.942	8.664	10.425	11.130	11.508,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.122.171	2.189.349	2.230.117	2.301.539	2.285.241,7
15	Jasa Pendidikan	522.696	544.852	576.026	609.550	614.294,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207.341	227.702	249.443	276.054	287.009,6
17	Jasa lainnya	412.144	459.053	519.261	621.289	668.772,2
Jumlah		48.353.749	51.055.179	54.557.493	57.617.115	61.050.619

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

4.3. Gambaran Umum Kabupaten Siak

4.3.1. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Riau yaitu setelah pemekaran wilayah dari Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten induk. Secara geografis posisi Kabupaten Siak terletak diantara $1^{\circ}16'30''$ LU – $0^{\circ}20'49''$ LU dan $100^{\circ}54'21''$ BT – $10^{\circ}20'14''$ BT. Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km² dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pekanbaru
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Siak terdiri atas 14 Kecamatan setelah mengalami pemekaran pada akhir Tahun 2008 dari 13 kecamatan menjadi 14 kecamatan, yakni Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Dayun, Kecamatan Mempura, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan BungaRaya, Kecamatan Tualang, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Pusako.

Tabel 4.15. Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Minas	346,35
2	Kandis	143,65
3	Siak	894,17
4	Sungai Apit	1.346,33
5	Sungai Mandau	1.705,00
6	Kerinci Kanan	128,66
7	Lubuk Dalam	155,09
8	Tualang	343,60
9	Koto Gasib	704,70
10	Dayun	232,24
11	Bunga Raya	151,00
12	Mempura	437,45
13	Sabak Auh	73,38
14	Pusako	544,47
Jumlah		8.556,09

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

4.3.2 Kependudukan

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Siak terus mengalami perkembangan, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Adapun jumlah penduduk per kecamatan yang ada di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16. Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Siak

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Minas	31.236
2	Kandis	70.456
3	Siak	26.651
4	Sungai Apit	29.525
5	Sungai Mandau	8.859
6	Kerinci Kanan	27.282
7	Lubuk Dalam	20.440
8	Tualang	124.894
9	Koto Gasib	22.059
10	Dayun	31.643
11	Bunga Raya	25.400
12	Mempura	16.997
13	Sabak Auh	11.698
14	Pusako	5.903
Jumlah		453.043

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Siak tersebar secara merata di setiap kecamatan. Jumlah penduduk di

Kabupaten Siak sebanyak 453.052 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 53 jiwa/Km². Meskipun demikian, Kecamatan Tualang merupakan Kecamatan dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tertinggi, dengan jumlah penduduk 124.894 jiwa dan jumlah penduduk paling rendah terdapat pada Kecamatan Pusako dengan jumlah penduduk 5.903 jiwa. Kabupaten Siak yang memiliki luas wilayah sebesar 8.556,09 Km², dengan luas wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Mandau dengan Luas wilayah 1.705,00 km² dan luas wilayah paling sedikit terdapat di Kecamatan Sabak Auh dengan luas wilayah 73,38 km². Kepadatan Penduduk di Kabupaten Siak paling tinggi terdapat di Kecamatan Kandis sebanyak 491 jiwa/km² dan kepadatan penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Sungai Mandau sebesar 5 jiwa/km².

4.3.3 Perekonomian

Perekonomian Siak mengalami kecenderungan untuk tumbuh negatif selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan dari Tahun 2011 - 2015 adalah -0,52%, 2,07%, -2,33%, -0,97%, -0,21%. Pada Tahun 2016 seluruh kategori pertumbuhan di Kabupaten Siak mengalami pertumbuhan yang positif. Berikut adalah Tabel 4.17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak :

Tabel 4.17. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2012 – 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.144.208,75	11.621.360,01	12.897.720,74	13.340.709,08	14.575.403,76
2	Pertambangan dan Penggalian	42.175.031,33	42.292.629,24	41.157.661,95	30.039.629,15	28.813.396,88
3	Industri Pengolahan	20.952.561,53	22.575.616,32	25.205.050,02	26.896.773,54	27.933.455,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.372,19	2.787,78	3.336,65	4.835,14	6.032,69
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.306,73	2.319,78	2.412,32	2.702,75	2.822,21
6	Konstruksi	2.466.944,97	2.754.976,14	2.985.731,35	3.218.294,48	3.591.254,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	892.247,77	1.016.692,25	1.350.723,00	1.414.083,11	1.562.041,64
8	Transportasi dan Pergudangan	53.753,63	60.680,09	67.150,47	74.928,43	81.319,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.239,13	24.461,41	30.181,80	33.007,00	36.029,24
10	Informasi dan Komunikasi	109.943,94	126.834,85	137.777,72	150.848,19	160.717,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	186.627,06	224.310,45	275.763,53	264.946,90	274.767,33
12	Real Estate	215.138,07	236.853,44	276.428,61	303.008,41	324.228,27

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	2.666,91	3.148,14	3.776,30	4.089,46	4.349,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	492.748,18	528.067,89	556.838,37	600.349,17	619.670,52
15	Jasa Pendidikan	272.910,25	297.735,06	341.319,87	372.611,53	393.146,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92.967,14	102.293,98	121.435,37	146.885,91	153.569,23
17	Jasa lainnya	219.759,93	258.957,60	322.214,04	367.749,44	411.177,10
Jumlah		79.305.439,51	82.131.737,43	85.737.536,11	77.237.466,69	78.945.397,96

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Tabel 4.18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rpiah) Tahun 2012 – 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.041.923,40	10.201.456,60	10.700.615,10	10.634.282,90	10.981.665,90
2	Pertambangan dan Penggalian	20.780.997,30	17.877.016,00	15.919.549,60	21.072.622,50	21.393.440,90
3	Industri Pengolahan	18.277.899,40	19.524.775,20	20.295.907,80	21.072.622,50	21.393.440,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.240,90	2.519,10	2.981,30	3.374,20	3.924,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.208,40	2.209,70	2.230,20	2.294,40	2.300,70
6	Konstruksi	1.840.578,80	1.895.825,00	1.946.645,40	2.070.267,60	2.136.627,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	807.153,80	888,228,7	922.666,00	939.336,20	989.669,80
8	Transportasi dan Pergudangan	47.794,50	50.590,40	52.981,60	56.311,60	58.001,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.224,30	19.099,80	19.849,40	20.625,30	21.072,00
10	Informasi dan Komunikasi	104.337,30	121.212,10	126.602,70	133.519,60	137.175,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	158.111,90	181.182,10	211.121,90	194.399,30	195.315,20
12	Real Estate	175.473,20	188.312,40	204.586,00	219.179,50	223.669,00

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	2.346,20	2.520,00	2.729,10	2.823,60	2.855,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	456.443,70	483.113,60	493.055,70	513.349,50	515.527,60
15	Jasa Pendidikan	236.314,80	247.186,30	248.271,20	250.118,70	251.810,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81.078,30	86.975,30	93.611,60	102.594,20	103.544,20
17	Jasa lainnya	194.672,30	215.091,50	241.777,80	257.351,60	270.553,8
Jumlah		53.228.810,50	51.101.098,10	51.487.196,40	57.547.088,20	58.412.056,30

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak dapat di ketahui bahwa sektor yang paling berkontribusi dalam perekonomian di Kabupaten Siak adalah sektor pertambangan dan penggalian. Pada dasarnya struktur ekonomi sebagian masyarakat di Kabupaten Siak memang di dominasi oleh tiga kategori berdasarkan sektor yang ada yaitu, kategori pertambangan dan penggalian yang menjadi penggerak PDRB terbesar, kemudian kategori industri pengolahan dan kategori jasa lainnya.

4.4 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

4.4.1 Letak geografis dan Administrasi

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau, yang secara astronomis terletak di antara $01^{\circ}00'40''$ LU - $00^{\circ}27'00''$ LS dan $100^{\circ}28'30''$ - $101^{\circ}14'30''$ BT. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki luas 1.128.928 ha. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Kampar terdiri dari atas 21 kecamatan, Berikut ini adalah tabel jumlah dan luas wilayah dari masing masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar

Tabel 4.18. Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Kampar Kiri	
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25
3	Kampar Kiri Hilir	759,74
4	Gunung Sahilan	330,59
5	Kampar Kiri Tengah	597,97
6	XII Koto Kampar	732,40
7	Koto Kampar Hulu	674,00
8	Kuok	151,41
9	Salo	207,83
10	Tapung	1.365,97
11	Tapung Hulu	1.169,97
12	Tapung Hilir	1.013,56
13	Bangkinang Kota	177,18
14	Bangkinang	253,50
15	Kampar	136,28
16	Kampar Timur	173,08
17	Rumbio Jaya	76,92
18	Kampar Utara	79,84
19	Tambang	371,94
20	Siak Hulu	689,80
21	Perhentian Raja	111,54
Jumlah		10.374,77

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

4.4.2 Kependudukan

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel 4.19 jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kampar.

Tabel 4.19. Jumlah Penduduk Masing Masing Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kampar Kiri	30.676
2	Kampar Kiri Hulu	12.100
3	Kampar Kiri Hilir	11.702
4	Gunung Sahilan	20.218
5	Kampar Kiri Tengah	27.558
6	XII Koto Kampar	24.673
7	Koto Kampar Hulu	19.346
8	Kuok	25.726
9	Salo	26.518
10	Tapung	98.031
11	Tapung Hulu	84.517
12	Tapung Hilir	61.603
13	Bangkinang Kota	40.639
14	Bangkinang	33.735
15	Kampar	51.601
16	Kampar Timur	25.129
17	Rumbio Jaya	17.540
18	Kampar Utara	17.609
19	Tambang	62.640
20	Siak Hulu	103.099
21	Perhentian Raja	18.042
Jumlah		812.702

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Berdasarkan Tabel 4.19 bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar dengan tingkat densitas 371 jiwa/km², kemudian kecamatan dengan kepadatan yang relatif rendah yaitu Kampar Kiri Hulu dengan 9 jiwa /km². Pada Tahun 2016 tingkat pertumbuhan pada Kabupaten Kampar lebih tinggi 1,3 kali dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2012. Dengan luas wilayah 11.289,28 km² mengakibatkan kepadatan penduduk pada Tahun 2016 sebesar 70 jiwa/km² lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun sebelumnya yaitu 67 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kampar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

4.4.3 Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Kampar pada Tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 2011-2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar memiliki kecenderungan melambat. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar sebesar 4,11 % kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2012 sebesar 5,82% dan meningkat lagi sebesar 6,31% pada Tahun 2013. Selanjutnya mengalami perlambatan pada Tahun 2014 dan 2015 sebesar 3,43% dan 1,07% sedangkan Tahun 2013 sebesar 6,25%.

**Tabel 4.20. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Tahun 2012 – 2016**

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.049.949,22	13.636.647,44	15.347.655,66	16.493.085,93	18.200.031,39
2	Pertambangan dan Penggalian	18.698.542,15	28.026.208,33	31.556.994,58	25.993.640,08	25.737.541,34
3	Industri Pengolahan	10.104.962,47	12.524.987,69	13.519.605,58	14.565.372,27	15.572.002,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.240,64	16.305,12	20.838,64	27.718,55	34.422,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.893,63	3.083,63	3.189,03	3.545,53	3.626,65
6	Konstruksi	2.311.714,17	3.371.882,95	3.837.039,44	4.305.275,77	4.795.219,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.215.961,19	1.547.848,27	1.921.933,72	2.067.904,44	2.277.153,51
8	Transportasi dan Pergudangan	120.365,88	142.294,62	156.825,45	183.860,99	202.868,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34.886,73	43.219,81	47.046,41	52.190,33	58.917,19
10	Informasi dan Komunikasi	175.113,69	209.926,29	226.224,08	246.012,94	253.597,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	175.287,32	221.937,62	257.657,96	260.465,95	283.089,49
12	Real Estate	387.330,26	475.331,52	539.261,46	594.528,03	645.802,44

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	1.279,23	1.679,56	1.984,85	2.158,36	2.366,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	714.102,05	847.065,54	870.965,26	892.456,10	961.778,39
15	Jasa Pendidikan	214.384,15	236.780,92	261.174,35	295.403,77	330.228,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63.007,10	78.129,38	91.503,26	115.990,56	124.707,60
17	Jasa lainnya	105.677,35	132.179,64	157.010,26	175.460,24	191.305,80
Jumlah		46.394.709,23	61.517.521,33	68.818.923,99	66.275.069,83	69.676.675,17

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Tabel 4.21. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2012 – 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.004.555,7	12.380.412,0	12.984.986,4	13.031.866,0	13.672.507,3
2	Pertambangan dan Penggalian	13.221.181,3	13.819.943,1	13.880.142,0	13.921.701,1	13.820.703,9
3	Industri Pengolahan	10.693.182,4	11.966.078,2	12.476.389,3	12.668.783,3	13.205.269,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15.056,2	15.703,9	18.986,5	20.677,3	23.273,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.805,3	2.810,6	2.843,3	2.902,1	2.879,9
6	Konstruksi	2.482.749,4	2.670.876,9	2.857.494,5	3.004.099,0	3.126.365,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.217.058,9	1.318.279,5	1.390.105,1	1.399.614,6	1.453.317,0
8	Transportasi dan Pergudangan	121.734,7	125.239,4	128.872,5	139.482,3	147.154,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34.507,8	35.476,9	36.322,4	37.731,7	39.334,1
10	Informasi dan Komunikasi	182.713,8	190.965,9	197.505,2	202.255,9	206.361,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	182.482,6	203.656,5	221.799,0	213.960,4	221.559,6
12	Real Estate	397.551,6	412.427,1	431.255,6	450.362,9	456.799,2

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	1.359,9	1.462,5	1.608,0	1.659,2	1.709,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734.510,1	756.655,2	766.088,3	781.539,6	781.992,9
15	Jasa Pendidikan	204.517,5	208.852,7	215.569,7	220.120,8	226.416,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65.344,9	69.805,3	75.139,4	82.164,1	83.104,6
17	Jasa lainnya	107.234,6	118.936,9	131.358,6	135.146,2	140.295,0
Jumlah		41.670.558,7	44.299.595,6	45.818.479,8	46.316.081,5	47.611.060,0

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017



4.5 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

4.5.1 Letak geografis dan Administrasi

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir pantai timur Pulau Sumatera yang secara astronomis terletak antara 1°25'00" LU - 0°20'00" KS dan 100°42'00" BT - 103°28'00" BT. Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan yaitu 13.925 km² atau 14.73% dari total luas Propinsi Riau. batas wilayah dari Kabupaten Pelalawan.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Pelalawan terbagi kedalam 12 kecamatan, ibukota Kabupaten Pelalawan yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci. Berikut tabel wilayah kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.22. Luas Wilayah Masing Masing Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

No	Kabupten/Kota	Luas Wilayah
1	Langgam	144.245,09
2	Pangkalan Kerinci	19.355,53
3	Bandar sei Kijang	31.941,20
4	Pangkalan Kuras	118.388,79
5	Ukui	129.956,06
6	Pangkalan Lesung	50.485,12
7	Bunut	40.802,77
8	Pelalawan	149.811,31
9	Bandar Petalangan	37.255,16
10	Kuala Kampar	150.265,19
11	Kerumutan	96.003,66
12	Teluk Meranti	423.984,41
Jumlah		1.392.494,29

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

4.5.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 adalah 417.498 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 214.268 jiwa dan perempuan 203.230 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 115.764 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Bandar Petalangan 14.195 jiwa. Tabel Sebaran Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23. Sebaran Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Langgam	30.511
2	Pangkalan Kerinci	115.764
3	Bandar sei Kijang	33.599
4	Pangkalan Kuras	58.856
5	Ukui	39.263
6	Pangkalan Lesung	31.624
7	Bunut	15.355
8	Pelalawan	19.530
9	Bandar Petalangan	14.195
10	Kuala Kampar	18.055
11	Kerumutan	23.699
12	Teluk Meranti	17.047
	Jumlah	417.498

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Tingkat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan belum diimbangi dengan penyebaran penduduk. Kawasan permukiman masih berkonsentrasi di ibukota kabupaten dan beberapa kecamatan terdekat yang terbanyak penduduknya itu Pangkalan kerinci.

4.5.3 Perekonomian

Secara umum, terdapat dua sektor yang cukup dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 yaitu sektor industri pengolahan (48,98%) dan sektor pertanian (38,53%). Sektor perkebunan didominasi dari kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan Kabupaten Pelalawan. Pada Tahun 2016 perekonomian Kabupaten Pelalawan mengalami percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2015 mencapai 9,84% sedangkan Tahun 2014 sebesar 15,02 %.

Tabel 4.24. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2012 – 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.096.002,23	12.020.964,20	13.806.857,14	15.101.167,00	16.089.030,00
2	Pertambangan dan Penggalian	918.015,08	1.147.354,12	1.297.251,53	1.164.739,00	1.075.782,00
3	Industri Pengolahan	14.542.200,12	15.061.503,96	17.228.534,24	19.194.976,00	20.143.880,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.282,31	4.331,21	6.229,83	9.158,00	12.776,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.408,47	2.418,24	2.504,07	2.695,00	2.728,70
6	Konstruksi	534.574,71	623.083,02	725.736,10	843.015,00	944.146,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	814.016,24	890.704,55	1.226.371,29	1.342.619,00	1.263.680,80
8	Transportasi dan Pergudangan	56.396,13	66.891,22	79.145,81	91.113,00	95.292,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44.856,81	52.624,35	64.445,23	72.019,00	79.028,50
10	Informasi dan Komunikasi	131.520,11	144.207,84	161.116,07	184.395,00	195.801,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	186.225,02	299.820,20	214.766,89	206.117,00	232.117,40
12	Real Estate	155.046,14	181.240,99	210.712,16	241.798,00	259.680,90

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	331,90	372,40	426,32	476,00	517,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	342.889,30	379.616,35	402.092,65	435.114,00	449.989,30
15	Jasa Pendidikan	83.526,98	95.640,14	111.199,79	130.841,00	138.629,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.707,87	39.779,97	46.513,37	57.420,00	59.966,20
17	Jasa lainnya	66.694,42	78.181,64	94.524,37	113.603,00	122.543,70
Jumlah		29.015.705,84	31.090.747,40	35.680.440,86	39.193.280,00	41.167.608,50

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017

Tabel 4.25. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2012 – 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.006.246,89	10.477.340,05	11.068.289,57	11.073.845,39	11.355.693,69
2	Pertambangan dan Penggalian	584.835,73	624.379,79	644.835,94	650.800,18	648.595,18
3	Industri Pengolahan	13.178.118,52	13.909.438,66	14.842.336,12	15.422.798,99	15.926.829,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	553,43	573,68	593,65	617,13	8.486,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.101,21	2.105,53	2.155,34	2.203,90	2.194,72
6	Konstruksi	499.181,23	546.921,42	600.379,89	655.093,03	681.434,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	638.845,93	692.037,24	752.324,29	776.166,24	810.577,66
8	Transportasi dan Pergudangan	53.896,71	57.769,01	62.311,44	66.412,84	68.509,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.664,07	42.398,86	45.811,07	47.847,43	49.571,75
10	Informasi dan Komunikasi	129.764,04	141.135,69	151.863,84	163.815,18	171.418,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	160.240,96	187.178,08	167.239,04	152.299,34	165.395,47
12	Real Estate	145.459,48	159.492,32	174.585,87	188.605,49	191.366,60

13	Jasa Perusahaan	304,97	323,93	349,32	371,80	380,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	312.278,29	335.744,14	342.845,13	356.521,36	357.321,38
15	Jasa Pendidikan	73.233,76	78.236,41	84.908,28	92.214,35	93.067,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31.770,43	34.192,72	36.601,62	40.247,41	40.420,60
17	Jasa lainnya	60.416,48	66.936,32	73.441,54	79.652,21	83.643,03
Jumlah		25.916.912,13	27.356.203,85	29.050.871,95	29.769.512,27	30.654.906,27

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2017



Berdasarkan PDRB Kabupaten Pelalawan pada kurun waktu 2012-2016 diketahui bahwa berdasarkan harga konstan sektor utama yang berkontribusi besar adalah sektor industri pengolahan disusul oleh sektor pertanian kemudian. Namun, pada Tahun 2012 – 2016 pada sektor pertanian mengalami sedikit peningkatan di setiap tahunnya sedangkan sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan mendominasi persentase yang paling tinggi pada PDRB Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2016 yaitu sebesar 51,80%. Setiap tahunnya perekonomian Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan perekonomian secara sempurna.



BAB V

HASIL PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Pertumbuhan Masing Masing Sektor Wilayah

Pekansikawan

Dalam mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi dilakukan perhitungan dengan input data yang berasal dari Badan Pusat Statistik dengan melihat PDRB pada masing masing Wilayah Pekansikawan sehingga *output* analisa yang dihasilkan berupa laju pertumbuhan ekonomi pada masing masing sektor pada Wilayah Pekansikawan dengan kurun waktu perhitungan selama lima tahun terakhir. Identifikasi laju pertumbuhan akan dilakukan terhadap 17 Sektor yang terkandung dalam PDRB itu sendiri.

5.1.1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Adapun input data sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada wilayah Pekansikawan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 PDRB atas harga konstan Sektor Pertanian Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	800.009,0	838.732,4	873.500,0	900.152,0	935.605,4
2	Kabupaten Siak	10.041.923,4	10.201.456,6	10.700.615,1	10.634.282,9	10.981.665,9
3	Kabupaten Kampar	12.004.555,7	12.380.412,0	12.984.986,4	13.031.866,0	13.672.507,3
4	Kabupaten Pelalawan	10.006.246,9	10.477.340,1	11.069.808,9	11.073.786,4	11.355.693,7
Jumlah		32.852.735,0	33.897.941,1	35.628.910,4	35.640.087,3	36.945.472,3

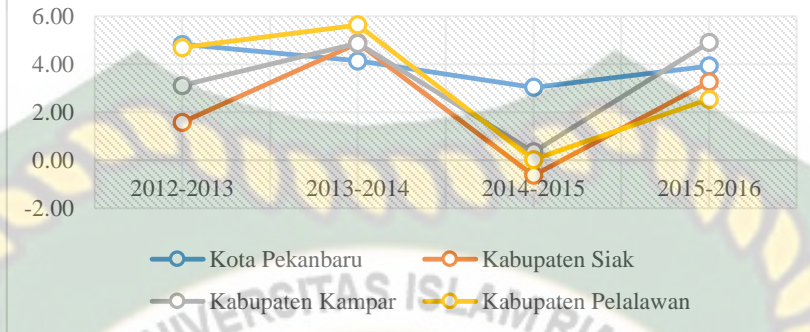
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Tabel 5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	4,84	4,15	3,05	3,94
2	Kabupaten Siak	1,59	4,89	-0,62	3,27
3	Kabupaten Kampar	3,13	4,88	0,36	4,92
4	Kabupaten Pelalawan	4,71	5,65	0,04	2,55

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.1 Tingkat Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang telah dilakukan bahwa pada sektor pertanian untuk Wilayah Pekansikawan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 terdapat pada Kabupaten Kampar dengan 4,92 % dan untuk Kabupaten Pelalawan memiliki angka terendah pada 2,55 %.

5.1.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Adapun input data sektor pertambangan dan penggalian Wilayah Pekansikawan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 PDRB atas harga konstan Sektor Pertambangan dan Penggalian

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	9.333,00	9.693,00	10.041,00	10.276,00	10.525,20
2	Kabupaten Siak	20.780.997,30	17.877.016,00	15.919.549,60	14.906.724,80	14.270.954,80
3	Kabupaten Kampar	13.221.181,30	13.819.943,10	13.880.142,00	13.921.701,10	13.820.703,90
4	Kabupaten Pelalawan	584.835,73	624.379,79	644.835,94	650.800,18	648.595,18
Jumlah		34.596.347,33	32.331.031,89	30.454.568,54	29.489.502,08	28.750.779,08

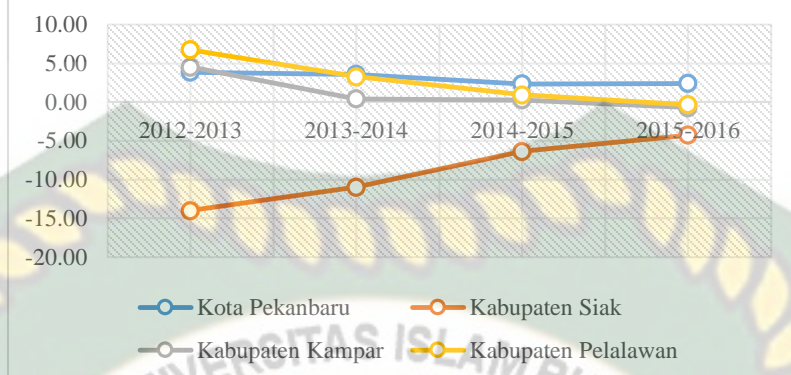
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Riau, 2017

Tabel 5.4. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	3,86	3,59	2,34	2,43
2	Kabupaten Siak	-13,97	-10,95	-6,36	-4,26
3	Kabupaten Kampar	4,53	0,44	0,30	-0,73
4	Kabupaten Pelalawan	6,76	3,28	0,92	-0,34

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.2 Tingkat Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang telah dilakukan pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di Wilayah Pekansikawan tidak terlalu memuaskan yaitu 3 kabupaten selain Kota Pekanbaru mengalami penurunan dengan penurunan terbesar terdapat pada Kabupaten Siak dengan -4,26 akan tetapi penurunan ini dikatakan baik dikarenakan dilihat pada tahun sebelumnya Kabupaten Siak mulai memperkecil angka penurunannya. Dapat dilihat pada grafik 5.2 persentase Kabupaten Siak dalam sektor penggalian dan pertambangan mulai naik.

5.1.3. Sektor Industri Pengolahan

Adapun input data sektor industri pengolahan pada Wilayah Pekansikawan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5 PDRB atas harga konstan Sektor Industri Pengolahan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	10.050.827,00	10.856.123,00	11.660.216,00	12.582.985,00	13.447.405,20
2	Kabupaten Siak	18.277.899,40	19.524.775,20	20.295.907,80	21.072.622,50	21.393.440,90
3	Kabupaten Kampar	10.693.182,40	11.966.078,20	12.476.389,30	12.668.783,30	13.205.269,80
4	Kabupaten Pelalawan	13.178.118,52	13.909.438,66	14.842.336,12	15.422.798,99	15.926.829,63
	Jumlah	52.200.027,32	56.256.415,06	59.274.849,22	61.747.189,79	63.972.945,53

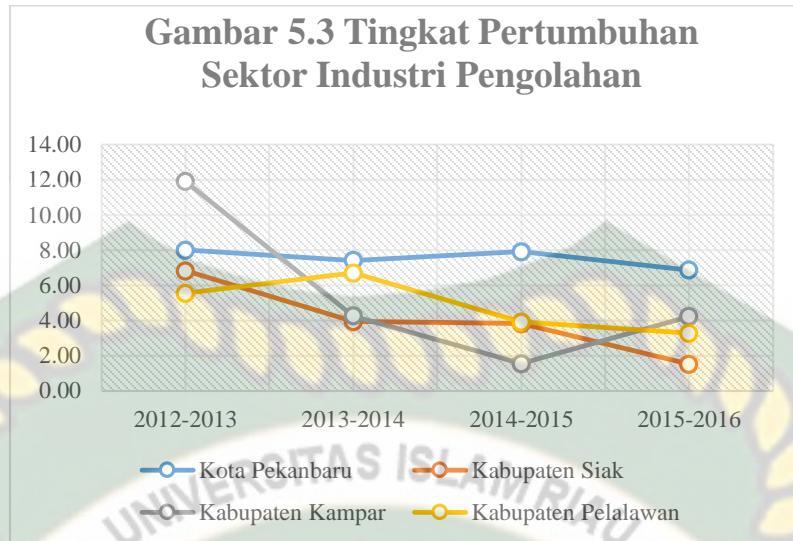
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Riau, 2017

Tabel 5.6 Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	8,01	7,41	7,91	6,87
2	Kabupaten Siak	6,82	3,95	3,83	1,52
3	Kabupaten Kampar	11,90	4,26	1,54	4,23
4	Kabupaten Pelalawan	5,55	6,71	3,91	3,27

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.3 Tingkat Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan Kabupaten Kampar mengalami penurunan yang sangat jauh pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,54% akan tetapi pada tahun 2016 mulai mengalami kenaikan sebesar 4,23 % akan tetapi Kota Pekanbaru memiliki laju pertumbuhan yang cukup stabil dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan pada tahun 2016 Kota Pekanbaru memiliki penurunan yang tidak terlalu jauh yaitu pada 6,87 %.

5.1.4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Adapun input data sektor pengadaan listrik dan gas Wilayah Pekansikawan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7. PDRB atas harga konstan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	99.833,00	101.754,00	108.591,00	117.361,00	131.296,50
2	Kabupaten Siak	2.240,90	2.519,10	2.981,30	3.374,20	3.924,10
3	Kabupaten Kampar	15.056,20	15.703,90	18.986,50	20.177,29	23.273,10
4	Kabupaten Pelalawan	553,43	5.008,68	6.511,64	7.165,46	8.486,30
Jumlah		117.683,53	124.985,68	137.070,44	148.077,95	166.980,00

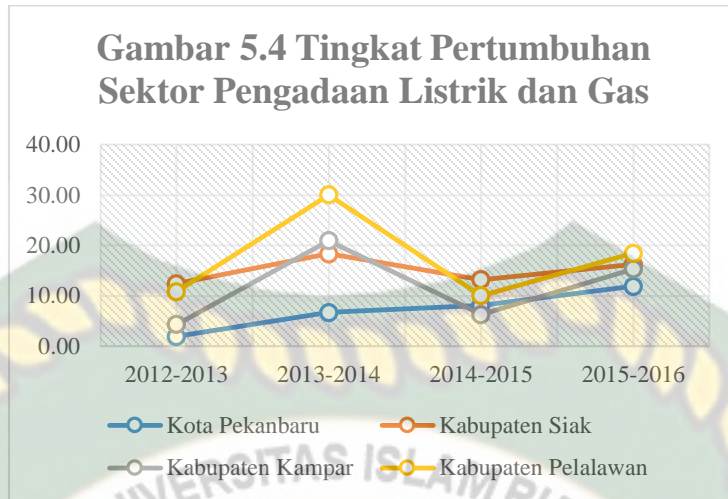
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Riau, 2017

Tabel 5.8. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	1,92	6,72	8,08	11,87
2	Kabupaten Siak	12,41	18,35	13,18	16,30
3	Kabupaten Kampar	4,30	20,90	6,27	15,34
4	Kabupaten Pelalawan	10,80	30,01	10,04	18,43

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.4 Tingkat Pertumbuhan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas yang telah dilakukan diperoleh bahwa pada sektor pengadaan listrik dan gas di Wilayah Pekansikawan pada tahun 2016 tertinggi terdapat pada Kabupaten Pelalawan sebesar 18,43 % dan yang terendah terdapat pada Kota Pekanbaru dengan laju pertumbuhan sebesar 11,87 %, Akan tetapi meskipun memiliki tingkat pertumbuhan yang terendah jika dibandingkan dengan ketiga kabupaten lainnya, pertumbuhan Kota Pekanbaru termasuk meningkat karena dilihat pada tahun tahun sebelumnya mengalami peningkatan dapat dilihat pada Gambar 5.4

5.1.5. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Adapun input data sektor keenam dari ketujuh belas sektor yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9. PDRB atas harga konstan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	11.478,00	11.350,00	11.469,00	11.774,00	11.603,70
2	Kabupaten Siak	2.208,40	2.209,70	2.230,20	2.294,40	2.300,70
3	Kabupaten Kampar	2.805,30	2.810,60	2.843,30	2.902,10	2.879,90
4	Kabupaten Pelalawan	2.101,21	2.105,53	2.155,34	2.203,90	2.194,72
Jumlah		18.592,91	18.475,83	18.697,84	19.174,40	18.979,02

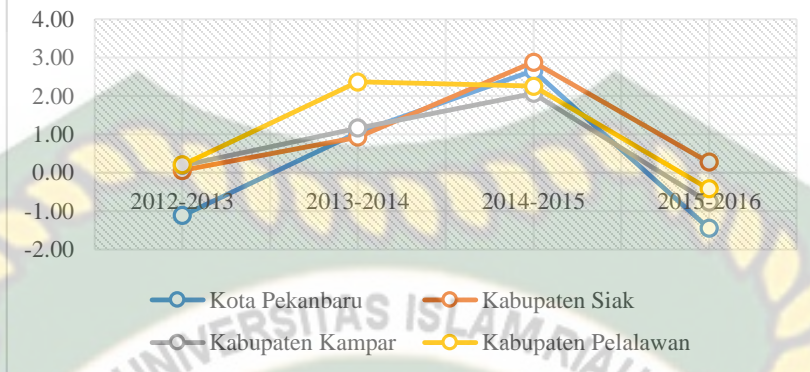
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Riau, 2017

Tabel 5.10. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	-1,12	1,05	2,66	-1,45
2	Kabupaten Siak	0,06	0,93	2,88	0,27
3	Kabupaten Kampar	0,19	1,16	2,07	-0,76
4	Kabupaten Pelalawan	0,21	2,37	2,25	-0,42

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.5 Tingkat Pertumbuhan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor ini memiliki penurunan pada tahun 2016 pada masing masing Kabupaten Kota yang ada di Wilayah Pekansikawan akan tetapi untuk Kabupaten Siak memiliki penurunan yang paling kecil yakni sebesar 0,27 % di tahun 2016 sedangkan jika dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya memiliki persentase di bawah 0%

5.1.6. Sektor Konstruksi

Adapun input data sektor konstruksi pada Wilayah Pekansikawan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11. PDRB atas harga konstan Sektor Konstruksi Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	13.396.720,00	13.833.805,00	14.974.549,00	15.977.718,00	17.122.630,90
2	Kabupaten Siak	1.840.578,80	1.895.825,00	1.946.645,40	2.070.267,60	2.136.627,20
3	Kabupaten Kampar	2.482.749,40	2.670.876,90	2.857.494,50	3.004.009,00	3.126.365,80
4	Kabupaten Pelalawan	499.181,23	546.921,42	600.379,89	655.093,03	681.434,75
Jumlah		18.219.229,43	18.947.428,32	20.379.068,79	21.707.087,63	23.067.058,65

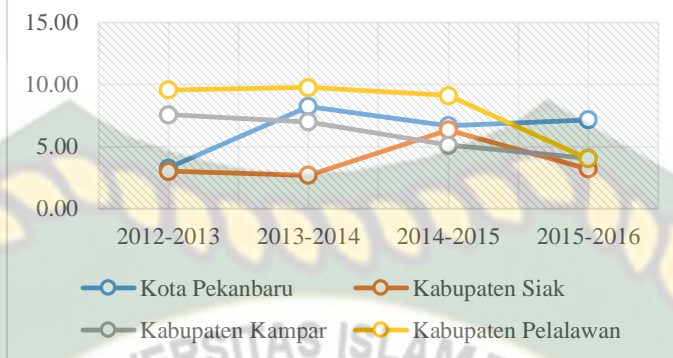
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Riau, 2017

Tabel 5.12. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Konstruksi

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	3,26	8,25	6,70	7,17
2	Kabupaten Siak	3,00	2,68	6,35	3,21
3	Kabupaten Kampar	7,58	6,99	5,13	4,07
4	Kabupaten Pelalawan	9,56	9,77	9,11	4,02

Sumber : Hasil Analisis, 2018

**Gambar 5.6 Tingkat
Pertumbuhan Sektor Konstruksi**



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor konstruksi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 5.12 bahwa pada tahun 2016 Kota Pekanbaru memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan tiga kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 7,17 % akan tetapi berbeda halnya dengan Kabupaten Pelalawan yang pada tahun 2014 memiliki pertumbuhan yang tinggi sebesar 9,11 % sedangkan Kota Pekanbaru hanya sebesar 6,70 %. Kabupaten Pelalawan mengalami penurunan pada tahun 2016 dari 9,11 % menjadi 4,02 %.

5.1.7. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Adapun input data sektor perdagangan besar dan eceran Wilayah Pekansikawan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13. PDRB atas harga konstan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	14.058.301,00	14.932.339,00	15.765.041,00	16.114.687,00	17.061.111,60
2	Kabupaten Siak	807.153,80	888.228,70	922.666,00	939.336,20	989.669,80
3	Kabupaten Kampar	1.217.058,90	1.318.279,50	1.390.105,10	1.399.614,60	1.453.317,00
4	Kabupaten Pelalawan	638.845,93	692.037,24	752.324,29	774.466,24	810.577,66
	Jumlah	16.721.359,63	17.830.884,44	18.830.136,39	19.228.104,04	20.314.676,06

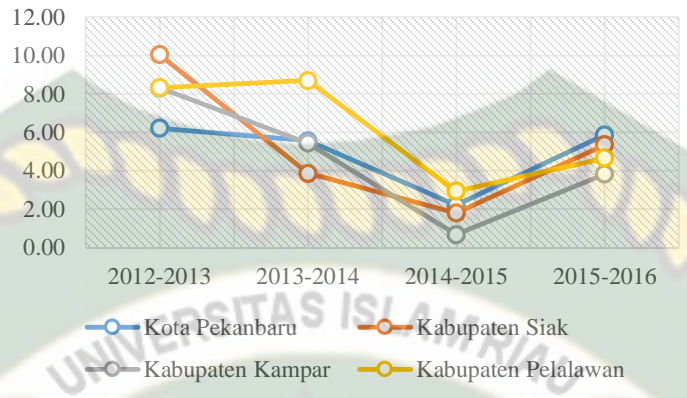
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Riau, 2017

Tabel 5.14. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Pedagangan Besar dan Eceran

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	6,22	5,58	2,22	5,87
2	Kabupaten Siak	10,04	3,88	1,81	5,36
3	Kabupaten Kampar	8,32	5,45	0,68	3,84
4	Kabupaten Pelalawan	8,33	8,71	2,94	4,66

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.7 Tingkat Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



Berdasarkan tabel hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran diatas dapat dilihat bahwa tahun 2016 masing-masing kabupaten mulai meningkat dikarenakan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan, untuk lebih jelas perhatikan Gambar 5.7 Terlihat bahwa masing-masing kabupaten pada tahun 2013 memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 akan tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan.

5.1.8. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Adapun input data sektor transportasi dan pergudangan Wilayah Pekansikawan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.15 PDRB atas harga konstan Sektor Transportasi dan Pergudangan Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	1.206.735,00	1.282.437,00	1.387.598,00	1.481.826,00	1.536.901,20
2	Kabupaten Siak	47.794,50	50.950,40	52.981,60	56.311,60	58.001,30
3	Kabupaten Kampar	121.734,70	125.239,40	128.872,50	139.482,30	147.154,10
4	Kabupaten Pelalawan	53.896,71	57.769,01	62.311,44	66.412,84	68.509,22
	Jumlah	1.430.160,91	1.516.395,81	1.631.763,54	1.744.032,74	1.810.565,82

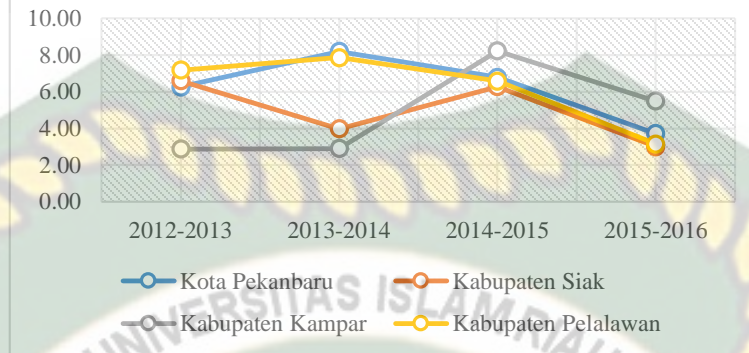
Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

Tabel 5.16. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	6,27	8,20	6,79	3,72
2	Kabupaten Siak	6,60	3,99	6,29	3,00
3	Kabupaten Kampar	2,88	2,90	8,23	5,50
4	Kabupaten Pelalawan	7,18	7,86	6,58	3,16

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.8 Tingkat Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan transportasi dan pergudangan yang dilakukan pada sektor ini dapat diperhatikan Tabel 5.16 yaitu pada tahun 2016 masing-masing kabupaten/kota mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi Kabupaten Kampar memiliki laju pertumbuhan yang paling tinggi diantara 3 kabupaten/kota lainnya. Dan pada tahun 2015 Kabupaten Kampar juga memiliki laju pertumbuhan paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 8,23%.

5.1.9. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Adapun input data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis sektor penyediaan akomodasi makan dan minum adalah sebagai berikut :

Tabel 5.17. PDRB atas harga konstan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Wilayah Pekansikawan

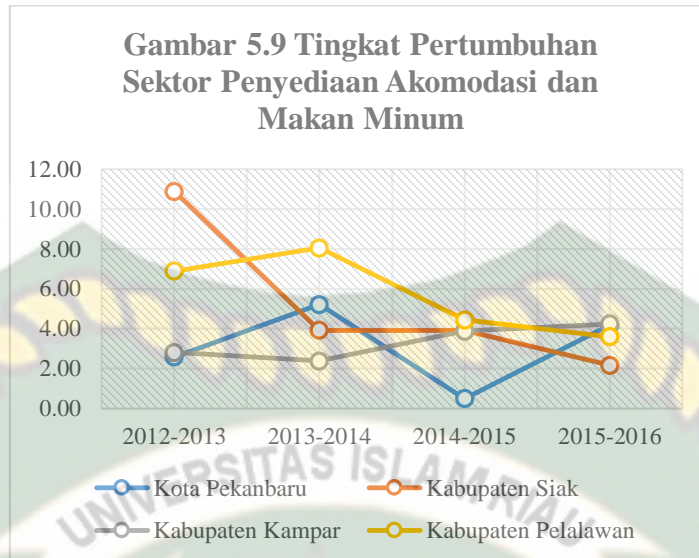
No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	926.507,00	950.474,00	1.000.057,00	1.005.034,00	1.047.019,70
2	Kabupaten Siak	17.224,30	19.099,80	19.849,40	20.625,30	21.072,00
3	Kabupaten Kampar	34.507,80	35.476,90	36.322,40	37.731,70	39.334,10
4	Kabupaten Pelalawan	39.664,07	42.398,86	45.811,07	47.847,43	49.571,75
	Jumlah	1.017.903,17	1.047.449,56	1.102.039,87	1.111.238,43	1.156.997,55

Sumber : BPS Prov Riau, 2017

Tabel 5.18. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	2,59	5,22	0,50	4,18
2	Kabupaten Siak	10,89	3,92	3,91	2,17
3	Kabupaten Kampar	2,81	2,38	3,88	4,25
4	Kabupaten Pelalawan	6,89	8,05	4,45	3,60

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Kabupaten Kampar mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi makan dan minum meskipun angka pertumbuhan dari tahun 2012 tidak terlalu besar akan tetapi 3 kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 juga masih mengalami penurunan untuk lebih jelas perhatikan grafik 5.9.

5.1.10. Sektor Informasi dan Komunikasi

Adapun input data yang digunakan dalam menganalisis laju pertumbuhan ekonomi sektor informasi dan komunikasi Wilayah Pekansikawan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.19. PDRB atas harga konstan Sektor Informasi dan Komunikasi Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	1.382.921,00	1.509.032,00	1.570.772,00	1.694.228,00	1.780.097,40
2	Kabupaten Siak	104.337,30	121.212,10	126.602,70	133.519,60	137.175,60
3	Kabupaten Kampar	182.713,80	190.965,90	197.505,20	202.255,90	206.361,70
4	Kabupaten Pelalawan	129.764,04	141.135,69	151.863,84	163.815,18	171.418,80
Jumlah		1.799.736,14	1.962.345,69	2.046.743,74	2.193.818,68	2.295.053,50

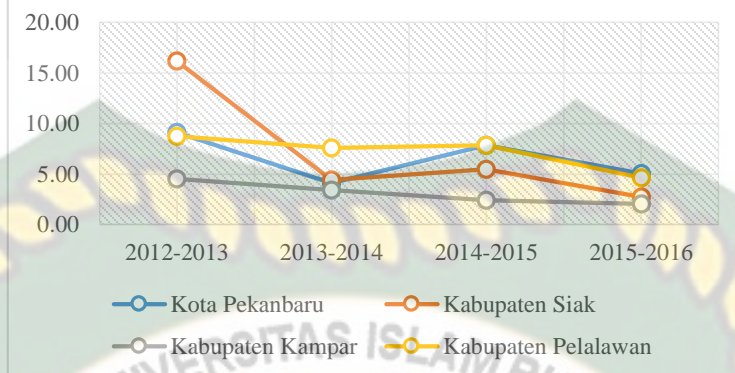
Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

Tabel 5.20 Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	9,12	4,09	7,86	5,07
2	Kabupaten Siak	16,17	4,45	5,46	2,74
3	Kabupaten Kampar	4,52	3,42	2,41	2,03
4	Kabupaten Pelalawan	8,76	7,60	7,87	4,64

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.10 Tingkat Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang telah dilakukan dapat di lihat bahwa pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan tertinggi terletak pada Kota Pekanbaru yakni sebesar 5,07 % dan yang terendah terdapat pada Kabupaten Kampar sebesar 2,03 % akan tetapi meskipun Kota Pekanbaru memiliki angka pertumbuhan yang tinggi jika diperhatikan dari tahun 2012 pertumbuhan Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dan penurunan dan pada tahun 2016 mengalami penurunan.

5.1.11. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Adapun input data yang diperlukan dalam melakukan analisis pertumbuhan ekonomi sektor jasa keuangan dan asuransi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.21. PDRB atas harga konstan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	1.721.850,00	1.804.301,00	2.050.690,00	2.187.503,00	2.348.489,60
2	Kabupaten Siak	158.111,90	181.182,10	211.121,90	194.399,30	195.315,20
3	Kabupaten Kampar	182.482,60	203.656,50	221.799,00	213.960,40	221.559,60
4	Kabupaten Pelalawan	160.240,96	187.178,08	167.239,04	152.299,34	165.395,47
	Jumlah	2.222.685,46	2.376.317,68	2.650.849,94	2.748.162,04	2.930.759,87

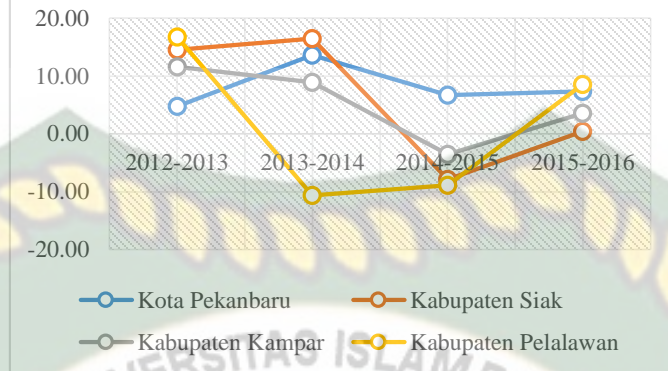
Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

Tabel 5.22. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	4,79	13,66	6,67	7,36
2	Kabupaten Siak	14,59	16,52	-7,92	0,47
3	Kabupaten Kampar	11,60	8,91	-3,53	3,55
4	Kabupaten Pelalawan	16,81	-10,65	-8,93	8,60

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.11 Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi, dapat diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor jasa keuangan dan asuransi tertinggi pada tahun 2016 terdapat pada Kabupaten Pelalawan sebesar 8,60 % yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan hingga -8,93%. Sedangkan Kota Pekanbaru memiliki pertumbuhan yang diatas rata rata meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan persentase pertumbuhan.

5.1.12. Sektor Real Estate

Adapun input data dalam menganalisis laju pertumbuhan pada sektor real estate adalah sebagai berikut :

Tabel 5.23. PDRB atas harga konstan Sektor Real Estate Wilayah Pekansikawan

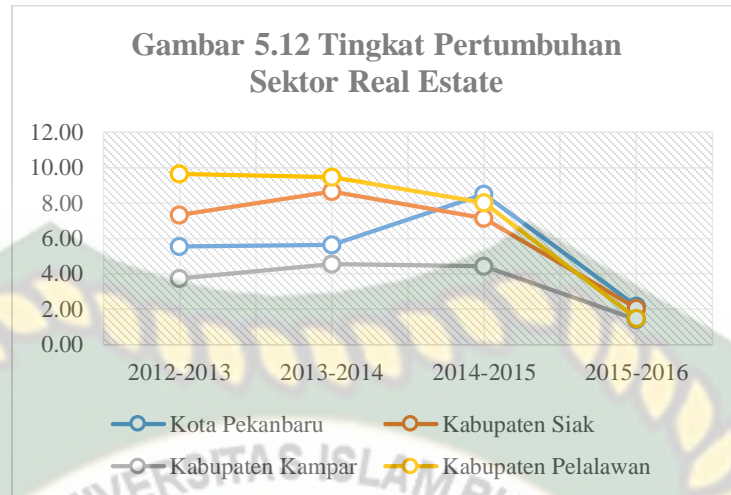
No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	1.414.929,00	1.493.506,00	1.577.683,00	1.711.994,00	1.749.089,40
2	Kabupaten Siak	175.473,20	188.312,40	204.586,00	219.179,50	223.669,00
3	Kabupaten Kampar	397.551,60	412.427,10	431.255,60	450.362,90	456.799,20
4	Kabupaten Pelalawan	145.459,48	159.492,32	174.585,87	188.605,49	191.366,60
Jumlah		2.133.413,28	2.253.737,82	2.388.110,47	2.570.141,89	2.620.924,20

Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

Tabel 5.24. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Real Estate

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	5,55	5,64	8,51	2,17
2	Kabupaten Siak	7,32	8,64	7,13	2,05
3	Kabupaten Kampar	3,74	4,57	4,43	1,43
4	Kabupaten Pelalawan	9,65	9,46	8,03	1,46

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor real estate yang telah dilakukan dapat diperhatikan bahwa dari tahun 2012 Kabupaten Pelalawan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sektor *real estate* yang cukup tinggi yakni sebesar 9,65% akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 pertumbuhan Kabupaten Pelalawan sebesar 1,46%. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru peningkatan pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 8,51 % akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali hingga sebesar 2,17 %

5.1.13. Sektor Jasa Perusahaan

Adapun input data dalam menganalisis laju pertumbuhan sektor jasa perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.25. PDRB atas harga konstan Sektor Jasa Perusahaan Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	7.942,00	8.664,00	10.425,00	11.130,00	11.508,80
2	Kabupaten Siak	2.346,20	2.520,00	2.729,10	2.823,60	2.855,00
3	Kabupaten Kampar	1.359,90	1.462,50	1.608,00	1.659,20	1.709,70
4	Kabupaten Pelalawan	304,97	323,93	349,32	371,80	380,03
	Jumlah	11.953,07	12.970,43	15.111,42	15.984,60	16.453,53

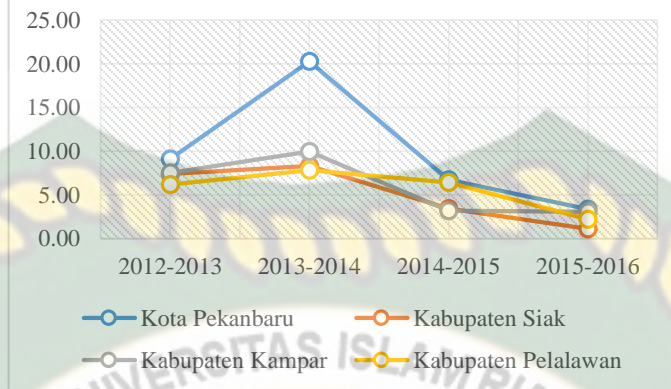
Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

Tabel 5.26. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Perusahaan

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	9,09	20,33	6,76	3,40
2	Kabupaten Siak	7,41	8,30	3,46	1,11
3	Kabupaten Kampar	7,54	9,95	3,18	3,04
4	Kabupaten Pelalawan	6,22	7,84	6,44	2,21

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.13 Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Perusahaan



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor jasa perusahaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan 3 kabupaten/kota lainnya, akan tetapi Kota Pekanbaru mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2013 yaitu sebesar 20,33% akan tetapi pada tahun tahun berikutnya hingga tahun 2016 mengalami penurunan.

5.1.14. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Adapun input data dalam melakukan analisis pertumbuhan ekonomi sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.27. PDRB atas harga konstan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	2.122.171,00	2.189.349,00	2.230.117,00	2.301.539,00	2.285.241,70
2	Kabupaten Siak	456.443,70	483.113,60	493.055,70	513.349,50	515.527,60
3	Kabupaten Kampar	734.510,10	756.655,20	766.088,30	760.539,58	781.992,90
4	Kabupaten Pelalawan	312.278,29	335.744,14	342.845,13	356.521,36	357.321,38
	Jumlah	3.625.403,09	3.764.861,94	3.832.106,13	3.931.949,44	3.940.083,58

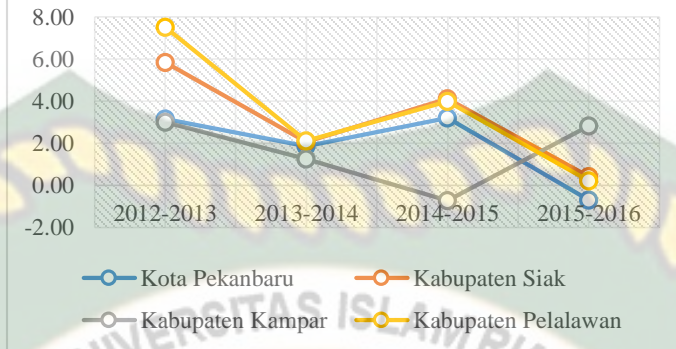
Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

Tabel 5.28. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	3,17	1,86	3,20	-0,71
2	Kabupaten Siak	5,84	2,06	4,12	0,42
3	Kabupaten Kampar	3,01	1,25	-0,72	2,82
4	Kabupaten Pelalawan	7,51	2,12	3,99	0,22

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.14 Tingkat Pertumbuhan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor administasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan pada sektor ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Kampar memiliki angka persentase pertumbuhan tertinggi sebesar 2,82% dan yang terendah terdapat pada Kota Pekanbaru yaitu mengalami penurunan yang signifikan sebesar -0,71 %.

5.1.15. Sektor Jasa Pendidikan

Adapun input data yang digunakan dalam melakukan analisis laju pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.29. PDRB atas harga konstan Sektor Jasa Pendidikan Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	522.696,00	544.852,00	576.026,00	609.550,00	614.294,80
2	Kabupaten Siak	236.314,80	247.186,30	248.271,20	250.118,70	251.810,88
3	Kabupaten Kampar	204.517,50	208.852,70	215.569,70	220.120,80	226.416,30
4	Kabupaten Pelalawan	73.233,76	78.236,41	84.908,28	92.214,35	93.067,46
Jumlah		1.036.762,06	1.079.127,41	1.124.775,18	1.172.003,85	1.185.589,44

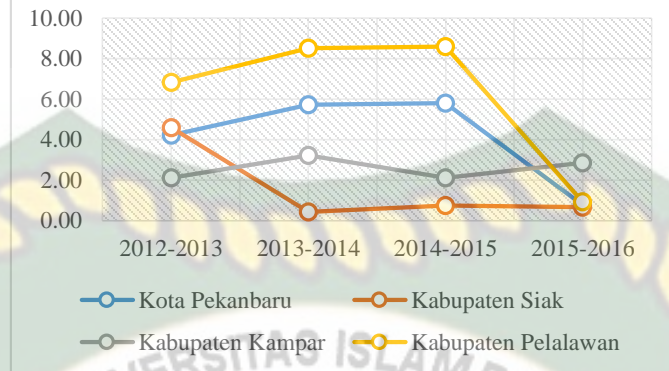
Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

Tabel 5.30. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Pendidikan Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	4,24	5,72	5,82	0,78
2	Kabupaten Siak	4,60	0,44	0,74	0,677
3	Kabupaten Kampar	2,12	3,22	2,11	2,86
4	Kabupaten Pelalawan	6,83	8,53	8,60	0,93

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.15 Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Pendidikan



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor jasa pendidikan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pertumbuhan tertinggi mulai dari tahun 2012 terdapat pada Kabupaten Pelalawan, akan tetapi pada tahun 2016 laju pertumbuhan Kabupaten Pelalawan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,93 % agar lebih jelas perhatikan Gambar 5.15.

5.1.16. Sektor Jasa Kesehatan

Adapun input data dalam melakukan analisis laju pertumbuhan ekonomi sektor jasa kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.31. PDRB atas harga konstan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	207.341,00	227.702,00	249.443,00	276.054,00	287.009,60
2	Kabupaten Siak	81.078,30	86.975,30	93.611,60	102.594,20	103.544,20
3	Kabupaten Kampar	65.344,90	69.805,30	75.139,40	82.164,10	83.104,60
4	Kabupaten Pelalawan	31.770,43	34.192,72	36.601,62	40.247,41	40.420,60
	Jumlah	385.534,63	418.675,32	454.795,62	501.059,71	514.079,00

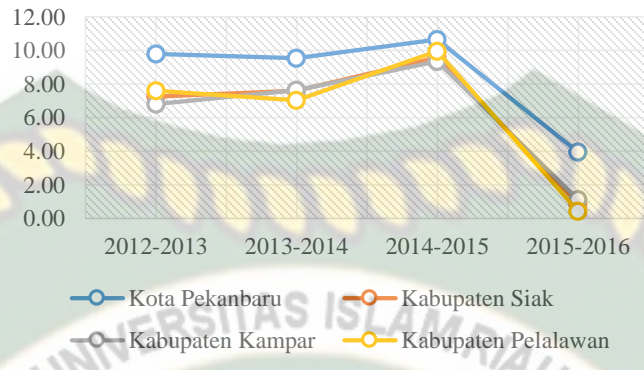
Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

Tabel 5.32. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	9,82	9,55	10,67	3,97
2	Kabupaten Siak	7,27	7,63	9,60	0,93
3	Kabupaten Kampar	6,83	7,64	9,35	1,14
4	Kabupaten Pelalawan	7,62	7,05	9,96	0,43

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.16 Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang dilakukan pada sektor ini dapat di perhatikan Tabel 5.32. Bahwa pada tahun tahun 2015, laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada Kota Pekanbaru dengan laju pertumbuhan 10,67 % akan tetapi pada tahun 2016 laju pertumbuhan Kota Pekanbaru mengalami penurunan sebesar 3,97 %. Sedangkan ketiga kabupaten/kota lainnya juga mengalami penurunan pada tahun 2016 akan tetapi penurunan yang paling signifikan terdapat pada Kabupaten Pelalawan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,43 %

5.1.17. Sektor Jasa Lainnya

Adapun input data yang digunakan dalam melakukan analisis laju pertumbuhan terhadap sektor jasa lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.33. PDRB atas harga konstan Sektor Jasa lainnya Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Pekanbaru	412.144,00	459.053,00	519.261,00	621.289,00	668.772,20
2	Kabupaten Siak	194.672,30	215.091,50	241.777,80	257.351,60	270.553,80
3	Kabupaten Kampar	107.234,60	118.936,90	131.358,60	135.146,20	140.295,00
4	Kabupaten Pelalawan	60.416,48	66.936,32	73.441,54	79.652,21	83.643,03
	Jumlah	774.467,38	860.017,72	965.838,94	1.093.439,01	1.163.264,03

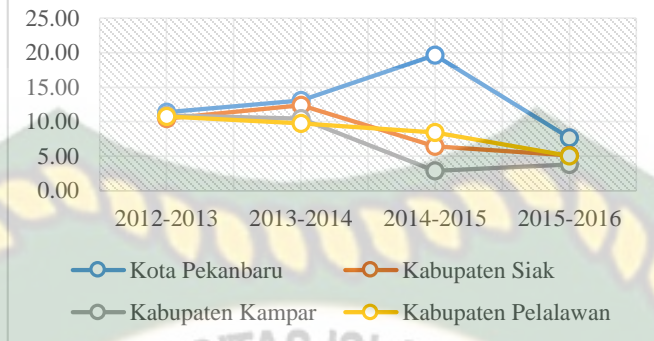
Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

Tabel 5.34. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Jasa lainnya

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Kota Pekanbaru	11,38	13,12	19,65	7,64
2	Kabupaten Siak	10,49	12,41	6,44	5,13
3	Kabupaten Kampar	10,91	10,44	2,88	3,81
4	Kabupaten Pelalawan	10,79	9,72	8,46	5,01

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.17 Tingkat Pertumbuhan Sektor Jasa Lainnya



Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan sektor jasa lainnya yang telah dilakukan ini dapat di ketahui bahwa pada tahun 2012 Wilayah Pekansikawan memiliki laju pertumbuhan yang hampir samir yaitu terletak pada kisaran 10-11% dengan persentase tertinggi di pegang oleh Kota Pekanbaru, dan pada tahun 2015 Kota Pekanbaru mengalami peningkatan laju pertumbuhan hingga 19,65% jauh meninggalkan tiga kabupaten lainnya, akan tetapi pada tahun 2016 laju pertumbuhan Kota Pekanbaru mengalami penurunan hingga sebesar 7,64 % hal ini menjadi tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan ketiga kabupaten lainnya.

5.2. Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah

Analisis Williamson digunakan untuk mengetahui disparitas pembangunan antar daerah, *Indeks Williamson* pada dasarnya melihat PDRB perkapita dan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Tabel 5.35. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2016 Wilayah Pekansikawan

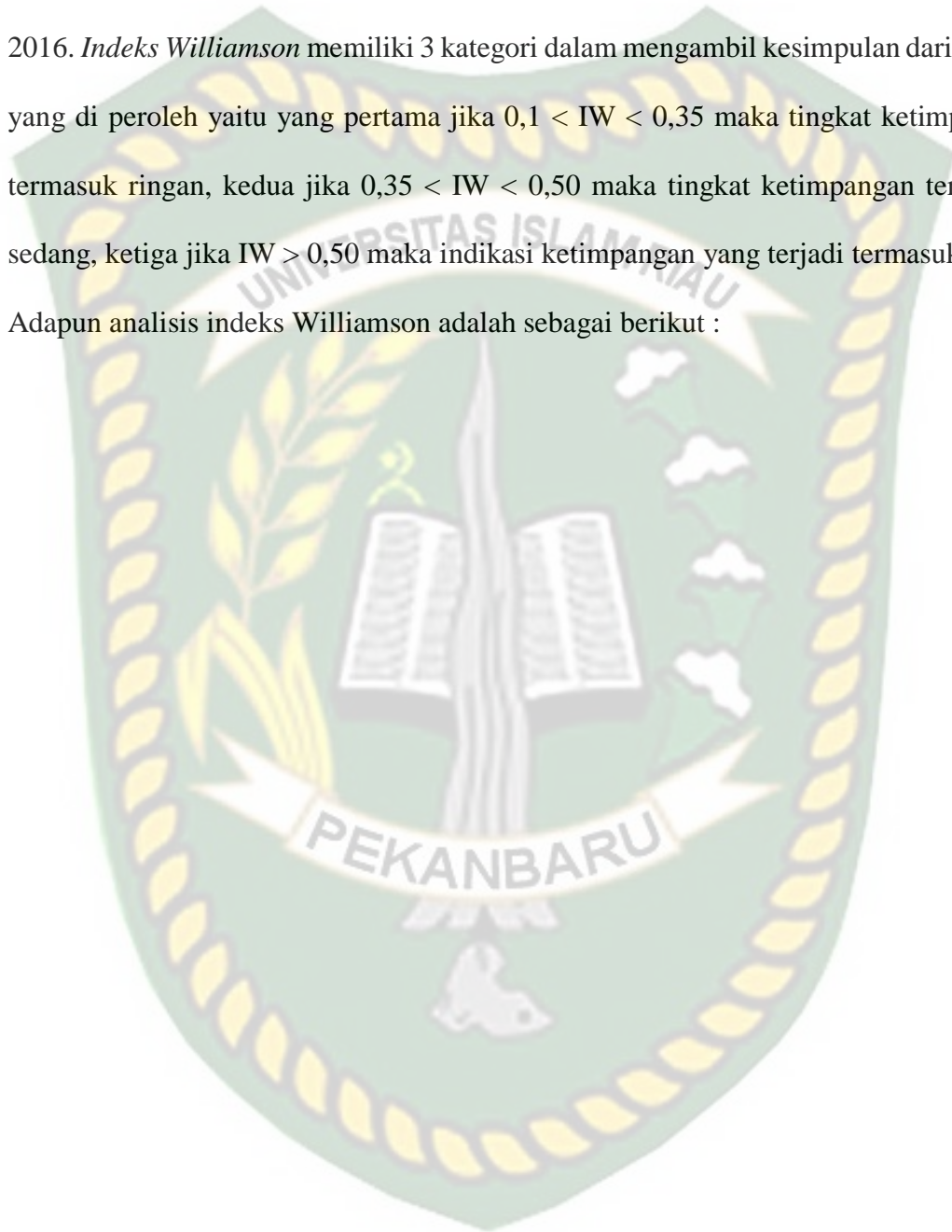
No	Sektor	Kota Pekanbaru		Kabupaten Siak		Kabupaten Kampar		Kabupaten Pelalawan	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.341.806,0	1.509.890,7	13.340.709,1	14.575.403,8	16.483.570,8	18.200.031,4	15.101.167,0	16.089.030,0
2	Pertambangan dan Penggalian	16.235,7	18.995,7	30.039.629,2	28.813.396,9	25.993.640,1	25.737.541,3	1.164.739,0	1.075.782,0
3	Industri Pengolahan	16.703.456,0	18.415.590,6	26.896.773,5	27.933.455,2	14.565.372,3	15.572.002,1	19.194.976,0	20.143.880,9
4	Pengadaan Listrik dan Gas	148.091,0	183.141,7	4.835,1	6.032,7	28.328,6	34.422,1	9.158,0	12.776,3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.351,0	14.293,5	2.702,8	2.822,2	3.545,5	3.626,7	2.695,0	2.728,7
6	Konstruksi	24.763.478,0	27.433.830,1	3.218.294,5	3.591.254,9	4.305.275,8	4.795.219,9	843.015,0	944.146,2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.520.355,0	27.348.384,0	1.414.083,1	1.562.041,6	2.067.904,4	2.277.153,5	1.342.619,0	1.263.680,8
8	Transportasi dan Pergudangan	2.105.083,0	2.345.294,0	74.928,4	81.319,4	183.861,0	202.868,3	91.113,0	95.292,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.819.509,0	1.941.720,1	33.007,0	36.029,2	52.190,3	58.917,2	72.019,0	79.028,5

No	Sektor	Kota Pekanbaru		Kabupaten Siak		Kabupaten Kampar		Kabupaten Pelalawan	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
10	Informasi dan Komunikasi	1.818.250,0	1.942.350,4	150.848,2	160.717,4	246.012,9	253.597,9	184.395,0	195.801,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.971.439,0	3.286.316,9	264.946,9	274.767,3	260.466,0	283.089,5	206.117,0	232.117,4
12	Real Estate	2.404.178,0	2.588.250,6	303.008,4	324.228,3	594.528,0	645.802,4	241.798,0	259.680,9
13	Jasa Perusahaan	15.366,0	16.756,4	4.089,5	4.349,2	2.158,4	2.366,9	476,0	517,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.751.629,0	2.836.779,4	600.349,2	619.670,5	907.456,1	961.778,4	435.114,0	449.989,3
15	Jasa Pendidikan	956.881,0	1.032.542,5	372.611,5	393.146,9	299.403,8	330.228,1	130.841,0	138.629,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	408.610,0	447.501,3	146.885,9	153.569,2	115.990,6	124.707,6	57.420,0	59.966,2
17	Jasa lainnya	904.613,0	1.019.959,8	367.749,4	411.177,1	175.460,2	191.305,8	113.603,0	122.543,7
Jumlah		71.433.379,7	79.213.156,4	75.026.977,7	76.603.772,0	63.685.703,8	66.883.798,6	37.823.516,0	39.708.362,0

Sumber : BPS Prov. Riau, 2017

5.2.1. Indeks Williamson

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan melihat data PDRB perkapita dan jumlah penduduk Wilayah Pekansikawan pada tahun 2012 hingga tahun 2016. *Indeks Williamson* memiliki 3 kategori dalam mengambil kesimpulan dari indeks yang di peroleh yaitu yang pertama jika $0,1 < IW < 0,35$ maka tingkat ketimpangan termasuk ringan, kedua jika $0,35 < IW < 0,50$ maka tingkat ketimpangan termasuk sedang, ketiga jika $IW > 0,50$ maka indikasi ketimpangan yang terjadi termasuk berat. Adapun analisis indeks Williamson adalah sebagai berikut :



Tabel 5.36 Indeks Williamson Wilayah Pekansikawan Tahun 2012

No	Wilayah	JP	PDRB	PDRB/Kapita	Perhitungan			$(Y_i - Y)^2 \times f_i / n$
		(f_i)		(Y_i)	($Y_i - Y$)	($Y_i - Y$) ²	f_i / n	
1	Kota Pekanbaru	958.352	55.694.030,00	58,114	-42,634	1817,660	0,163	296,296
2	Kab. Siak	404.093	79.305.439,51	196,255	95,507	9121,589	0,069	626,961
3	Kab. Kampar	733.506	46.394.709,23	63,251	-37,498	1406,084	0,125	175,430
4	Kab. Pelalawan	339.869	29.015.705,84	85,373	-15,375	236,397	0,058	13,666
	(n)	5.879.109	344.350.769,00	100,748	Total			1112,353
				(Y)				33,351
Indeks Williamson								0,331

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel 5.37 Indeks Williamson Wilayah Pekansikawan Tahun 2013

No	Wilayah	JP	PDRB	PDRB/Kapita	Perhitungan			$(Y_i - Y)^2 \times f_i / n$
		(f_i)		(Y_i)	($Y_i - Y$)	($Y_i - Y$) ²	f_i / n	
1	Kota Pekanbaru	984.674	60.494.474,00	61,436	-45,358	2057,374	0,163	335,779
2	Kab. Siak	416.298	82.131.737,43	197,291	90,496	8189,599	0,069	565,086
3	Kab. Kampar	753.376	61.517.521,33	81,656	-25,139	631,946	0,125	78,911
4	Kab. Pelalawan	358.210	31.090.747,40	86,795	-20,000	399,983	0,059	23,748
	(n)	6.033.268	372.046.816,87	106,794	Total			1003,524
				(Y)				31,678
Indeks Williamson								0,297

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel 5.38 Indeks Williamson Wilayah Pekansikawan Tahun 2014

No	Wilayah	JP	PDRB	PDRB/Kapita	Perhitungan			$(Y_i - Y)^2 \times f_i / n$
		(f_i)		(Y_i)	($Y_i - Y$)	($Y_i - Y$) ²	f_i / n	
1	Kota Pekanbaru	1.011.467	73.843.233,00	73,006	-41,167	1694,684	0,163	276,987
2	Kab. Siak	428.499	85.737.536,11	200,088	85,915	7381,465	0,069	511,106
3	Kab. Kampar	773.171	68.818.923,99	89,009	-25,164	633,224	0,125	79,114
4	Kab. Pelalawan	377.221	35.680.440,86	94,588	-19,585	383,571	0,061	23,381
	(n)	6.188.442	436.463.385,97	114,173	Total			890,587
				(Y)				29,842
Indeks Williamson								0,261

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel 5.39 Indeks Williamson Wilayah Pekansikawan Tahun 2015

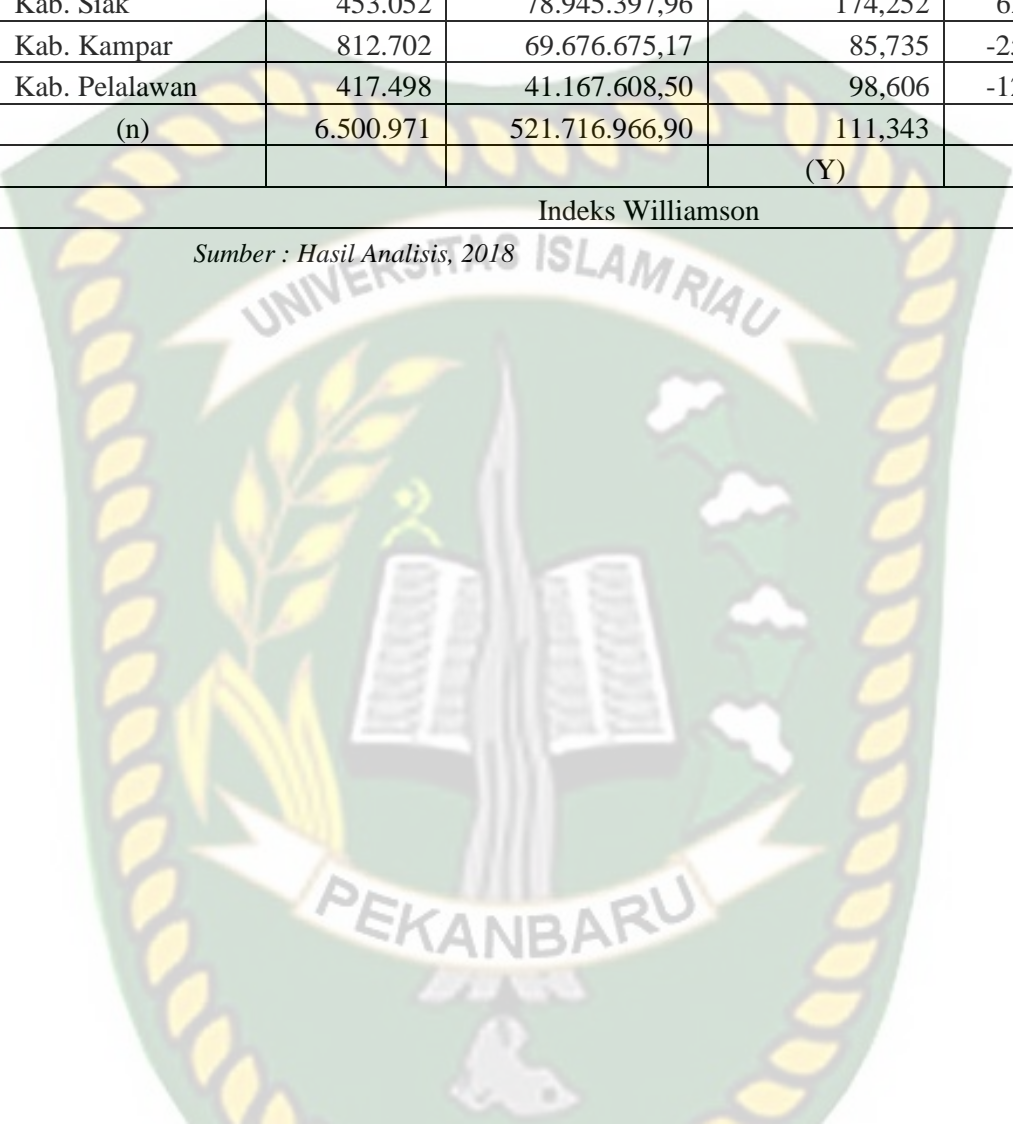
No	Wilayah	JP	PDRB	PDRB/Kapita	Perhitungan			$(Y_i - Y)^2 \times f_i / n$
		(f_i)		(Y_i)	($Y_i - Y$)	($Y_i - Y$) ²	f_i / n	
1	Kota Pekanbaru	1.038.118	83.664.346,00	80,592	-28,932	837,068	0,164	136,967
2	Kab. Siak	440.841	77.237.466,69	175,205	65,680	4313,909	0,069	299,752
3	Kab. Kampar	793.005	66.275.069,83	83,575	-25,950	673,396	0,125	84,170
4	Kab. Pelalawan	396.990	39.193.280,00	98,726	-10,798	116,604	0,063	7,296
	(n)	6.344.402	481.425.175,76	109,524	Total			528,185
				(Y)				22,982
Indeks Williamson								0,210

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel 5.40 Indeks Williamson Wilayah Pekansikawan Tahun 2016

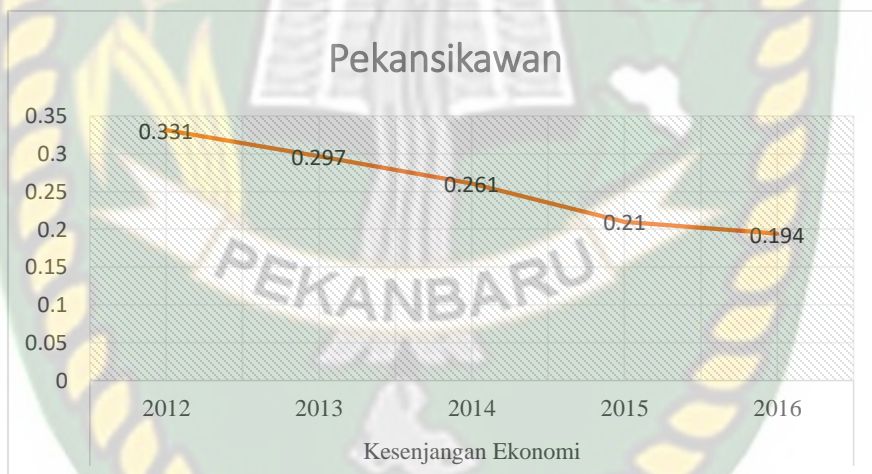
No	Wilayah	JP	PDRB	PDRB/Kapita	Perhitungan			$(Y_i - Y)^2 \times f_i / n$
		(f_i)		(Y_i)	($Y_i - Y$)	($Y_i - Y$) ²	f_i / n	
1	Kota Pekanbaru	1.064.566	92.383.613,70	86,781	-24,563	603,327	0,164	98,798
2	Kab. Siak	453.052	78.945.397,96	174,252	62,909	3957,559	0,070	275,802
3	Kab. Kampar	812.702	69.676.675,17	85,735	-25,609	655,804	0,125	81,984
4	Kab. Pelalawan	417.498	41.167.608,50	98,606	-12,738	162,250	0,064	10,420
	(n)	6.500.971	521.716.966,90	111,343	Total			467,003
				(Y)				21,610
Indeks Williamson								0,194

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Berdasarkan hasil analisis yang telah di telah di lakukan dapat diperhatikan pada tabel 5.40 bahwa angka *Indeks Williamson* yang diperoleh pada tahun 2016 adalah sebesar 0,194 yang artinya *Indeks Williamson* memasuki kategori yang pertama yaitu tingkat kesenjangan ekonomi wilayah termasuk ringan.

Berdasarkan kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat di tarik kesimpulan disparitas yang terjadi pada Wilayah Pekansikawan pada kurun waktu 5 tahun cenderung menurun hal ini ditunjukkan pada indeks Williamson pada tahun 2012 sebesar 0,331 dan pada tahun 2016 *Indeks Williamson* menunjukkan angka 0,194 berdasar kategori *Indeks Williamson* pada Wilayah Pekansikawan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 disparitas yang terjadi termasuk kedalam kategori ringan.



Sumber : Hasil Analisis, 2018

Gambar 5.18 Disparitas Ekonomi Wilayah Tahun 2012-2016

5.3 Analisis Pola Disparitas Ekonomi Wilayah

Pada analisis pola disparitas ekonomi wilayah peneliti menggunakan analisis *Tipologi Klassen* dan dibantu menggunakan *SPSS* dalam mengetahui pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Kemudian menggunakan analisis deskriptif guna melihat pola disparitas wilayah yang terjadi di Wilayah Pekansikawan. Adapun input data yang digunakan dalam *Tipologi Klassen* menggunakan data PDRB yang di peroleh dari BPS Provinsi Riau. Adapun input data yang digunakan adalah sebagai berikut :



Tabel 5.40. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kota Pekanbaru

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,94	1,53
2	Pertambangan dan Penggalian	2,43	0,02
3	Industri Pengolahan	6,87	22,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,87	0,22
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,45	0,02
6	Konstruksi	7,17	28,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,87	27,95
8	Transportasi dan Pergudangan	3,72	2,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,18	1,72
10	Informasi dan Komunikasi	5,07	2,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,36	3,85
12	Real Estate	2,17	2,87
13	Jasa Perusahaan	3,41	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,71	3,74
15	Jasa Pendidikan	0,78	1,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,97	0,47
17	Jasa lainnya	7,64	1,10

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel 5.41. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Siak

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,27	21,30
2	Pertambangan dan Penggalian	-4,26	27,68
3	Industri Pengolahan	1,52	41,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16,30	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,004
6	Konstruksi	3,21	4,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,36	1,92
8	Transportasi dan Pergudangan	3,00	0,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	0,04
10	Informasi dan Komunikasi	2,74	0,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	0,38
12	Real Estate	2,05	0,43
13	Jasa Perusahaan	1,11	0,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,42	1,00
15	Jasa Pendidikan	0,68	0,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,20
17	Jasa lainnya	5,13	0,52

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel 5.42. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Kampar

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,92	28,72
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,73	29,03
3	Industri Pengolahan	4,23	27,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,55	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,76	0,01
6	Konstruksi	4,07	6,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,84	3,05
8	Transportasi dan Pergudangan	5,50	0,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,25	0,08
10	Informasi dan Komunikasi	2,03	0,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	0,47
12	Real Estate	1,43	0,96
13	Jasa Perusahaan	3,04	0,004
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,06	1,64
15	Jasa Pendidikan	2,86	0,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	0,17
17	Jasa lainnya	3,81	0,29

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel 5.43. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Pelalawan

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,55	37,04
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,34	2,11
3	Industri Pengolahan	3,27	51,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18,43	0,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,42	0,01
6	Konstruksi	4,02	2,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,66	2,64
8	Transportasi dan Pergudangan	3,16	0,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,60	0,16
10	Informasi dan Komunikasi	4,64	0,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,60	0,54
12	Real Estate	1,46	0,62
13	Jasa Perusahaan	2,21	0,001
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,22	1,16
15	Jasa Pendidikan	0,93	0,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,43	0,13
17	Jasa lainnya	5,01	0,27

Sumber : Hasil Analisis, 2018

5.3.1 Analisis Pola Disparitas Ekonomi antar sektor Kota Pekanbaru

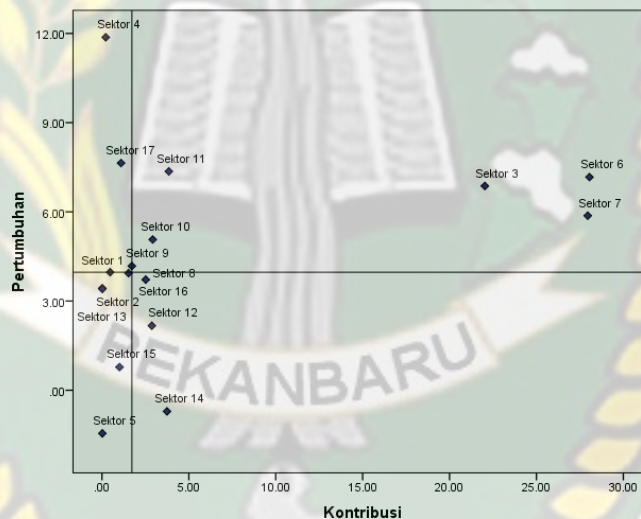
Berdasarkan input data yang telah dijelaskan sebelumnya dalam menganalisis pola disparitas ekonomi wilayah. Pola dan struktur disparitas ekonomi yang terjadi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 5.44. Tabel Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Pekanbaru

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				√
2	Pertambangan dan Penggalian			√	
3	Industri Pengolahan			√	
4	Pengadaan Listrik dan Gas		√		
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		√		
6	Konstruksi	√			
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	√			
8	Transportasi dan Pergudangan	√			
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	√			
10	Informasi dan Komunikasi	√			
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	√			
12	Real Estate	√			

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
13	Jasa Perusahaan	√			
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		√		
15	Jasa Pendidikan	√			
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	√			
17	Jasa lainnya	√			

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Sumber: Olah Data Menggunakan SPSS

Gambar 5.1 Diagram Pola Disparitas Ekonomi Antar Sektor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan menggunakan SPSS diatas dapat di peroleh informasi berupa diagram pola disparitas antar sektor pada Kota Pekanbaru, yakni terlihat bahwa pada Kota Pekanbaru memiliki tiga sektor yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu terdapat pada sektor 3 (Industri Pengolahan), sektor 6 (Konstruksi) dan sektor 7 (Perdagangan Besar dan Eceran). Sehingga semakin tingginya kontribusi dan pertumbuhan pada ketiga sektor ini menyebabkan ketertinggalan dan menyebabkan ketimpangan.



5.3.2 Analisis Pola Disparitas Ekonomi antar sektor Kabupaten Siak

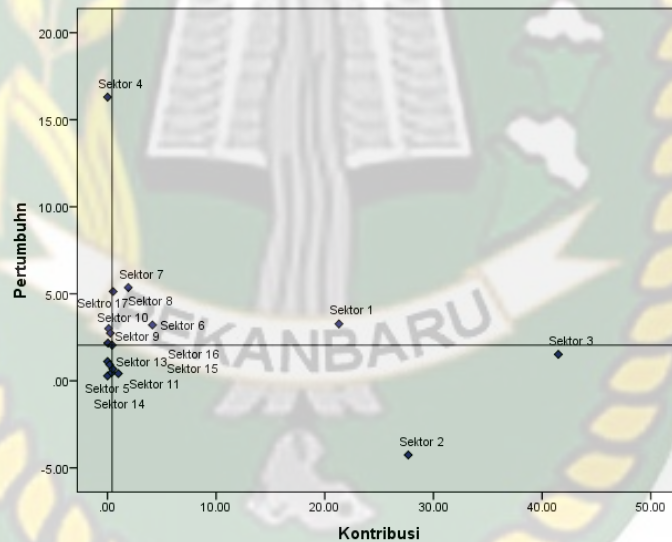
Berdasarkan input data yang telah dijelaskan sebelumnya dalam menganalisis pola disparitas ekonomi wilayah. Adapun pola dan struktur kesenjangan ekonomi yang terjadi Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Tabel 5.45 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Siak

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				√
2	Pertambangan dan Penggalian		√		
3	Industri Pengolahan		√		
4	Pengadaan Listrik dan Gas			√	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang			√	
6	Konstruksi				√
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			√	
8	Transportasi dan Pergudangan				√
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				√
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi				√
12	Real Estate			√	

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
13	Jasa Perusahaan		√		
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			√	
15	Jasa Pendidikan		√		
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	√			
17	Jasa lainnya		√		

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2017

Gambar 5.2. Diagram Pola Disparitas Ekonomi Antar Sektor Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS terhadap Kabupaten Siak diperoleh diagram pola kesenjangan antar sektor di Kabupaten Siak yakni terdapat 2 sektor yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang cukup baik dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Siak, dapat di perhatikan pada diagram 5.2 bahwa sektor 1 (Pertanian , Kehutanan dan Perikanan) dan sektor 3 (Industri Pengolahan) memiliki kontribusi yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, diantara kedua sektor ini pada sektor 3 memiliki kontribusi paling tinggi akan tetapi pada sektor ini memiliki pertumbuhan yang rendah berbeda halnya dengan sektor 1 yang memiliki kontribusi yang cukup baik dan pertumbuhan yang cukup baik pula.



5.3.3 Analisis Pola Disparitas Ekonomi antar sektor Kabupaten Kampar

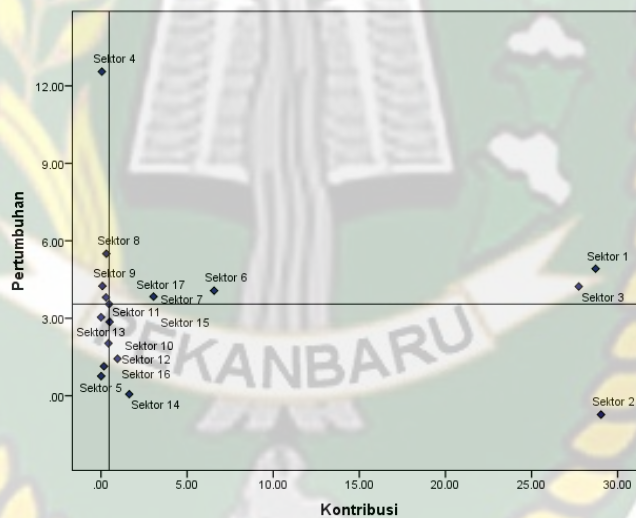
Berdasarkan input data yang telah dijelaskan sebelumnya dalam menganalisis pola disparitas ekonomi wilayah. Adapun pola dan struktur disparitas ekonomi yang terjadi Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel 5.46. Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Kampar

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	√			
2	Pertambangan dan Penggalian	√			
3	Industri Pengolahan				√
4	Pengadaan Listrik dan Gas				√
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang				√
6	Konstruksi				√
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				√
8	Transportasi dan Pergudangan			√	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			√	
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi				√
12	Real Estate		√		

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
13	Jasa Perusahaan			√	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			√	
15	Jasa Pendidikan			√	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial			√	
17	Jasa lainnya				√

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2017

Gambar 5.3. Diagram Pola Disparitas Ekonomi Antar Sektor Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS yang telah dilakukan pada Kabupaten Kampar diperoleh diagram pola disparitas antar sektor pada Kabupaten Kampar yaitu dapat diperhatikan pada diagram 5.3 bahwa pada Kabupaten Kampar terdapat 3 sektor yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang cukup baik dalam meningkatkan ekonomi yaitu pada sektor 1 (pertanian, kehutanan dan perikanan), sektor 2 (pertambangan dan penggalian), Sektor 3 (industri pengolahan). Akan tetapi pada sektor 2 yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian tidak mengalami pertumbuhan yang artinya pertumbuhan ekonomi pada sektor 2 dibawah 0 atau minus dan dapat diperhatikan juga ketiga sektor ini meninggalkan sektor lainnya sehingga terjadinya adanya ketimpangan.

5.3.4 Analisis Pola Disparitas Ekonomi antar sektor Kabupaten Pelalawan

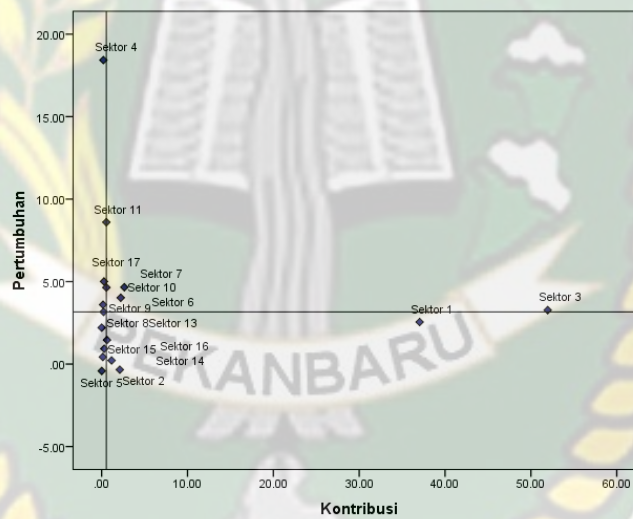
Berdasarkan input data yang telah dijelaskan sebelumnya dalam menganalisis pola kesenjangan ekonomi wilayah. Adapun pola dan struktur kesenjangan ekonomi yang terjadi Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.47. Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Pelalawan

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		√		
2	Pertambangan dan Penggalian			√	
3	Industri Pengolahan		√		
4	Pengadaan Listrik dan Gas			√	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang			√	
6	Konstruksi				√
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				√
8	Transportasi dan Pergudangan			√	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			√	
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi			√	
12	Real Estate				√

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
13	Jasa Perusahaan				√
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			√	
15	Jasa Pendidikan			√	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				√
17	Jasa lainnya				√

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2017

Gambar 5.4. Diagram Pola Disparitas Ekonomi Antar Sektor Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS yang telah dilakukan pada Kabupaten Pelalawan adalah diperoleh diagram pola kesenjangan antar sektor yakni dapat diperhatikan pada diagram diatas bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki 2 sektor yang cukup baik dalam meningkatkan perekonomian daerah yaitu terdapat pada sektor 3 (Industri Pengolahan) dan Sektor 1 (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) akan tetapi jika dibandingkan dengan sektor lainnya memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang cukup rendah sehingga antara sektor 1 dan 3 jauh meninggalkan sektor lainnya sehingga terlihat adanya ketimpangan.

5.3.5 Analisis Pola Disparitas Ekonomi Wilayah Pekansikawan

Adapun input data yang digunakan dalam Tipologi Klassen antar wilayah menggunakan data PDRB yang di peroleh dari BPS Provinsi Riau yang telah diolah oleh peneliti untuk mendapatkan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota. Adapun input data yang digunakan adalah sebagai berikut

Tabel 5.48 Tabel Input Data Tipologi Klassen Antar Wilayah Pekansikawan

No	Kabupaten/Kota	PDRB per kapita	Laju Pertumbuhan
1	Pekanbaru	53,81	26,25
2	Kab. Siak	126,81	9,73
3	Kab. Kampar	58,36	14,25
4	Kab. Pelalawan	75,60	18,28
	Provinsi Riau	55,79	18,23

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan input data diatas diperoleh klasifikasi masing-masing wilayah dengan kategori wilayah yang berkembang cepat dan wilayah yang cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Adapun klasifikasi Wilayah Pekansikawan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.50 Klasifikasi Wilayah Pekansikawan

No	Wilayah	Klasifikasi			
		Wilayah Maju dan Tumbuh Cepat	Wilayah Maju Tapi Tertekan	Wilayah Berkembang Cepat	Wilayah Relatif Tertinggal
1	Kota Pekanbaru			√	
2	Kabupaten Siak		√		
3	Kabupaten Kampar		√		
4	Kabupaten Pelalawan	√			

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan Tabel 5.50 untuk Kota Pekanbaru termasuk kedalam klasifikasi wilayah berkembang cepat dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki PDRB perkapita yang rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau.

Sedangkan untuk Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar termasuk kedalam klasifikasi wilayah maju tapi tertekan diakarenakan PDRB perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan laju pertumbuhan yang rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan termasuk kedalam klasifikasi wilayah maju dan tumbuh cepat dikarenakan memiliki PDRB perkapita yang lebih tinggi dari provinsi dan laju pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui pola disparitas masing-masing sektor, sehingga dengan menggunakan alat bantu Arc GIS pola disparitas pada masing-masing wilayah dapat ditampilkan kedalam sebuah peta. Peta pola disparitas ekonomi wilayah Pekansikawan disajikan kedalam satu peta yang mewakili satu sektor pola disparitas ekonomi wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar 5.23 hingga Gambar 5.39 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 1



Berdasarkan gambar 5.23 diatas dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan tiga wilayah dengan klasifikasi yang sama dan satu wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yakni sebesar 1,53 dibandingkan dengan propinsi sebesar 24,68 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih rendah yakni sebesar 3,94 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 3,98.

Kabupaten Siak termasuk ke dalam Sektor Relatif Tertinggal dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 21,30 dibandingkan dengan provinsi sebesar 24,68 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 3,27 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 3,98

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor maju dan tumbuh cepat dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yaitu 28,72 dibandingkan dengan propinsi sebesar 24,68 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 4,92 dibandingkan laju pertumbuhan provinsi sebesar 3,98

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yaitu 37,04 dibandingkan dengan propinsi sebesar 24,68 serta laju pertumbuhan Kabupaten

Kampar lebih rendah yaitu sebesar 2,55 dibandingkan laju pertumbuhan provinsi sebesar 3,98

Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi yang tertinggi yaitu 37,04 jika dibandingkan dengan Kota Pekanbaru yang hanya memiliki 1,53 akan tetapi jarak kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tidak terlalu jauh yaitu Kabupaten Siak dengan kontribusi 21,30 dan Kabupaten Kampar dengan kontribusi 28,72.

Sedangkan untuk sektor penggalian dan pertambangan berdasarkan analisis yang telah di lakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.24 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 2



Berdasarkan Gambar 5.24 diatas dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor pertambangan dan penggalian pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yakni sebesar 0,02 dibandingkan dengan provinsi sebesar 22,65 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 2,43 dibandingkan laju pertumbuhan provinsi dengan pertumbuhan -4,22.

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah tinggi 27,68 dibandingkan dengan propinsi sebesar 22,65 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar -4,26 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar -4,22

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor maju dan tumbuh cepat dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yaitu 29,03 dibandingkan dengan propinsi sebesar 22,65 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar -0,73 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar -4,22

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 2,11 dibandingkan dengan propinsi sebesar 22,65 serta laju pertumbuhan Kabupaten

Kampar lebih tinggi yaitu sebesar -0,34 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar -4,22

Kabupaten Kampar memiliki angka kontribusi tertinggi yaitu sebesar 29,03 sehingga jauh meninggalkan Kota Pekanbaru yang hanya memiliki kontribusi 0,02 yang artinya antara Kabupaten Kampar mengalami indikasi disparitas yang cukup jauh dibandingkan dengan Kota Pekanbaru pada sektor pertambangan dan penggalian akan tetapi untuk Kabupaten Siak disparitas tidak terlalu jauh karena Kabupaten Siak memiliki kontribusi sebesar 27,68.

Sedangkan untuk sektor industri pengolahan berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.25 sebagai berikut :

PETA SEKTOR 3



Berdasarkan Gambar 5.25 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor industri pengolahan pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yakni sebesar 22,02 dibandingkan dengan propinsi sebesar 28,91 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 6,87 dibandingkan laju pertumbuhan provinsi dengan pertumbuhan 4,61

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi 41,49 dibandingkan dengan propinsi sebesar 28,91 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 1,52 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,61

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 27,74 dibandingkan dengan propinsi sebesar 28,91 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 4,23 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,61

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 51,95 dibandingkan dengan propinsi sebesar 28,91 serta laju pertumbuhan Kabupaten

Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 3,27 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,61

Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi paling besar yaitu 51,95 sehingga meninggalkan Kota Pekanbaru serta dua Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Siak dengan Kontribusi 41,49 dan Kabupaten Kampar dengan kontribusi 27,74. Indikasi disparitas yang cukup tinggi terjadi pada Kabupaten Pelalawan yang jauh meninggalkan Kota Pekanbaru yang hanya memiliki kontribusi 22,02.

Sedangkan untuk sektor pengadaan listrik dan gas berdasarkan analisis yang telah di lakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.26 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 4



Berdasarkan gambar 5.26 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor pengadaan listrik dan gas pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 0,21 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,06 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih rendah yakni sebesar 11,87 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 13,52

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah rendah 0,01 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,06 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih tinggi yaitu sebesar 16,30 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 13,52

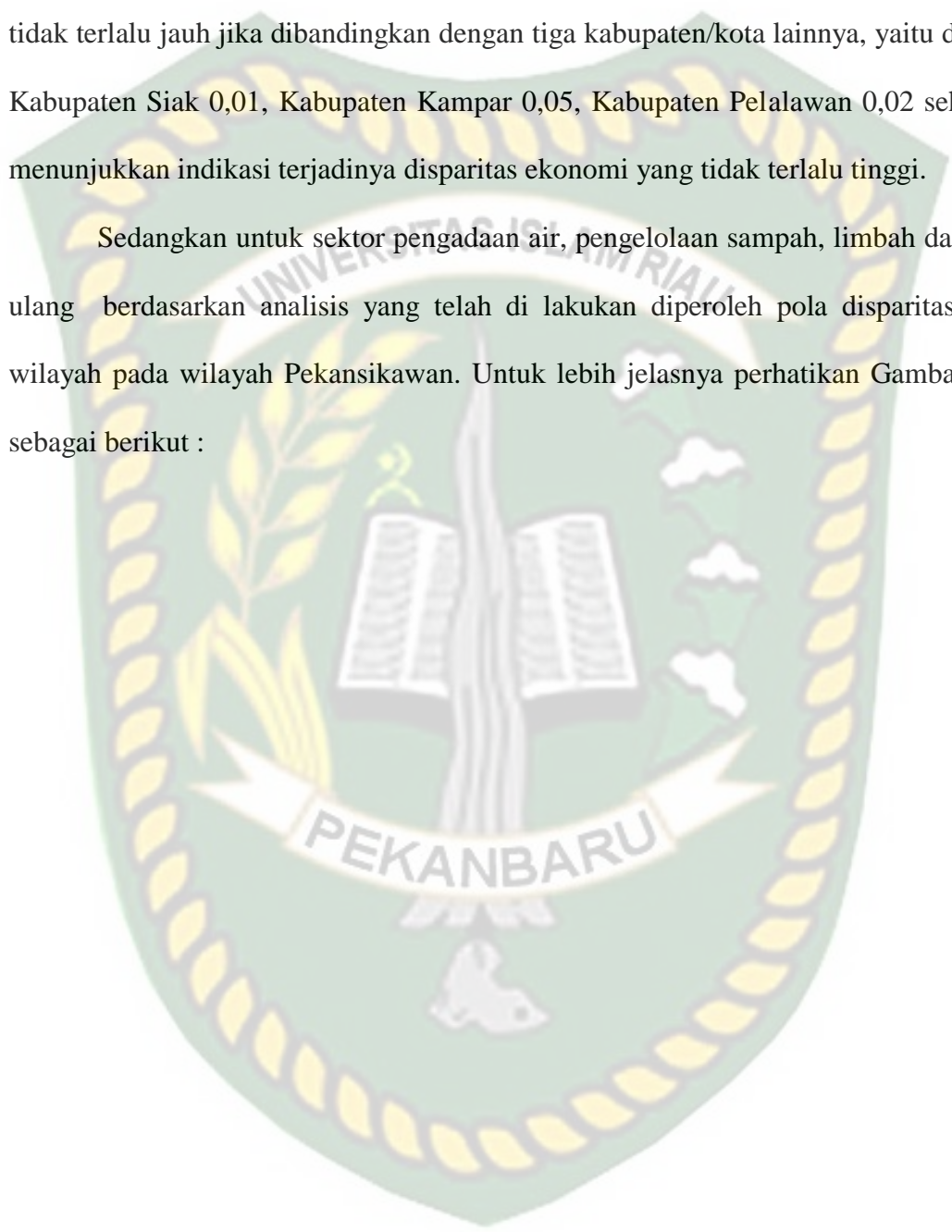
Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,05 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,06 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 12,55 dibandingkan laju pertumbuhan provinsi sebesar 13,52

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,02 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,06 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar

lebih tinggi yaitu sebesar 18,43 dibandingkan laju pertumbuhan provinsi sebesar 13,52

Kota Pekanbaru dengan Kontribusi 0,21 dan laju pertumbuhan 11,87 hal ini tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan tiga kabupaten/kota lainnya, yaitu dengan Kabupaten Siak 0,01, Kabupaten Kampar 0,05, Kabupaten Pelalawan 0,02 sehingga menunjukkan indikasi terjadinya disparitas ekonomi yang tidak terlalu tinggi.

Sedangkan untuk sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang berdasarkan analisis yang telah di lakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.27 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 5



Berdasarkan gambar 5.27 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 0,02 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,01 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih rendah yakni sebesar -1,45 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan -0,45

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah rendah 0,004 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,01 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih tinggi yaitu sebesar 0,28 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar -0,45

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,006 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,01 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar -0,76 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar -0,45

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,007 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,01 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar -0,42 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar -0,45

Kota Pekanbaru dengan Kontribusi 0,02 dan laju pertumbuhan -1,45 hal ini tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan tiga kabupaten/kota lainnya, yaitu dengan Kabupaten Siak 0,004, Kabupaten Kampar 0,006, Kabupaten Pelalawan 0,007.

Sedangkan untuk sektor konstruksi berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.28 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 6



Berdasarkan gambar 5.28 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor konstruksi pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan tiga wilayah dengan klasifikasi yang sama dan satu wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan cepat tumbuh dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 28,04 dibandingkan dengan propinsi sebesar 7,17 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 11,87 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 4,92

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah rendah 4,14 dibandingkan dengan propinsi sebesar 7,17 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 3,21 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,92

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 6,57 dibandingkan dengan propinsi sebesar 7,17 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 4,07 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,92

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 2,22 dibandingkan dengan propinsi sebesar 7,17 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 4,02 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,92

Kota Pekanbaru dengan Kontribusi 28,04 dan laju pertumbuhan 11,87 jauh meninggalkan tiga kabupaten/kota lainnya, yaitu dengan Kabupaten Siak 4,14, Kabupaten Kampar hanya 6,57, Kabupaten Pelalawan 2,22.

Sedangkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.29 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 7



Berdasarkan Gambar 5.29 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor perdagangan besar dan eceran pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan cepat tumbuh dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 27,95 dibandingkan dengan propinsi sebesar 8,87 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 5,87 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 4,88

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah 1,92 dibandingkan dengan propinsi sebesar 8,87 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih tinggi yaitu sebesar 5,36 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,88

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 3,05 dibandingkan dengan propinsi sebesar 8,87 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 3,84 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,88

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 2,64 dibandingkan dengan propinsi sebesar 8,87 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 4,66 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,88

Kota Pekanbaru dengan Kontribusi 27,95 dan laju pertumbuhan 5,87 jauh meninggalkan tiga kabupaten kota lainnya, akan tetapi untuk Kabupaten Siak memiliki laju pertumbuhan yang tidak terlalu jauh dari laju pertumbuhan kota pekanbaru yaitu sebesar 5,36

Sedangkan untuk sektor transportasi dan pergudangan berdasarkan analisis yang telah di lakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.30 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 8



Berdasarkan Gambar 5.30 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor transportasi dan pergudangan pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan berkembang cepat dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 2,52 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,85 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 3,72 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 3,06.

Kabupaten Siak termasuk ke dalam Sektor Relatif Tertinggal dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,11 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,85 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 3,00 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 3,06

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,31 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,85 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 5,50 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 3,06

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,22 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,85 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 3,16 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 3,06

Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sebesar 2,52 dan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan yang memiliki kontribusi yang tidak mencapai 1

Sedangkan untuk sektor penyediaan akomodasi makan dan minum berdasarkan analisis yang telah di lakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.31 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 9



Berdasarkan Gambar 5.31 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan berkembang cepat dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 1,72 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,45 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 4,18 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 3,17

Kabupaten Siak termasuk ke dalam Sektor Relatif Tertinggal dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,04 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,45 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 2,17 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 3,17

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,08 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,45 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 4,25 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 3,17

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,16 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,45 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 3,60 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 3,17

Kota Pekanbaru memiliki angka kontribusi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 1,72 hal ini cukup mengakibatkan disparitas dikarenakan kontribusi Kabupaten Siak hanya 0,04, Kabupaten Kampar hanya 0,08 dan Kabupaten Pelalawan 0,16,

Sedangkan untuk sektor informasi dan komunikasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.32 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 10



Berdasarkan Gambar 5.32 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor informasi dan komunikasi pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan tiga wilayah dengan klasifikasi yang sama dan satu wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan berkembang cepat dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 2,92 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,85 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 5,07 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 4,95

Kabupaten Siak termasuk ke dalam Sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,27 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,85 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 2,74 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,95

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,43 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,85 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 2,03 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,95

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,55 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,85 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 4,64 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 4,95

Kota Pekanbaru memiliki Kontribusi sektor tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 2,92 sedangkan ketiga kabupaten/kota lainnya hanya sebesar 0,27 dan 0,43 serta 0,55 sehingga sudah jelas menimbulkan disparitas pada masing-masing wilayah meskipun tidak terlalu tinggi.

Sedangkan untuk sektor jasa keuangan dan asuransi berdasarkan analisis yang telah di lakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.33 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 11



Berdasarkan Gambar 5.33 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor jasa keuangan dan asuransi pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan berkembang cepat dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 3,85 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,98 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 7,36 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 5,65

Kabupaten Siak termasuk ke dalam Sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,38 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,98 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 0,47 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 5,65

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,47 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,98 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 3,55 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 5,65

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,54 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,98 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 8,60 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 5,65

Kota Pekanbaru memiliki Kontribusi terbesar yaitu sebesar 3,85 sehingga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya terdapat disparitas antar wilayah dikarenakan Kabupaten Siak hanya memiliki kontribusi 0,98 dan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi 0,47 serta Kabupaten Pelalawan hanya memiliki kontribusi sebesar 0,54 akan tetapi memiliki laju pertumbuhan sebesar 8,60.

Sedangkan untuk sektor real estate berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.34 sebagai berikut



PETA SEKTOR 12



Berdasarkan Gambar 5.34 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor real estate pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan klasifikasi yang berbeda pada setiap kabupaten/kota,

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan berkembang cepat dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 2,87 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,89 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 2,17 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 1,52

Kabupaten Siak termasuk ke dalam Sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,43 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,89 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih tinggi yaitu sebesar 2,05 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 1,52

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yaitu 0,96 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,89 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 1,43 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 1,52

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,62 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,89 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 1,46 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 1,52

Kota Pekanbaru memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 2,87 jika dibandingkan dengan ketiga kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Pekansikawan dengan

kontribusi yang tidak mencapai 1 sehingga menimbulkan disparitas sektor antar wilayah

Sedangkan untuk sektor jasa perusahaan berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.35 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 13



Berdasarkan Gambar 5.35 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor jasa perusahaan pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda pada setiap kabupaten/kota.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan berkembang cepat dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 0,02 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,0053 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 3,40 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 2,64

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yaitu 0,0055 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,0053 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 1,11 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 2,64

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,0036 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,0053 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 3,04 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 2,64

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,001 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,0053 serta laju pertumbuhan Kabupaten

Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 2,31 dibandingkan laju pertumbuhan provinsi sebesar 2,64

Kota Pekanbaru hanya sebesar 0,02 dan laju pertumbuhan sebesar 3,40 sehingga meskipun termasuk kedalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh, disparitas yang terjadi antar sektor tidak terlalu tinggi dikarenakan kontribusi masing-masing wilayah sangat rendah.

Sedangkan untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan wajib sosial berdasarkan analisis yang telah di lakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.36 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 14



Berdasarkan Gambar 5.36 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan wajib sosial pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan tiga wilayah dengan klasifikasi yang sama dan satu wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 3,74 dibandingkan dengan propinsi sebesar 1,79 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih rendah yakni sebesar -0,71 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan -0,30

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 1,00 dibandingkan dengan propinsi sebesar 1,79 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih tinggi yaitu sebesar 0,42 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar -0,30

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 1,64 dibandingkan dengan propinsi sebesar 1,79 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 0,06 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar -0,30

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 1,16 dibandingkan dengan propinsi sebesar 1,79 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 0,22 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar -0,30

Kota Pekanbaru memiliki kontribusi yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 3,74 disparitas tertinggi terjadi antara Kabupaten Siak yang hanya memiliki kontribusi sebesar 1,00

Sedangkan untuk sektor jasa pendidikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.37 sebagai berikut :





PETA SEKTOR 15

Berdasarkan gambar 5.37 dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor jasa pendidikan pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan cepat tumbuh dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 1,01 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,48 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 0,78 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 0,68

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yaitu 0,49 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,48 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 0,67 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 0,68

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,46 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,48 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 2,80 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 0,68

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,30 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,48 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 0,93 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 0,68

Kota Pekanbaru memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yaitu 1,01 akan tetapi angka ini termasuk angka kontribusi terkecil sehingga jika dibandingkan dengan kabupaten lain disparitas yang terjadi tidak terlalu tinggi.

Sedangkan untuk sektor jasa kesehatan berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.38 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 16



Berdasarkan gambar 5.38 diatas dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan cepat tumbuh dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 0,47 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,18 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 3,97 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 0,56

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor maju dan cepat tumbuh dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yaitu 0,20 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,18 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih tinggi yaitu sebesar 0,93 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 0,56

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,17 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,18 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih tinggi yaitu sebesar 1,14 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 0,56

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,13 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,18 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 0,43 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 0,56

Kota Pekanbaru memiliki kontribusi terbesar yaitu 0,47 jika dibandingkan dengan dengan kabupaten Siak hanya 0,20 dan Kabupaten Kampar 0,17 serta Kabupaten Pelalawan dengan kontribusi 0,13 akan tetapi disparitas yang terjadi tidak terlalu tinggi dikarenakan kontribusi masing-masing wilayah cenderung rendah.

Sedangkan untuk sektor jasa lainnya berdasarkan analisis yang telah di lakukan diperoleh pola disparitas antar wilayah pada wilayah Pekansikawan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.39 sebagai berikut :



PETA SEKTOR 17



Berdasarkan gambar 5.39 diatas dapat di jelaskan bahwa pola disparitas pada sektor jasa lainnya pada masing-masing kabupaten/kota dengan hasil klasifikasi Tipologi Klassen menunjukkan dua wilayah dengan klasifikasi yang sama dan dua wilayah yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

Kota Pekanbaru termasuk ke dalam sektor maju dan cepat tumbuh dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yakni sebesar 1,10 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,47 serta laju pertumbuhan Kota Pekanbaru lebih tinggi yakni sebesar 7,64 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi dengan pertumbuhan 6,35

Kabupaten Siak termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan dikarenakan Kabupaten Siak memiliki kontribusi sektor yang lebih tinggi yaitu 0,52 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,47 serta laju pertumbuhan Kabupaten Siak lebih rendah yaitu sebesar 5,13 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 6,35

Kabupaten Kampar termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,29 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,47 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 3,81 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 6,35

Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal dikarenakan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi sektor yang lebih rendah yaitu 0,27 dibandingkan dengan propinsi sebesar 0,47 serta laju pertumbuhan Kabupaten Kampar lebih rendah yaitu sebesar 5,01 dibandingkan laju pertumbuhan propinsi sebesar 6,35

Kota Pekanbaru memiliki kontribusi terbesar yaitu 1,10 jika dibandingkan dengan kabupaten dengan kontribusi terendah yaitu Kabupaten Pelalawan dengan kontribusi sebesar

0,27 hal ini menunjukkan disparitas yang terjadi tidak terlalu tinggi dikarenakan kontribusi pada masing-masing wilayah cukup rendah.



Tabel 5.51 Klasifikasi Tipologi Klassen Wilayah Pekansikawan

No	Sektor	Kabupaten/Kota	Klasifikasi			
			Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Pekanbaru				√
		Siak				√
		Kampar	√			
		Pelalawan				√
2	Pertambangan dan Penggalian	Pekanbaru			√	
		Siak		√		
		Kampar	√			
		Pelalawan			√	
3	Industri Pengolahan	Pekanbaru			√	
		Siak		√		
		Kampar				√
		Pelalawan		√		
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Pekanbaru		√		
		Siak			√	
		Kampar				√
		Pelalawan			√	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Pekanbaru		√		
		Siak			√	
		Kampar				√
		Pelalawan			√	
6	Konstruksi	Pekanbaru	√			
		Siak				√
		Kampar				√
		Pelalawan				√

No	Sektor	Kabupaten/Kota	Klasifikasi			
			Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pekanbaru	√			
		Siak			√	
		Kampar				√
		Pelalawan				√
8	Transportasi dan Pergudangan	Pekanbaru	√			
		Siak				√
		Kampar			√	
		Pelalawan			√	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pekanbaru	√			
		Siak				√
		Kampar			√	
		Pelalawan			√	
10	Informasi dan Komunikasi	Pekanbaru	√			
		Siak				√
		Kampar				√
		Pelalawan				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Pekanbaru	√			
		Siak				√
		Kampar				√
		Pelalawan			√	
12	Real Estate	Pekanbaru	√			
		Siak			√	
		Kampar		√		
		Pelalawan				√

No	Sektor	Kabupaten/Kota	Klasifikasi			
			Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
13	Jasa Perusahaan	Pekanbaru	√			
		Siak		√		
		Kampar			√	
		Pelalawan				√
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Pekanbaru		√		
		Siak			√	
		Kampar			√	
		Pelalawan			√	
15	Jasa Pendidikan	Pekanbaru	√			
		Siak		√		
		Kampar			√	
		Pelalawan			√	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Pekanbaru	√			
		Siak	√			
		Kampar			√	
		Pelalawan				√
17	Jasa lainnya	Pekanbaru	√			
		Siak		√		
		Kampar				√
		Pelalawan				√
Total		Pekanbaru	11	3	2	1
		Siak	1	5	5	6
		Kampar	2	1	6	8
		Pelalawan	0	1	8	8

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan Tabel 5.51 tentang klasifikasi tipologi klassen antar sektor di wilayah Pekansikawan dapat di perhatikan bahwa pada Kota Pekanbaru memiliki 11 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh dan 3 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor maju tapi tertekan, 2 sektor yang termasuk kedalam sektor berkembang cepat serta hanya 1 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor relatif tertinggal

Sedangkan untuk Kabupaten Siak memiliki 1 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh, 5 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor maju tapi tertekan, 5 sektor yang termasuk kedalam sektor berkembang cepat serta 6 sektor termasuk kedalam sektor relatif tertinggal.

Pada Kabupaten Kampar memiliki 2 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh, 1 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor maju tapi tertekan, 6 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor berkembang cepat dan 8 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor relatif tertinggal.

Pada Kabupaten Pelalawan tidak memiliki sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh, 1 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor maju tapi tertekan, 8 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor berkembang cepat serta 8 sektor yang termasuk kedalam klasifikasi sektor relatif tertinggal.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan output pada masing-masing analisis. Adapun Kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut :

a. Laju Pertumbuhan

- (I) Laju pertumbuhan Kota Pekanbaru berdasarkan data *time series* yaitu 5 tahun terakhir cenderung stabil pada masing-masing sektor akan tetapi pada Tahun 2016 terdapat 2 sektor yang memiliki angka pertumbuhan dibawah 0 atau minus yaitu terdapat pada sektor 5 dan sektor 14 yaitu pada sektor 5 laju pertumbuhan sebesar -1,45 dan pada sektor 14 laju pertumbuhan sebesar -0,71
- (II) Laju pertumbuhan Kabupaten Siak berdasarkan data *time series* yaitu 5 tahun terakhir banyak mengalami penurunan akan tetapi untuk persentase pertumbuhan yang berada dibawah angka 0 % pada Tahun 2016 hanya terdapat pada satu sektor yaitu sektor 2 atau pertambangan dan penggalian yakni sebesar -4,26
- (III) Laju pertumbuhan Kabupaten Kampar berdasarkan data *time series* yaitu 5 tahun terakhir yaitu juga mengalami banyak penurunan dari tahun sebelumnya dan satu satunya sektor yang memiliki angka pertumbuhan di bawah 0% pada Tahun 2016 yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian sedangkan sektor pertambangan dan

penggalian merupakan salah satu sektor yang cukup menyumbang angka PDRB yang cukup tinggi setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

(IV) Kabupaten Pelalawan Berdasarkan data time series yaitu pada 5 tahun terakhir dapat dikatakan cukup memiliki rata rata pertumbuhan yang cukup rendah pada masing masing sektor jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, dan terdapat 2 sektor yang memiliki angka pertumbuhan dibawah 0% pada tahun 2016 yaitu terdapat pada sektor 2 dan sektor 5 yakni sebesar -0,34 dan -0,42

b. Disparitas Ekonomi Wilayah Pekansikawan

Terdapat indikasi disparitas yang tidak terlalu tinggi atau sedang di Wilayah Pekansikawan hal ini dikarenakan Indeks Williamson pada Tahun 2012 sebesar 0,331 dan pada tahun 2016 Indeks Williamson menunjukkan angka sebesar 0,194. Disparitas yang terjadi pada lima tahun terakhir semakin menurun. Hal ini memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian pada Wilayah Pekansikawan.

c. Pola Disparitas Ekonomi Wilayah

(I) Bentuk pola disparitas yang terjadi pada Wilayah Pekansikawan bahwa Kota Pekanbaru memiliki 11 sektor yang memiliki klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh sedangkan Kabupaten Siak hanya memiliki 1 sektor maju dan cepat tumbuh dan pada Kabupaten Kampar memiliki 2 sektor maju dan cepat tumbuh yaitu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan

penggalian, sedangkan pada Kabupaten Pelalawan tidak memiliki satu sektor pun yang masuk kedalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh akan tetapi pada Kabupaten Pelalawan memiliki sektor maju tapi tertekan.

- (II) Terdapat 5 sektor dengan tingkat disparitas yang cukup tinggi dilihat dari segi kontribusi sektor masing-masing wilayah yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan besar dan eceran.
- (III) Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi yang tertinggi yaitu 37,04 yang jauh jika dibandingkan dengan Kota Pekanbaru yang hanya memiliki 1,53 akan tetapi dibandingkan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak jarak kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tidak terlalu jauh yaitu Kabupaten Siak dengan kontribusi 21,30 dan Kabupaten Kampar dengan Kontribusi 28,72
- (IV) Pada sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Kampar memiliki angka kontribusi tertinggi yaitu sebesar 29,03 sehingga jauh meninggalkan Kota Pekanbaru yang hanya memiliki kontribusi 0,02 akan tetapi untuk Kabupaten Siak disparitas tidak terlalu jauh karena Kabupaten Siak memiliki kontribusi sebesar 27,68
- (V) Pada sektor industri pengolahan Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi paling besar yaitu 51,95 sehingga meninggalkan Kota

Pekanbaru serta dua Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Siak dengan Kontribusi 41,49 dan Kabupaten Kampar dengan kontribusi 27,74 Kabupaten Pelalawan jauh meninggalkan Kota Pekanbaru yang hanya memiliki kontribusi 22,02

(VI) Pada sektor konstruksi Kota Pekanbaru dengan kontribusi 28,04 dan laju pertumbuhan 11,87 jauh meninggalkan tiga kabupaten/kota lainnya, yaitu dengan Kabupaten Siak 4,14, Kabupaten Kampar hanya 6,57, Kabupaten Pelalawan 2,22.

(VII) Pada sektor perdagangan besar dan eceran Kota Pekanbaru dengan kontribusi 27,95 dan laju pertumbuhan 5,87 jauh meninggalkan tiga kabupaten kota lainnya, akan tetapi untuk kabupaten siak memiliki laju pertumbuhan yang tidak terlalu jauh dari laju pertumbuhan Kota Pekanbaru yaitu sebesar 5,36 meskipun kontribusi Kabupaten Siak jauh berada dibawah Kota Pekanbaru yaitu sebesar 1,92.

7.2. Saran

Adanya disparitas ekonomi di Wilayah Pekansikawan yang sehingga saran yang dapat penulis berikut :

a. Saran Kepada Pemerintah yaitu

(I) Melakukan kajian strategi kebijakan pemerataan ekonomi Wilayah Pekansikawan guna menekan angka disparitas pada Wilayah Pekansikawan.

(II) Memperhatikan sektor yang menyumbang PDRB pada masing-masing wilayah sehingga tidak terjadi penurunan persentase pertumbuhan. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat stabil setiap tahunnya.

(III) Mempersiapkan strategi pertumbuhan ekonomi pada sektor penyumbang terkecil ataupun sektor yang terbilang lemah maupun sektor yang berkontribusi tinggi akan tetapi pertumbuhannya lemah pada masing-masing Wilayah Pekansikawan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Boediono. 1984. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Perumbuhan dan Ekonomi Perkembangan*. Jakarta: LP3ES.

Hasibuan, Nurimansjah. 1993. *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi Teori dan Terapan*. Palembang: Universitas Sriwijaya

Irawan. Suparmoko M. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Jingan, M.L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Guritno, Penerjemah. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Terjemahan dari; *The Economic of Development and Planning*.

Muta'ali, Luthfi. 2015. *Teknik Analisis Regional; Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPF) Universitas Gadjah Mada.

Nurzaman, Siti Sutriah. 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia pada masa sekitar krisis*. Bandung: ITB.

Nurzaman, Siti Sutriah. 2012. *Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia*. Bandung: ITB.

Rustiadi, Ernan. Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers

T. Gile, Richard. 1979. *Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang*. Priyono, Penerjemah. Jakarta. Terjemahan dari; *Economic Deveopment Past and Present*.

Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michael. Smith, Stephen. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Haris M, Penerjemah. Jakarta. Erlangga. Terjemahan dari; *Economic Development*.

Sumber Skripsi / Thesis / Disertasi :

Putra, Fiki Angga. 2017. *Kajian Potensi Perkembangan Fenomena Mega Urban di Wilayah Pekansikawan*. Skripsi. Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau. Pekanbaru

Handayani, Fitri Ami. 2006. *Analisis Kesenjangan Wilayah di Gerbangtosusila ditinjau dari aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Skripsi. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mayasari, Lara Nitha. 2015. *Analisa Kesenjangan Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Aspek Ekonomi dan Sosial. Skripsi.* Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau. Pekanbaru

Rahman, A. 2009. *Analisis Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten Sambas. Thesis.* Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Suyatno. 2013. *Analisis Disparitas Perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur). Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Sumber Jurnal :

Ahadismal, dkk. 2012. *Disparitas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.* Fakultas Pengembangan Wilayah, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin. Makassar. 02 April 2018

Astari dan Paidi. 2011. *Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi antar Kecamatan di Kota Medan.* Volume 3

Bintang, Cihe Aprilia dan Putu Gde. 2012. *Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Berbasis Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan di Wilayah Kabupaten Bengkalis.* Volume 1

Nurhuda, dkk. 2012. *Analisis Ketimpangan Pembangunan.* Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Malang. Vol 1 Nomor 4. 02 April 2018

Lach, Lukaz dan Henryk Gurgul. 2011. *The Impact of Regional Disparities on Economic Growth*. University of science technology in Krakov. Vol 1 Nomor 2. 28 November 2018.

Roida. 2009. *Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan antar Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera*. Fakultas Pascasarjana, Unimed. Medan. 02 April 2018

Rumagit, Irene. 2013. *Disparitas Pembangunan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. 02 April 2018

Sjafrizal, dkk. 2014. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya*. 02 April 2018

Subagyo. 2000. *Disparitas Pembangunan dan faktor faktor yang Mempengaruhinya: Studi Kasus di Daerah Sumbagsel*. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah. Surakarta. Vol 1 Nomor 1. 02 April 2018

Sumber Lainnya :

Pemerintah Indonesia. 2017. *Keputusan Gubernur Riau tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pekansikawan*. Lembaran Negara RI Tahun 2017. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2017. *Provinsi Riau Dalam Angka 2017*, Pekanbaru; BPS Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2017. *Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2017*. Pekanbaru; BPS Provisi Riau

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2017. *Kabupaten Siak Dalam Angka 2017*.

Pekanbaru; BPS Provinsi Riau

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2017. *Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun*

2017. Pekanbaru; BPS Provinsi Riau

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2017. *Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun*

2017. Pekanbaru; BPS Provinsi Riau

